

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 3 No. 1 Januari 2015

**PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PKN MATERI PENTINGNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA SISWA SMP MUH 1 SURAKARTA
(Mohammad Yahya)**

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KURIKULUM 2013 DALAM PENGEMBANGAN SIKAP SPIRITUAL RELIGIUS DAN SIKAP SOSIAL PADA SISWA SMAN KOTA MATARAM
(Mumbrita Sulaimi, Ni Made Novi Suryanti, Muh. Zubair)**

**MODEL PENGUATAN KARAKTER MELALUI PERKULIAHAN KEPRAMUKAAN PADA MAHASISWA PPKN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN
(Sri Arfiah, Bambang Sumardjoko dan Agus Prasetyo)**

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *QUANTUM TEACHING* TIPE BELAJAR KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN HASIL PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS I SDN KRATON 3 KABUPATEN BANGKALAN
(Susanti)**

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP KEBERADAAN DAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SALAH SATU KELOMPOK MARGINAL
(Hassan Suryono, Rima Vien Permata Hartanto)**

**AKTUALISASI NILAI – NILAI KARAKTER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBBASIS KKNI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DOSEN DAN LULUSAN PROGRAM STUDI PPKn
(Anita Trisiana)**

**PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK
(Siti Supeni, Fitri)**

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3Kni) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, MPd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, MSi. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M Hum.

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S Pd., M Si.

Anggota Dewan Penyunting

Arif Kriswahyudi, S Pd.
Siti Aminah, S Pd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: journal_ppkn@yahoo.co.id
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya **Jurnal PPKn Volume 3 Nomor 1 Januari 2015**. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi PPKn Indonesia (AP3KnI) wilayah Jawa Tengah.

Jurnal PPKn berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pada edisi kali ini dimuat 6 (enam) buah artikel hasil penelitian dan 1 (satu) buah artikel hasil pemikiran bidang pendidikan kewarganegaraan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan. Tujuan jangka panjang adalah memperkaya dimensi PKn akademik. Sasaran pembaca dari Jurnal PPKn adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati bidang pendidikan kewarganegaraan.

Redaksi mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Januari 2015

Redaksi

DAFTAR ISI

Hal

**PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PKN MATERI PENTINGNYA
KEHIDUPAN DEMOKRASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE STAD PADA SISWA SMP MUH 1 SURAKARTA**

(Mohammad Yahya)

511-

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN KURIKULUM 2013 DALAM PENGEMBANGAN
SIKAP SPIRITUAL RELIGIUS DAN SIKAP SOSIAL PADA SISWA SMAN
KOTA MATARAM**

(Mumbrita Sulaimi, Ni Made Novi Suryanti, Muh. Zubair)

**MODEL PENGUATAN KARAKTER MELALUI PERKULIAHAN
KEPRAMUKAAN PADA MAHASISWA PPKN SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN MUTU LULUSAN**

(Sri Arfiah, Bambang Sumardjoko dan Agus Prasetyo)

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *QUANTUM TEACHING* TIPE
BELAJAR KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN HASIL PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS I SDN KRATON 3
KABUPATEN BANGKALAN**

(Susanti)

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP
KEBERADAAN DAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
SEBAGAI SALAH SATU KELOMPOK MARGINAL**

(Hassan Suryono, Rima Vien Permata Hartanto)

**AKTUALISASI NILAI – NILAI KARAKTER DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN BEBBASIS KKNi UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI
DOSEN DAN LULUSAN PROGRAM STUDI PPKn**

(Anita Trisiana)

**PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU
TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK**

(Siti Supeni, Fitri)

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PKN MATERI PENTINGNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA SISWA SMP MUH 1 SURAKARTA

Mohammad Yahya

SMP MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA

Email : moh_yahya@gmail.com

ABSTRACT. *The research aims: 1) to know the reality on the ground regarding the interest of class VIII student 1 H SMP Muhammadiyah Surakarta school year 2011/2012 and 2) To determine the implementation of cooperative learning model type STAD with the class VIII 1 H SMP Muhammadiyah Surakarta school year 2011 / 2012. This study uses a classroom action research design consisting of two cycles. Each cycle includes four phases of activities, including planning, action, observation, and reflection. The results showed that the learning Citizenship Education (Civics) on the importance of democratic life in the society, nation and state by using STAD type of cooperative learning model can generate interest and active participation of students and improve learning outcomes. Based on observations of the first cycle and the second cycle can be summed up as follows: the first cycle obtained from the acquisition of the average value of learning outcomes Citizenship Education (Civics) is 68.93 or there is an increase of 4.55% of the state of initial conditions, and in the second cycle obtained an average acquisition value of student learning outcomes is 81.16 or there is an increase of 17.74% from the first cycle. Thus the increase in the average of all cycles is 11.15%..*

Keywords : *STAD cooperative models, interests, learning outcomes*

PENDAHULUAN

Di era global seperti sekarang ini tuntutan dalam dunia pendidikan sudah banyak mengalami perubahan. Kita tidak bisa lagi mempertahankan paradigma lama dalam proses pembelajaran yang hanya berorientasi pada siswa yang hanya sekedar sebagai obyek,

sehingga dalam hal ini perlu adanya perubahan sistem dalam proses pembelajaran. Demikian juga dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, terlebih dari itu bahwa

objek pembahasan dalam kegiatan pembelajaran (KBM) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mencakup dua hal, yaitu: objek yang bersifat material dan bersifat formal. Adapun objek material dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun non empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warganegara dan negara (termasuk hubungan antar warganegara yang satu dengan lainnya).

Pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta ditemukan beberapa permasalahan :

1. Adanya asumsi siswa yang menganggap pelajaran PKn cukup mudah.
2. Masih kurang optimalnya minat yang dimiliki oleh siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
3. Hasil belajar siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang optimal.

Untuk menghindari agar tidak terjadi suatu pemahaman yang keliru, maka berdasarkan identifikasi

tersebut di atas peneliti membatasi hasil belajar PKn tentang pelaksanaan kehidupan demokrasi melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas VIII H semester 2 tahun pelajaran 2011/2012

Rumusan masalah dinyatakan sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dalam pembelajaran PKn? Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dalam mata pelajaran PKn?

Penelitian tindakan kelas ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran model kooperatif sesungguhnya merupakan model pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota yang lain. Sedangkan tipe *Student Team Achievement Division* (STAD) sendiri dikembangkan oleh Robert Slavin, dan merupakan pendekatan pembelajaran yang mana anggota tim dalam suatu kelompok menggunakan lembaran kegiatan atau lembar kerja siswa untuk

menuntaskan materi pelajaran dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami materi pembelajaran secara bersama.

Menurut Thomson (1995), pembelajaran kooperatif turut menambah unsur-unsur interaksi sosial pada pembelajaran. Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa, dengan kemampuan yang heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku (Thomson, 1995). Hal ini bermanfaat melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerja dengan teman berbeda latar belakangnya. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerjasama dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, siswa diberi lembar kegiatan (lembar kerja) yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan (Slavin, 1995).

Terdapat 6 fase atau langkah utama dalam pembelajaran kooperatif (Arends, 1997: 113). Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran

dan motivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti siswa dengan penyajian informasi, sering dalam bentuk teks bukan verbal. Selanjutnya siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru pada saat siswa bekerja sama menyelesaikan tugas mereka. Fase terakhir dari pembelajaran kooperatif, yaitu penyajian hasil akhir kerja kelompok, dan mengetes tentang apa yang mereka pelajari, serta memberikan penghargaan tentang usaha-usaha kelompok maupun individu

Student Team Achievement Divisions atau disingkat dengan STAD merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif dimana dalam pembelajaran dibentuk tim-tim heterogen yang saling membantu satu sama lain dalam belajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif dan prosedur kuis, tutorial satu sama lain atau melakukan diskusi.

Inti dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan tipe STAD adalah sebagai berikut:

- a. Mengajar, guru mempresentasikan materi pelajaran dan menyampaikan semua itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta memberikan motivasi siswa
- b. Pemberian kuis, siswa mengerjakan kuis atau

pertanyaan secara individual dan siswa tidak boleh bekerjasama.

- c. Penghargaan, pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan kelompok yang memperoleh skor tertinggi dalam kuis (Nur, 1999: 23).

Berpedoman dengan beberapa permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti dalam penelitian tindakan kelas mengambil judul "Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tentang Kehidupan Demokrasi melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada siswa kelas VIII H semester 2 SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012".

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kenyataan di lapangan mengenai minat belajar siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD pada siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.
3. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar

siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.

4. Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guna mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan.
2. Meningkatkan minat belajar siswa.
3. Siswa dapat saling berkompetitif dalam meningkatkan hasil belajar.
4. Guru dapat mengaplikasikan pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD
5. Guru memperoleh tambahan pengetahuan tentang penelitian.
6. Memberi masukan kepada teman guru untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Obyek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII H dengan jumlah 31 orang siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 yang dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai awal bulan Februari sampai dengan akhir bulan April 2012. Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti memilih kelas VIII H, karena kelas VIII H adalah kelas di mana nilai rata-rata harian yang merupakan hasil belajar yang tergolong rendah dan pasif dalam pembelajaran.

B. Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berwujud orang (individu-individu), yakni semua siswa kelas VIII H semester 2 SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah siapa sebanyak 31 orang. Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah "sebagian atau wakil populasi yang diteliti" (Suharsimi Arikunto, 1987: 90). Sampel dari penelitian ini adalah seluruh objek penelitian (populasi) yakni semua siswa kelas VIII H semester 2 SMP

Muhammadiyah 1 Surakarta yang berjumlah 31 orang siswa.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi data berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan data evaluasi. Data perencanaan berupa dokumen persiapan pembelajaran yang dibuat dengan bantuan teman sejawat secara kolaboratif. Data dalam perencanaan meliputi: perumusan tujuan kompetensi, kegiatan pembelajaran termasuk materi dan media pembelajaran serta evaluasi dalam pembelajaran. Data ini dikumpulkan sebelum kegiatan pembelajaran. Data pelaksanaan pembelajaran berupa deskripsi pembelajaran selama kegiatan belajar mengajar. Data tersebut akan terekam dalam catatan lapangan.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Metode tes. Menurut Suharsimi Arikunto (2000), tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan atau intelegensi.

2. Metode dokumentasi: bersumber dari data yang bersifat dan tidak berubah kebenarannya.
3. Metode observasi: suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu.
4. Metode interview: pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, di mana yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri (Sutrisno Hadi, 1978: 192).

Hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diukur menggunakan tes pada setiap siklusnya. Sedangkan data mengenai partisipasi aktif siswa diambil dengan menggunakan lembar observasi. Untuk validasi tes/soal terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi agar dalam penyusunan soal dapat menyebar dengan merata sesuai dengan cakupan materi yang ada pada kurikulum dan sesuai dengan tujuan kompetensi yang diharapkan. Sedangkan dalam melakukan validasi

terhadap lembar pengamatan peneliti melakukannya pola triangulasi data dengan teman sejawat.

E. Teknik Analisis Data

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis. Analisis statistik sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan, yakni data yang berbentuk angka-angka bilangan, sedangkan analisis non statistik adalah sesuai dengan data yang bersifat kualitatif. Dan pada penelitian tindakan kelas ini peneliti menggunakan teknik analisis data statistik yaitu dengan memeriksa hasil tes dan diberi skor sesuai dengan petunjuk penskoran. Hasil pemeriksaan ini selanjutnya disajikan tabel hasil belajar siswa.

F. Indikator Penelitian

1. Meningkatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran model kooperatif STAD. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan siswa selama kegiatan berlangsung yang disajikan dalam bentuk penskoran nilai secara kuantitatif dan disitulah akan terlihat adanya perubahan nilai rata-rata observasi.
2. Meningkatnya hasil belajar siswa dibandingkan dengan pada saat kondisi awal. Hal ini dapat dilihat

dari perubahan nilai rata-rata setiap siklus.

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua siklus. Masing-masing siklus mencakup empat tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.

a. Perencanaan (*Planning*)

- 1) Merumuskan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran.
- 2) Menyiapkan sumber bahan pembelajaran.
- 3) Mengembangkan skenario pembelajaran model kooperatif tipe STAD.
- 4) Menjelaskan kepada siswa tentang pendekatan pembelajaran kooperatif tipe STAD.
- 5) Mempersiapkan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang diawali dengan membentuk kelompok secara heterogen berdasarkan prestasi akademik, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan yang berbeda, memberikan enam masalah yang berbeda

dimana pembagian materi dilakukan secara acak.

b. Pelaksanaan tindakan (*Acting*)

- 1) Kegiatan pembelajaran diawali dengan memberikan salam dan mengabsensi siswa yang tidak hadir, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan untuk menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran.
- 2) Memberikan pengarahan tentang pendekatan pembelajaran model kooperatif tipe STAD.
- 3) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru yaitu tentang hakikat dan pentingnya kehidupan demokrasi dalam berbagai bidang, guru berkeliling mendatangi setiap siswa untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan berusaha membantu menjawab pertanyaan.
- 4) Guru menjelaskan materi pelajaran PKn tentang pentingnya kehidupan demokrasi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Setiap siswa dalam kelompok diberi tugas menyusun daftar pertanyaan, kemudian

anggota kelompok bertugas menjawab dan mempresentasikan di depan kelas secara bergantian. Kelompok lain bertugas mendengarkan, memberi masukan, atau bahkan memberikan sanggahan atas pertanyaan. Selanjutnya guru mengamati dan memberikan penilaian seperlunya.

6) Diakhir pembelajaran siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru yaitu mengerjakan soal-soal evaluasi yang berhubungan dengan tema.

7) Guru memberi tugas dengan mencari pengalaman sendiri sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan tema.

c. Pengamatan (*Observing*)

Ketika proses pembelajaran berlangsung peneliti dibantu kolaborator melakukan pengamatan dilengkapi

lembar observasi terhadap aktivitas siswa yang meliputi: memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas individu dan kelompok dengan baik, mempresentasikan tugas dengan baik dan penuh antusias, serta mengerjakan soal-soal evaluasi yang diberikan guru pada saat akhir pembelajaran siklus dan memberikan penilaian untuk dianalisis hasil rata-ratanya, selanjutnya dijadikan acuan dalam pembelajaran siklus berikut.

d. Refleksi (*reflecting*)

Pada tahap refleksi ini hasil yang diperoleh melalui observasi yang meliputi: partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, penilaian hasil belajar siswa, dan sebagainya, selanjutnya untuk dibahas dalam bentuk merefleksi hasil pengamatan yang kemudian untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran siklus berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kondisi Awal

1. Aktivitas Pembelajaran

Dalam aktivitas pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengajar, dalam pengertian menata lingkungan belajar agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. Kenyataannya masih banyak dijumpai dalam aktivitas pembelajaran guru masih menggunakan metode yang tergolong konvensional, yaitu ceramah, membahas soal, dan memberikan tugas. Sehingga dalam hal ini terkesan bahwa proses pembelajaran yang aktif adalah guru (guru sentris), artinya bahwa pembelajaran itu berpusat pada seorang guru, sementara siswa terkesan pasif yang hanya mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas dari guru, sehingga dalam proses pembelajaran

keterlibatan siswa masih tergolong sangat rendah atau bahkan pasif.

2. Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar

Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh bahwa pencapaian hasil belajar para siswa berdasarkan daftar nilai sebelum tindakan perbaikan dilakukan oleh peneliti (hasil belajar berdasarkan kondisi awal) diperoleh dari 31 siswa, baru 8 siswa (25,80%) yang mencapai KKM (mendapatkan nilai 70 ke atas). Nilai yang diperoleh siswa berkisar 58 – 80 dengan nilai rata-rata 65,93. Perolehan nilai rata-rata tersebut jauh dari batas nilai ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran PKn bagi kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.

Tabel 1. Hasil Perolehan Nilai PKn Kondisi Awal

No	Induk	Nama	NH	Keterangan
1	12944	ADITYA CAHYA KUSUMA	73	Tuntas
2	13036	ARDIANTO NUGROHO	65	Tidak Tuntas
3	12880	ARJUN ADE PRASETYA	71	Tuntas
4	13005	DIMAS ISMA PAMUNGKAS	70	Tuntas
5	12950	DIKRI WILDHAN PAMUGNKAS	58	Tidak Tuntas
6	13008	IBNU ROHMAT SETIAWAN	63	Tidak Tuntas
7	12976	IGO HANAFAI	66	Tidak Tuntas
8	13070	KENAR PRAYOGO	65	Tidak Tuntas
9	13041	KHORI KRISNA PRATAMA	65	Tidak Tuntas

10	12953	M. NOER ANDRIANTO	61	Tidak Tuntas
11	12859	MUH ALFIAN ABIMANTARA B.	70	Tuntas
12	13013	MUHAMAD NUER ABDUL AZIZ	61	Tidak Tuntas
13	12982	NURUL HUDA EKWI NOVA REZKI	63	Tidak Tuntas
14	12861	REZALDO ALFIANSYAH	70	Tuntas
15	12956	RINTO WALUYO	66	Tidak Tuntas
16	13017	SHANVINO ILHAM W.	65	Tidak Tuntas
17	12891	TAUFIK FIRMANSAH	65	Tidak Tuntas
18	13046	TEGAR PRASONGKO PUTRO	61	Tidak Tuntas
19	12959	WISNU MAHENDRA TAMA	65	Tidak Tuntas
20	12828	ZURYANI FERDI	66	Tidak Tuntas
21	13023	ANNISA KUSUMAWATI	68	Tidak Tuntas
22	12931	DESI BUDI LARASATI	66	Tidak Tuntas
23	12932	DYAH NUR ADI FATMAWATI	61	Tidak Tuntas
24	13025	EMA PALUPI	73	Tuntas
25	12978	IVA NUR AMILA	66	Tidak Tuntas
26	13031	MELATI SETYOWATI	58	Tidak Tuntas
27	12937	NADILA AULIA PUTRI	66	Tidak Tuntas
28	12908	NURUL HAYATI AS SOLIHAN	61	Tidak Tuntas
29	13063	TRI INAWATI	66	Tidak Tuntas
30	12974	WINDA APRI WIDIASTUTI	70	Tuntas
31	12912	YUSTINI NUR AZIZAH	80	Tuntas
Nilai Rata-Rata			65,93	
Nilai Tertinggi			80	
Nilai Terendah			58	

Dari hasil wawancara yang peneliti kumpulkan diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa siswa kurang berminat dan kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran PKn, karena guru lebih sering menggunakan metode dan pendekatan *lecture* (ceramah) dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan, akibat minat dan keaktifan siswa dalam

proses pembelajaran PKn menjadi berkurang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajarnya.

B. Deskripsi Per Siklus

1. Siklus Pertama

Hasil evaluasi belajar siswa setelah mengerjakan soal-soal evaluasi pada siklus 1 berupa nilai rata-rata siswa dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2. Hasil Perolehan Nilai PKn Siklus 1

No	Induk	Nama	NH	Keterangan
1	12944	ADITYA CAHYA KUSUMA	81	Tuntas
2	13036	ARDIANTO NUGROHO	65	Tidak Tuntas
3	12880	ARJUN ADE PRASETYA	71	Tuntas
4	13005	DIMAS ISMA PAMUNGKAS	73	Tuntas
5	12950	DIKRI WILDHAN PAMUGNKAS	55	Tidak Tuntas
6	13008	IBNU ROHMAT SETIAWAN	65	Tidak Tuntas
7	12976	IGO HANAFAI	70	Tuntas
8	13070	KENAR PRAYOGO	70	Tuntas
9	13041	KHORI KRISNA PRATAMA	70	Tuntas
10	12953	M. NOER ANDRIANTO	63	Tidak Tuntas
11	12859	MUH ALFIAN ABIMANTARA B.	73	Tuntas
12	13013	MUHAMAD NUER ABDUL AZIZ	61	Tidak Tuntas
13	12982	NURUL HUDA EKWI NOVA REZKI	65	Tidak Tuntas
14	12861	REZALDO ALFIANSYAH	70	Tuntas
15	12956	RINTO WALUYO	70	Tuntas
16	13017	SHANVINO ILHAM W.	70	Tuntas
17	12891	TAUFIK FIRMANSAH	70	Tuntas
18	13046	TEGAR PRASONGKO PUTRO	63	Tidak Tuntas
19	12959	WISNU MAHENDRA TAMA	70	Tuntas
20	12828	ZURYANI FERDI	70	Tuntas
21	13023	ANNISA KUSUMAWATI	71	Tuntas
22	12931	DESI BUDI LARASATI	70	Tuntas
23	12932	DYAH NUR ADI FATMAWATI	63	Tidak Tuntas
24	13025	EMA PALUPI	81	Tuntas
25	12978	IVA NUR AMILA	70	Tuntas
26	13031	MELATI SETYOWATI	60	Tidak Tuntas
27	12937	NADILA AULIA PUTRI	70	Tuntas
28	12908	NURUL HAYATI AS SOLIHAN	58	Tidak Tuntas
29	13063	TRI INAWATI	70	Tuntas
30	12974	WINDA APRI WIDIASTUTI	71	Tuntas
31	12912	YUSTINI NUR AZIZAH	83	Tuntas
Nilai Rata-Rata			68,93	
Nilai Tertinggi			83	
Nilai Terendah			55	

Dari daftar nilai siklus 1 juga dapat kita lihat baru 21 anak (67,74%) yang dapat mencapai ketuntasan belajar, dimana nilai anak tersebut sudah sesuai dengan batas ketuntasan minimal yaitu nilai 70 dan/atau lebih (diatasnya). Sedangkan 10 anak dari 31 anak belum berhasil mencapai batas

ketuntasan minimal untuk mata pelajaran PKn, karena nilai yang diperoleh masih berada dalam posisi di bawah nilai 70.

2. Siklus Kedua

Hasil pembelajaran yang dicapai dapat kita lihat pada tabel dan grafik histogram berikut ini.

Tabel 3. Hasil Perolehan Nilai PKn Siklus 2

No	Induk	L/P	Nama	NH
1	12944	L	ADITYA CAHYA KUSUMA	88
2	13036	L	ARDIANTO NUGROHO	76
3	12880	L	ARJUN ADE PRASETYA	80
4	13005	L	DIMAS ISMA PAMUNGKAS	75
5	12950	L	DIKRI WILDHAN PAMUGNKAS	70
6	13008	L	IBNU ROHMAT SETIAWAN	76
7	12976	L	IGO HANAFAI	81
8	13070	L	KENAR PRAYOGO	80
9	13041	L	KHORI KRISNA PRATAMA	83
10	12953	L	M. NOER ANDRIANTO	86
11	12859	L	MUH ALFIAN ABIMANTARA B.	88
12	13013	L	MUHAMAD NUER ABDUL AZIZ	71
13	12982	L	NURUL HUDA EKWI NOVA REZKI	88
14	12861	L	REZALDO ALFIANSYAH	83
15	12956	L	RINTO WALUYO	85
16	13017	L	SHANVINO ILHAM W.	81
17	12891	L	TAUFIK FIRMANSAH	83
18	13046	L	TEGAR PRASONGKO PUTRO	81
19	12959	L	WISNU MAHENDRA TAMA	73
20	12828	L	ZURYANI FERDI	86
21	13023	P	ANNISA KUSUMAWATI	86
22	12931	P	DESI BUDI LARASATI	83
23	12932	P	DYAH NUR ADI FATMAWATI	75
24	13025	P	EMA PALUPI	88

25	12978	P	IVA NUR AMILA	73
26	13031	P	MELATI SETYOWATI	70
27	12937	P	NADILA AULIA PUTRI	81
28	12908	P	NURUL HAYATI AS SOLIHAH	83
29	13063	P	TRI INAWATI	88
30	12974	P	WINDA APRI WIDIASTUTI	85
31	12912	P	YUSTINI NUR AZIZAH	90
Nilai Rata-Rata				81,16
Nilai Tertinggi				90
Nilai Terendah				70

Berdasarkan perolehan nilai hasil belajar pada perbaikan siklus kedua tersebut di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari jumlah siswa 31 orang, yang memperoleh nilai dalam kategori tuntas belajar adalah sebanyak 31 orang siswa (100%). Dengan demikian setelah pelaksanaan perbaikan pembelajaran

baik pada siklus pertama maupun siklus kedua ada peningkatan yang cukup signifikan, dimana siswa dalam proses pembelajaran peran sertanya secara aktif benar-benar menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil belajar yang diperoleh para siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah semua rangkaian kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tentang pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada siswa kelas VIII H SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) tentang pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat menimbulkan minat dan peran serta aktif siswa dalam belajar.

2. Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII H semester II (genap) SMP Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 pada

- mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
3. Berdasarkan hasil pengamatan siklus pertama dan siklus kedua dapat disimpulkan sebagai berikut: dari siklus pertama didapatkan perolehan nilai rata-rata hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah 68,93 atau ada peningkatan sebesar 4,55% dari keadaan kondisi awal, dan pada siklus kedua didapatkan perolehan nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 81,16 atau ada peningkatan sebesar 17,74% dari siklus pertama. Dengan demikian peningkatan rata-rata dari semua siklus adalah 11,15%.
 4. Sesuai dengan hasil pengamatan yang didapatkan, maka penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil, karena pada setiap pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus pertama maupun siklus kedua mengalami peningkatan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran PKn.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Dalam aktivitas pembelajaran hendaknya seorang guru mempersiapkan secara cermat tentang sarana pendukung pembelajaran dan fasilitas belajar yang diperlukan, karena sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh pada proses dan hasil belajar PKn siswa. Guru juga harus memahami tentang karakteristik siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pada gilirannya nanti seorang guru akan lebih mampu menerapkan model dan metode pembelajaran secara bervariasi sesuai dengan materi dan bahan ajar yang hendak dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yang pada hakikatnya akan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa dalam rangka mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan.

2. Bagi Siswa

Siswa diharapkan dapat ikut berperan aktif memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan meningkatkan usaha belajar lebih optimal sehingga dapat memperoleh prestasi yang diharapkan.

3. Bagi Sekolah

Hendaknya mengupayakan pengadaan berbagai media pembelajaran PKn, dan pemanfaatannya dapat diupayakan lebih optimal, misalnya: dalam penggunaan LCD yang merupakan salah satu sarana dan media pembelajaran di sekolah hendaknya dapat digunakan oleh setiap guru secara bergiliran dan bilamana perlu dijadwalkan, sehingga akan dapat lebih menunjang dalam penanaman konsep-konsep dalam pembelajaran PKn secara lebih nyata sekaligus meningkatkan aktivitas belajar siswa.

4. Bagi Orang Tua

Partisipasi aktif orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sangat diperlukan, apapun usaha guru tidak akan berhasil secara optimal apabila tidak ada bimbingan orang di rumah, masukan informasi tentang kemajuan dan kekurangan siswa yang bersangkutan. Oleh karena peran serta orang tua sangatlah diperlukan guna menunjang keberhasilan pendidikan anak, untuk itu kerjasama dan jalinan kekeluargaan antara orang tua dan sekolah harus selalu dibina secara terus menerus dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Sukarno. 1994. *Efektivitas Sistem Pengajaran Pelayanan bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Surakarta.
- Ernest R. Hilgard. 1948. *Theories of Learning*. New York: Appleton Century, Crafts Inc.
- Nur M. 1999. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Robert E. Slavin. 1995. *Cooperative Learning: Theory, Research and Practice*. Massachusetts: Allyn and Bacon Publisher.
- Suharsimi Arikunto. 1987. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutratinah Tirtonagoro. 1988. *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sutrisno Hadi. 1978. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- William T. Thomson. 1995. *Teori Getaran Dengan Penerapan*. Jakarta: Erlangga.
- Winkel WS. 1991. *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia.

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN KURIKULUM 2013 DALAM PENGEMBANGAN
SIKAP SPIRITUAL RELIGIUS DAN SIKAP SOSIAL
PADA SISWA SMAN KOTA MATARAM**

Mumbrita Sulaimi, Ni Made Novi Suryanti, Muh. Zubair

Jur PIPS FKIP Universitas Mataram Jl. Majapahit 62 Mataram 83125

Alamat E-mail: mumbrita@yahoo.co.id

Abstract: *This study aims at (1) knowing the planning of the Pancasila and Civic Education learning in developing spiritual and social attitudes of students; (2) knowing the implementation process of the subject in developing the students' spiritual and social attitudes; (3) knowing the learning evaluation for the subject in developing the students' spiritual and social attitudes; (4) knowing the strength and weakness in designing process of implementation and its evaluation of the subject in developing character or the spiritual and social attitudes. The approach used is descriptive-qualitative one, so its implementation goes through several phases, namely: (1) preparation phase (2) implementation of research phase (3) workshop of result verification phase; (4) recommendation phase in order to increase the learning quality; and (5) seminar and dissemination phase. The result of research shows that (1) the plan of conducting learning (RPP) which is designed by teachers is not holistic because it does not contain spiritual attitude within it. (2) the development of the students' spiritual and social attitudes of SMAN Y Mataram has been undergone in learning process of that subject but it is only in sense of praying at the beginning and the end of learning. (3) the evaluation of spiritual attitude in RPP is not yet written; this fact also happens in learning of the Pancasila and Civic education i.e. there is no an evaluation on spiritual attitude. (4) the teachers' readiness in developing students' spiritual and social attitudes through learning implementation and learning evaluation of the subject is not yet properly provided because they have not got ample information related to design, implementation, and evaluation of learning based on 2013 curriculum.*

Keywords: implementation, Pancasila and Civic education, spiritual and social attitude

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada umumnya masih menitik beratkan pada pencapaian hasil belajar ranah kognitif. Hal ini merupakan implikasi dari kuatnya tuntutan pemerintah dan

masyarakat terhadap pencapaian hasil Ujian Nasional (UN) yang tinggi. Hasil Ujian Nasional itu sendiri sebenarnya hanya merupakan salah satu ranah hasil belajar, yaitu hasil belajar kognitif. Sementara itu, hasil belajar ranah

afektif dan psikomotorik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sering dilupakan.

Akibat dari kuatnya tuntutan di atas, maka seringkali para siswa menampilkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sering diungkapkan dalam berita media massa tentang terjadinya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, dan lain-lainnya.

Sebenarnya mata pelajaran PPKn di SMA tidak termasuk mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional. Namun berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, terlihat pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMA pun belum menekankan pada upaya pencapaian hasil belajar sikap dan keterampilan. Akibatnya, hasil belajar PPKn di sekolah juga belum sesuai dengan tuntutan tujuan mata pelajaran PPKn yang menitik beratkan pada pembentukan karakter.

Hasil penelitian Mumbrita dkk (2013) tentang "Pemetaan Masalah Ketersediaan dan Kesiapan *Input* Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PPKn di SMAN Kota Mataram" menunjukkan masih terdapat sekolah yang menjadi model Pengembangan Pendidikan Karakter, tetapi tingkat kesiapan

input nya masih rendah dalam pengembangan pendidikan karakter. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kualitas *input* yang diharapkan dengan realitas *input* yang dimiliki SMAN Kota Mataram. Belum idealnya kualitas *input* tersebut tentu berpengaruh terhadap perancangan, proses pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran (implementasi) PPKn dalam pengembangan karakter atau sikap spiritual dan sikap sosial siswa SMAN Kota Mataram.

Diterapkannya kurikulum baru tahun 2013 yang dikenal dengan Kurikulum 2013 menuntut agar implementasinya menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian autentik dengan target pencapaian Kompetensi Inti (KI-1) yang berisi karakter atau sikap spiritual, (KI-2) berisi karakter atau sikap sosial, (KI-3) berisi pengetahuan, dan (KI-4) yang berisi keterampilan. Oleh karena itu, pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa harus dilakukan guru dalam perancangan, proses pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Untuk itulah perlu dilakukan kajian melalui penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada perancangan, proses pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran (implementasi) PPKn dalam pengembangan karakter atau sikap

spiritual dan sikap sosial siswa SMAN Kota Mataram.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan untuk semua jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang baik melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus

mampu dilakukan oleh tiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Karakter Siswa SMAN Kota Mataram berangkat dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pemetaan Masalah Ketersediaan dan Kesiapan *Input* Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PPKn di SMAN Kota Mataram. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) tahap persiapan (penyusunan proposal dan penyusunan instrumen penelitian), (2) tahap pelaksanaan penelitian (perancangan, proses pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pengembangan sikap spiritual dan sosial siswa SMAN Kota Mataram), (3) tahap *workshop* verifikasi hasil, (4) tahap rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pengembangan sikap spiritual dan sosial siswa SMAN Kota Mataram, (5) tahap seminar hasil dan desiminasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini peneliti bermaksud untuk secara kualitatif menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi secara mendalam dan lengkap kemudian mendeskripsikan RPP PPKn, proses pelaksanaan pembelajaran PPKn, penilaian pembelajaran PPKn, mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan implementasi pembelajaran PPKn dalam pengembangan sikap spiritual dan sosial siswa SMAN Kota Mataram. Data RPP PPKn dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (*depth interview*).

Dari penelitian yang dilakukan tahun sebelumnya, ditentukan 1 (satu) SMAN Y yang memiliki ketersediaan dan kesiapan *input* dengan peringkat tertinggi dan 1 (satu) SMAN Y yang memiliki ketersediaan dan kesiapan *input* peringkat terendah. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti telah menentukan 2 (dua) SMAN dari 8 (delapan) SMAN di Kota Mataram. Sekolah yang memiliki ketersediaan dan kesiapan *input* dengan peringkat tertinggi adalah SMAN X Mataram, dan sekolah yang memiliki ketersediaan dan kesiapan *input* terendah adalah SMAN Y Mataram.

Subyek penelitian yang diambil dari 2 (dua) SMAN tersebut adalah guru PPKn dan siswa SMAN X dan SMAN Y Mataram. Untuk sampel siswa, diambil dengan teknik *accidental sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Data Perancangan Pembelajaran PPKn

Kurikulum 2013 di SMAN Y Mataram diterapkan sejak Tahun Pelajaran 2013-2014, tepatnya sejak Agustus 2013. Penerapan Kurikulum 2013 dimulai pada kelas X.

Sekalipun pada saat penelitian ini dilakukan penerapan Kurikulum 2013 di SMAN Y Mataram sudah memasuki tahun ke dua, tetapi sebagian besar guru SMAN Y Mataram belum pernah memperoleh sosialisasi tentang cara mengimplementasikan Kurikulum 2013. Baru 2 orang guru yang mendapat sosialisasi dari Dinas Dikbud Kota Mataram. Dari 2 orang guru tersebut kemudian diimbaskan kepada guru-guru yang lain. Guru PPKn SMAN Y Mataram termasuk guru yang mendapat sosialisasi implementasi Kurikulum 2013 melalui proses pengimbasan tersebut.

Sedangkan di SMAN X Mataram pada Tahun Pelajaran 2013-2014, para gurunya belum mendapatkan sosialisasi cara

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Setelah memasuki tahun ajaran baru 2014-2015 para guru memperoleh sosialisasi dan diklat tentang implementasi Kurikulum 2013, termasuk di dalamnya guru PPKn.

Berdasarkan Kurikulum 2013, sebelum seorang guru melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu perlu menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi: (a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (b) Bahan ajar, (c) Lembar Kerja Siswa (LKS), (d) Media pembelajaran, (e) Instrumen penilaian.

Di antara semua komponen perangkat pembelajaran tersebut, 4 (empat) di antaranya sudah disusun

oleh Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Buku Guru dan Buku Siswa, sekalipun isinya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa dan lingkungan sekitar kehidupan siswa. Adapun satu komponen perangkat pembelajaran yang harus disusun sendiri oleh guru atau tim guru adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran.

Berikut ini disajikan data hasil studi dokumenter berupa contoh sebuah RPP yang disusun oleh guru PPKn SMAN X Mataram pada tanggal 14 Juli 2014.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PPKn SMAN X MATARAM

Sekolah : SMA NEGERI X MATARAM
Kelas/semester : X / Gasal
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Materi pokok : Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Bangsa Indonesia
Alokasi waktu : 8 x 45 menit (4 X pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- 3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4.1 Menyaji kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Indikator

1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM.
2. Mendeskripsikan perlindungan dan pemajuan HAM.
3. Menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia.
4. Menganalisis upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM.
5. Membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.

D. Tujuan pembelajaran

Pertemuan 1

Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat:

1. Menjelaskan kasus pelanggaran HAM,
2. Menjelaskan terjadinya kasus Marsinah,
3. Menguraikan faktor penyebab dan solusi yang dapat berkaitan dengan kasus Marsinah,
4. **Menerapkan** perilaku jujur, kerja sama dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran.

Pertemuan 2

Melalui kegiatan mengkomunikasikan siswa dapat:

1. Menjelaskan hakikat hak asasi manusia dan periode pemajuan hak asasi manusia di Indonesia,

2. Menjelaskan pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta instrumen nasional HAM,
3. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia,
4. Menerapkan perilaku toleran, santun, responsif dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pertemuan 3.

Melalui kegiatan mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat:

1. Menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia,
2. Menjelaskan pengaturan HAM dalam konstitusi,
3. Menjelaskan pengaturan HAM dalam TAP MPR,
4. Menjelaskan pengaturan HAM dalam undang-undang,
5. Menjelaskan pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden,
6. **Menerapkan** perilaku jujur, disiplin, peduli dan pro aktif selama kegiatan pembelajaran.

Pertemuan 4.

Melalui kegiatan mengamati, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan siswa dapat:

1. Menganalisis gambar aparat yang sedang menangani kerusakan,
2. Menjelaskan fungsi Komnas HAM dan peradilan HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia,
3. Mengkomunikasikan secara tertulis peran Komnas HAM dan peradilan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia serta partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia,
4. **Menerapkan** perilaku pro-aktif, peduli dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

E. Materi Pembelajaran: Fakta

Kasus pelanggaran HAM (KASUS MARSINAH)

Konsep

1. Hakikat HAM
2. Pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM
3. Upaya Pemerintah dalam penegakan HAM
4. Membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan , penghormatan, dan penegakan HAM

Prinsip

Instumen HAM di Indonesia

Prosedur

Proses pradilan HAM di Indonesia

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Saintifik

Model pembelajaran : Inquiri Learning

Metode : Ceramah, diskusi kelompok, Tanya jawab dan penugasan

G. Alat/Media/ bahan

Alat/media : LCD, Lembar Kerja Siswa

Sumber belajar : Buku Guru dan Buku Siswa PPKN kelas X, sumber lain yang relevan

H. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none">• Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan• Guru menyampaikan topik tentang "HAM dalam kehidupan Bangsa Indonesia". Sebelum penyajian lebih lanjut tentang topik secara khusus guru melaksanakan sesi perkenalan dan terakhir guru memperkenalkan diri.• Guru memberikan penguatan tentang topik dan menyampaikan kompetensi atau tujuan yang akan dicapai.	10 menit
Kegiatan Inti	<p>Sebelum siswa membahas lebih jauh berbagai kasus pelanggaran HAM, guru menunjukkan wacana/paparan tentang kasus pelanggaran HAM.</p> <p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none">• Siswa disajikan cerita tentang kasus pelanggaran HAM, contoh kasus "Marsinah"• Siswa diberi waktu untuk membaca kasus tersebut. <p>Menanya</p>	60 menit

	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa membuat pertanyaan tentang kasus Marsinah (dimana siswa diharapkan dapat membuat 3 (tiga) pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku. <p>Mengumpulkan data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa secara berkelompok mengumpulkan data/informasi berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di tinjau dari upaya perlindungan dan penegakkan HAM atau kasus yang sejenis dengan kasus Marsinah. <p>Mengasosiasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa membuat analisis terkait dengan factor penyebab dan solusi yang dapat diberikan dari kasus marsinah yang ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakkan HAM. <p>Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa (2-3 orang) dipilih secara random untuk mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis kasus tersebut sedangkan siswa yang lain diminta mengumpulkan hasil analisis secara tertulis. 	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan umpan balik secara lisan dan random tentang penguasaan siswa tentang kasus pelanggaran HAM. • Guru membagi/menentukan topik penugasan kepada masing-masing kelompok untuk dipersiapkan minggu depan • Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pemaparan perwakilan kelompok tentang kasus Marsinah dan mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 	20 menit

Pertemuan 2

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi • Guru menyampaikan topik tentang "pentingnya 	10 menit

	<p>perlindungan dan pemajuan HAM”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi, dimana kelompok yang telah ditentukan topiknya minggu lalu (pertemuan 1) agar menyiapkan diri 	
Kegiatan Inti	<p>Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi kelompok 1, topik BAB I, sub Bab B tentang pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM • Pada saat kelompok 1 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materi presentasi yang sedang dijelaskan • Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok lain memberikan saran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas • Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin (jumlah termin disesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan). 	65 menit
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum mengakhiri pelajaran guru meminta siswa untuk melakukan refleksi terkait dengan proses belajar • Guru bersama siswa menyimpulkan materi dan jalannya diskusi • Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan lancar dan diakhiri salam. 	15 menit

Pertemuan 3

Kegiatan	Deskripsi kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dalam proses belajar mengajar • Guru menyampaikan topik tentang “perlunya instrument Nasional HAM” • Guru mempersiapkan pembahasan materi dengan model pembelajaran inkuiri 	10 menit

<p>Kegiatan Inti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum siswa membahas lebih jauh perlunya Instrument Nasional HAM, guru dapat menjelaskan secara umum upaya pemerintah dalam perlindungan dan penegakkan HAM <p style="text-align: center;">Mengumpulkan data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa diberi waktu untuk membaca dari buku teks atau sumber lain seperti : website/internet/media cetak tentang instrumen HAM <p style="text-align: center;">Mengasosiasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa diberi waktu untuk menganalisis Instrument HAM yang terdapat dalam Buku Teks (Sub Bab C) dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (<i>website/internet/sumber lainnya</i>) • Siswa melakukan analisis instrument HAM yang mengatur tentang Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dengan melengkapi table 1.5. pengaturan HAM dalam UUD NKRI tahun 1945 dan table 1.6 analisi perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan anak Indonesia <p style="text-align: center;">Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara random (3-5 orang siswa) dipilih untuk mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis Komnas HAM dan Komisi perlindungan anak Indonesia. Sedangkan siswa yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis 	<p>70 menit</p>
<p>Penutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan umpan balik kepada siswa secara lisan terkait materi yang telah dibahas • Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pemaparan perlunya Instrument nasional dalam perlindungan dan penegakkan HAM • Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan lancar dan diakhiri salam 	<p>10 menit</p>

Pertemuan 4

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Penda-huluan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial siswa. • Guru menyampaikan topik tentang "Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM" dan "Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia". • Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model pembel inkuiri 	5 menit
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum siswa memahami pentingnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Guru memaparkan secara singkat tentang upaya pemerintah dalam menegakkan HAM (pembentukan Komnas HAM, Pembentukan produk hukum yang mengatur HAM, Pembentukan pengadilan HAM) <p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa dalam kelompok diberi waktu untuk mengamati Gambar 1.2 Aparat keamanan sedang mengatasi kerusuhan. <p>Mengasosiasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa dalam kelompok diberi waktu untuk menganalisis Gambar 1.2. Aparat keamanan sedang mengatasi kerusuhan, dan mengkaitkannya dengan fungsi Komnas HAM dan peradilan HAM dalam proses penegakan HAM di Indonesia. • Siswa dalam kelompok menganalisis partisipasimasyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan membandingkannya dari sumber lain yang relevan (media cetak/media elektronik/sumber lainnya). • Kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan 	75 menit

	<p>mengumpulkan informasi terkait dengan fungsi Komnas HAM dan peradilan HAM serta kegiatan menanya antarsesama siswa.</p> <p style="text-align: center;">Mengkomunikasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siswa dalam kelompok dapat mengkomunikasikan secara tertulis peran Komnas HAM dan peradilan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. 	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> • Guru menyimpulkan hasil analisis kelompok tentang partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Ind • Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan pentingnya memahami upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia serta partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. • Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan lancar. 	10 menit

I. Penilaian

Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan.

Instrumen penilaian sikap dan pengetahuan terlampir.

Menyetujui
Kepala Sekolah SMAN Y

Mataram, 14 Juli 2014
Guru PPKn

2. Data Pelaksanaan Pembelajaran PPKn

Dalam kegiatan pendahuluan, upaya mengembangkan sikap

spiritual siswa di kelas X IPA 2 SMAN Y Mataram telah dilakukan oleh guru melalui ucapan salam dan berdoa. Siswa berdoa di awal belajar dipimpin oleh ketua kelas.

Sedangkan dalam kegiatan inti pembelajaran terdapat beberapa siswa yang menunjukkan sikap sosial yang kurang baik. Ketika hal itu dilakukan siswa, guru tidak memberikan respon.

Dilihat dari kegiatan inti pembelajaran, guru belum mengupayakan pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial ketika siswa mengkaji substansi materi pada sebuah Kompetensi Dasar. Sedangkan pada tahap penutup, guru mengajak siswa berdoa dan mengucapkan salam kepada siswa (Data hasil observasi proses pembelajaran PPKn di kelas X IPA 2 SMAN Y Mataram pada hari Rabu, 23 April 2014 pk 07.30 – 09.00).

Kondisi tidak jauh berbeda ditemukan pada kelas X IPS 2 SMAN Y Mataram. Di kelas ini jumlah siswa yang tidak tertib lebih banyak dibandingkan dengan kelas X IPA 2. Sikap tidak tertib tersebut ditunjukkan dalam bentuk perilaku siswa terlambat masuk kelas yang jumlahnya lebih banyak daripada kelas X IPA 2. Siswa di kelas ini juga masih kurang baik sikap "hidup bersih" nya. Hal ini terlihat ketika pembelajaran akan dimulai para siswi kelas X IPS 2 masih sedang menyapu (hasil observasi proses pembelajaran PPKn di kelas X IPA 2 SMAN Y Mataram pada hari Jum'at, 25 April 2014 pk 08.30 – 09.50).

Pelaksanaan pembelajaran di kelas X PRIMA CENDEKIA SMAN X Mataram pada kegiatan pendahuluan berbeda dengan RPP yang telah disusun guru. Dalam pelaksanaan kegiatan pendahuluan pembelajaran, guru tidak mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa.

Pada saat pembelajaran memasuki tahap pendahuluan, terlihat 4 (empat) orang siswa terlambat masuk kelas. Siswa yang terlambat diminta guru untuk berdiri di depan kelas. Guru meminta mereka menyanyikan "Garuda di Dadaku". Di sini guru ingin menanamkan karakter cinta Indonesia, tetapi waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut terlalu lama.

Pada tahap kegiatan inti pembelajaran guru telah mengembangkan sikap sosial siswa. Pengembangan sikap sosial ini dilakukan melalui tanya jawab tentang substansi materi yang sedang dibahas siswa. Pada tahap kegiatan inti siswa juga diminta mengamati tayangan video tentang pelanggaran HAM. Siswa mengamati tayangan video dan bekerjasama dalam kelompok. Namun dalam kegiatan presentasi kelompok hanya diwakili oleh salah seorang anggota.

Pada tahap kegiatan penutup guru melakukan penanaman sikap sosial siswa dengan menayangkan

video tentang perilaku siswa yang baik dan yang kurang baik di lingkungan sekolah. Kegiatan pengembangan sikap sosial siswa di dalam pembelajaran PPKn kelas X PRIMA CENDEKIA SMAN 3, dilakukan guru baik pada tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti, maupun pada tahap penutup.

Dalam praktik pembelajaran di SMAN X Mataram, guru belum mengembangkan sikap spiritual siswa. Hal itu terjadi karena belum dipahaminya cara mengembangkan sikap spritual siswa. Menurut penuturan guru, kegiatan siswa berdoa cukup dilakukan pada awal pembelajaran jam pertama dan akhir pembelajaran jam terakhir pada hari itu. Dengan demikian, siswa tidak perlu berdoa pada jam pelajaran yang berada di antara jam pertama dan jam terakhir.

3. Data Evaluasi Pembelajaran PPKn

Evaluasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 harus

bersif holistik, meliputi penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Guru PPKn SMAN Y Mataram tidak membuat instrumen penilaian sikap spiritual, hanya membuat instrumen penilaian sikap sosial siswa berupa lembar penilaian teman sejawat. Akan tetapi, instrumen yang telah dibuat tersebut tidak digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Adapun di SMAN X Mataram, instrumen penilaian sikap telah disusun. Penilaian sikap sosial siswa dilengkapi dengan rubrik, sedangkan penilaian sikap spiritual tidak dilengkapi dengan rubrik. Berbagai instrumen yang telah dibuat tersebut tidak digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berikut ini dapat dilihat beberapa contoh instrumen dan rubrik penilaian sikap siswa SMAN X Mataram.

FORMAT PENILAIAN SIKAP SPRITUAL DAN SIKAP SOSIAL SISWA

Petunjuk

Lembar ini di isi oleh guru pada saat dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Padakolomsikap spiritual dan sosial,tuliskan skor angka1-4.Kemudian, tuliskan jumlah dan rata-rata skor pada kolom yang tersedia. Konversikan rata-rata skor tersebut ke dalam nilai kualitatif berikut ini

Interval	Nilai Kualitatif
3,66 – 4,00	SB (Sangat Baik)
2,66 – 3,33	B (Baik)
1,66 – 2,33	C (Cukup)
< 1,33	K (Kurang)

Nama Sekolah :

Kelas :

Kompetensi Dasar :

Materi Pokok :

Periode Penilaian :s.d

No	Nama Siswa	Sikap Spiritual dan Sosial										Total Skor	Rata-Rata	Nilai Kualitatif	Des-kripsi	
		1. Jujur	2. Disiplin	3. Tangg.	4. Toleran	5. Ctna	6. Kerjasama	7. Santun	8. Damai	9. Responsif	10. Proaktif					Taat mnajalankaa
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
dst																

RUBRIK PENSKORAN SIKAP SOSIAL

1. Aspek : Jujur

No	Indikator Kejujuran	Penilaian Kejujuran
1.	Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan	Skor 1 jika 1 sampai 2 indikator muncul
2.	Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas	Skor 2 jika 3 sampai 4 indikator muncul

3.	Mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya	Skor 3 jika 5 indikator muncul
4.	Melaporkan barang yang ditemukan	Skor 4 jika 6 indikator muncul
5.	Melaporkan data atau informasi apa adanya	
6.	Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki	

2. Aspek : Disiplin

No	Indikator Disiplin	Penilaian Disiplin
1.	sama sekali tidak bersikap disiplin selama proses pembelajaran.	Kurang (1)
2.	menunjukkan ada sedikit usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten	Cukup (2)
3.	menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran tetapi masih belum ajeg/konsisten	Baik (3)
4.	menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin selama proses pembelajaran secara terus menerus dan ajeg/konsisten.	Sangat baik (4)

Di samping instrumen dan rubrik penilaian sikap jujur dan disiplin, guru SMAN X Mataram juga telah menyiapkan instrumen dan rubrik penilaian sikap tanggungjawab, toleran, gotong royong, kerjasama, santun, damai, responsif, proaktif, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Semua instrumen ini tidak digunakan guru dalam pembelajaran karena guru merasa sulit mengelola waktu.

4. Data Kekuatan dan Kelemahan dalam

Perancangan, Proses Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran PPKn

Berikut ini disajikan data kekuatan dalam perancangan, proses pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran PPKn Kurikulum 2013.

a. Kekuatan

- 1) Motivasi dan komitmen guru PPKn dalam melaksanakan pembelajaran cukup tinggi.
- 2) Dukungan pimpinan sekolah cukup tinggi.
- 3) Motivasi belajar siswa SMAN X Mataram cukup tinggi.

- b. Kelemahan
Sedangkan kelemahan dalam perancangan, proses pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran PPKn Kurikulum 2013 antara lain adalah:
- 1) Pemahaman guru dalam pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PPKn SMA berdasarkan Kurikulum 2013 masih belum memadai.
 - 2) Pada saat Kurikulum 2013 harus mulai dilaksanakan oleh sekolah, guru belum memperoleh informasi tentang cara menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013.
 - 3) Pada saat Kurikulum 2013 harus mulai dilaksanakan oleh sekolah, di SMAN Y Mataram buku guru dan buku siswa yang merupakan acuan pembelajaran belum diterima oleh guru dan siswa.
 - 4) Pemahaman guru mengenai pengembangan dan implementasi strategi *discovery learning*, *problem based learning*, *project based learning*, dan *inquiry learning* yang merupakan pilihan dalam

implementasi kurikulum 2013 masih rendah.

PEMBAHASAN

1. Perancangan pembelajaran PPKn dalam pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa SMAN Kota Mataram

Sebelum seorang guru melaksanakan pembelajaran, ia harus menyiapkan lima komponen perangkat pembelajaran sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di antara lima komponen perangkat pembelajaran, 4 (empat) di antaranya sudah disusun oleh Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Buku Guru dan Buku Siswa, sekalipun isinya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa dan lingkungan sekitar kehidupan siswa. Adapun satu komponen perangkat pembelajaran yang harus disusun sendiri oleh guru atau tim guru adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran.

Penyusunan perangkat pembelajaran, termasuk RPP harus mempertimbangkan keseimbangan *soft skill* dan *hard skill* yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian, RPP yang disusun harus holistik, meliputi Kompetensi Dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan,

dan keterampilan. Jika mengkaji data RPP yang disusun oleh guru PPKn, maka dapat dilihat bahwa RPP yang disusun belum holistik, karena di dalamnya tidak berisi sikap spiritual yang harus dikembangkan guru melalui praktik pembelajaran. Bahkan RPP PPKn SMAN X Mataram tidak berisi sikap spiritual dan sikap sosial siswa.

Pendekatan pembelajaran yang dirancang oleh guru dalam RPP adalah pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Akan tetapi guru PPKn SMAN tidak menjabarkan lebih lanjut ke dalam strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran tidak dikembangkan berdasarkan strategi yang dipilih, melainkan didasarkan pada pendekatan pembelajaran yang sama, yaitu pendekatan saintifik, sehingga dalam satu semester semua langkah pembelajarannya sama. Hal ini terjadi karena guru belum memperoleh informasi tentang cara memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013.

Sedangkan mengenai materi pembelajaran yang dirancang dalam RPP PPKn, guru baru sebatas menuliskan judul Sub Materi Pokok saja, materi pembelajarannya belum diuraikan. Penyusunan materi pembelajaran sebenarnya mudah

dilakukan guru jika Buku Guru dan Buku Siswa telah tersedia, karena di dalamnya telah tercantum materi pembelajaran yang harus dikaji siswa.

Pada tahun pertama penerapan Kurikulum 2013, guru PPKn banyak mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang bersifat holistik karena banyak persiapan teknis dari Pemerintah Pusat yang belum matang, seperti Buku Guru dan Buku Siswa belum diterima sekolah dan guru belum memperoleh informasi mengenai cara menyusun perangkat pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam Pengembangan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Siswa SMAN Kota Mataram

Di SMAN Y Mataram, guru dan siswa dalam implementasi Kurikulum 2013 mengalami banyak kesulitan karena Buku Guru dan Buku Siswa belum ada, sementara **pembelajaran harus berpusat pada siswa** di manasiswa harus lebih aktif. Belum tersedianya Buku Siswa berakibat siswa tidak mengetahui materi apa yang akan dipelajari di kelas. Kesulitan siswa itu berlanjut di rumah karena tidak ada buku yang dapat digunakan untuk belajar di rumah. Yang dapat

dilakukan siswa hanya mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Solusinya guru harus berkreasi dengan mencari berbagai sumber referensi yang relevan dengan Kurikulum PPKn 2013.

Mengenai pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa dalam pembelajaran, guru merasa lebih sulit lagi mengingat hal itu merupakan salah satu yang membedakan Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, sementara guru belum memperoleh sosialisasi atau diklat tentang cara implementasi Kurikulum 2013.

Upaya pengembangan sikap spiritual siswa dalam pelaksanaan pembelajaran telah dilakukan oleh guru PPKn di SMAN Y Mataram pada kegiatan pendahuluan, sekalipun hanya dalam bentuk ucapan salam dan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sementara itu di SMAN X Mataram, guru belum mengembangkan sikap spiritual dalam pembelajarannya. Kondisi tersebut disebabkan belum dipahaminya cara mengembangkan sikap spritual. Menurut penuturan guru, kegiatan siswa berdoa cukup dilakukan pada awal pembelajaran jam pertama dan akhir pembelajaran jam terakhir pada hari itu. Dengan demikian, menurut guru, siswa tidak perlu berdoa pada setiap awal dan akhir jam pelajaran

yang berada di antara mata pelajaran jam pertama dan mata pelajaran jam terakhir.

Pengembangan sikap spiritual dalam pelaksanaan pembelajaran semestinya tidak sebatas hanya mengucapkan salam dan berdoa saja, namun sikap spiritual dikembangkan sesuai dengan substansi dari Kompetensi Dasar yang sedang dikaji.

Jika memperhatikan kurikulum PPKn SMA tersebut, seharusnya dalam **kegiatan inti** pembelajaran guru mengupayakan agar proses pembelajaran yang dilakukan mampu memfasilitasi siswa membangun sikap spiritual sebagaimana tertulis dalam rumusan Kompetensi Dasar. Karena salah satu ciri Kurikulum 2013 adalah bersifat **holistik**, artinya harus merefleksikan kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Mengenai sikap sosial, guru sudah berupaya mengembangkannya namun nampak masih terlalu luas, belum fokus pada substansi dari Kompetensi Dasar yang dikaji siswa. Di dalam RPP PPKn SMAN X Mataram telah disusun 9 (sembilan) sikap sosial yang sudah disusun rubriknya. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaan pembelajaran, semua rubrik tersebut tidak digunakan karena terlalu banyak. Untuk itu,

maka guru perlu membatasi pengembangan sikap sosial tertentu yang relevan dengan Kompetensi Dasar yang dikaji.

3. Penilaian Pembelajaran PPKn dalam Pengembangan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Siswa SMAN Kota Mataram

Berdasarkan data penelitian, guru PPKn SMAN Kota Mataram belum mengembangkan instrumen penilaian sikap spiritual. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, juga tidak terlihat ada kegiatan belajar siswa yang merefleksikan upaya membangun sikap spiritual siswa. Hal ini terjadi karena guru PPKn belum memperoleh informasi atau diklat tentang implementasi Kurikulum 2013, termasuk cara menilai sikap spiritual siswa. Untuk itu, guru harus berkreasi dengan mencari berbagai sumber referensi yang relevan dengan penilaian berdasarkan Kurikulum 2013.

Dalam pengembangan penilaian sikap sosial, baik di SMAN Y Mataram maupun di SMAN X Mataram, guru PPKn telah menyusun instrumen penilaiannya, tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran instrumen tersebut tidak digunakan oleh guru. Guru PPKn SMAN Y Mataram membuat instrumen penilaian sikap sosial

berupa satu lembar penilaian teman sejawat. Akan tetapi, instrumen tersebut tidak digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru PPKn SMAN X Mataram membuat instrumen penilaian sikap sangat rinci, meliputi sembilan sikap sosial. Akibatnya guru mengalami kesulitan mengamati perilaku yang mencerminkan sikap sosial siswa karena jumlah siswa dalam satu kelas cukup banyak dan instrumen sikap sosial yang disusun guru juga terlalu banyak.

Selain itu instrumen penilaian sikap sosial yang dikembangkan oleh guru sama untuk semua Kompetensi Dasar. Sebaiknya instrumen sikap sosial yang dikembangkan oleh guru disesuaikan dengan substansi Kompetensi Dasar yang dikaji, sehingga instrumen yang digunakan cukup dua atau tiga sikap sosial. Tidak harus sembilan sikap sosial sekaligus. Karena terlalu banyak instrumen sikap sosial yang disiapkan, akibatnya **tak ada satu pun** yang digunakan untuk menilai sikap sosial siswa dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa guru PPKn SMA belum melakukan penilaian autentik yang bersifat holistik yang meliputi penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Penilaian

otentik yang bersifat holistik ini perlu dilakukan karena memiliki relevansi kuat dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.

4. Kekuatan dan Kelemahan dalam Perancangan, Proses Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran PPKn dalam Pengembangan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Siswa SMAN Kota Mataram

Pada saat Kurikulum 2013 harus mulai diterapkan oleh sekolah, guru belum memperoleh informasi tentang cara menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. Demikian pula, Buku Guru dan Buku Siswa yang merupakan acuan pembelajaran belum diterima oleh guru dan siswa. Beruntung guru PPKn memiliki motivasi dan komitmen cukup tinggi untuk mengupayakan pembelajaran yang layak. Di tengah kesulitan tersebut guru berinisiatif mencari sumber-sumber belajar yang relevan agar pembelajaran dapat dilaksanakan mendekati tuntutan Kurikulum 2013.

Motivasi dan komitmen guru yang tinggi itu sangat penting, tetapi kemampuan teknis merancang, melaksanakan, dan

menilai pembelajaran juga penting. Untuk itu, maka pelatihan atau *workshop* guna meningkatkan kompetensi guru tentang teknis pembelajaran perlu dilakukan.

Pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran PPKn SMAN Kota Mataram belum dapat sepenuhnya dilakukan guru sesuai tuntutan Kurikulum 2013 karena guru belum dilatih dan Buku Guru serta Buku Siswa belum siap. Oleh karena itu, pemangku kepentingan pendidikan, yaitu Sekolah, Dinas Pendidikan Kota, dan LPMP, serta Pemerintah Pusat perlu memperluas dan meningkatkan pembinaan terhadap guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam perancangan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran terutama dalam pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Di samping itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengupayakan agar Buku Guru dan Buku Siswa kelas XII sudah berada di sekolah sebelum memasuki tahun ketiga implementasi Kurikulum 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru belum bersifat holistik, karena di dalamnya tidak berisi sikap spiritual. Bahkan RPP PPKn SMAN X Mataram tidak berisi sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Guru PPKn SMAN Kota Mataram banyak mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang bersifat holistik karena guru belum memperoleh informasi tentang cara menyusun perangkat pembelajaran dan banyak persiapan teknis dari Pemerintah Pusat yang belum matang.
2. Pengembangan sikap spiritual siswa SMAN Y Mataram telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran PPKn tapi sebatas berdo'a pada awal dan akhir pembelajaran. Sedangkan di SMAN X Mataram dari awal sampai akhir pembelajaran belum ada kegiatan siswa yang menggambarkan upaya pengembangan sikap spiritual.
3. Penilaian sikap spiritual siswa dalam RPP belum dituliskan. Demikian pula dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn tidak dilakukan penilaian sikap spiritual siswa. Penilaian sikap sosial siswa dalam RPP telah direncanakan oleh guru. Guru PPKn SMAN X Mataram telah

merumuskan instrumen dan rubrik penilaian sikap sosial cukup rinci, tetapi isinya sama untuk semua Kompetensi Dasar. Instrumen dan rubrik penilaian sikap sosial yang ada belum digunakan karena guru kesulitan mengelola waktu.

4. Komitmen guru dan dukungan pimpinan sekolah cukup tinggi, motivasi belajar siswa SMAN X Mataram cukup tinggi, input pembelajaran SMAN X Mataram memenuhi standar mutu dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum 2013.
5. Kesiapan guru dalam pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa melalui pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran PPKn masih belum memadai karena guru belum memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan dan penilaian pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Guru hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam menyusun rancangan pembelajaran dan proses pelaksanaan pembelajaran PPKn yang holistik, meliputi

- pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa di samping pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa.
2. Dalam kegiatan inti pembelajaran guru harus mengupayakan agar proses pembelajaran yang dilakukan mampu memfasilitasi siswa memiliki sikap spiritual sebagaimana tertulis dalam rumusan Kompetensi Dasar.
 3. Guru hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam menyusun instrumen dan rubrik penilaian sikap spiritual. Sedangkan instrumen dan rubrik penilaian sikap sosial perlu disesuaikan dengan sikap sosial yang relevan dengan substansi Kompetensi Dasar yang dikaji siswa.
 4. Pemangku kepentingan pendidikan perlu memperluas dan meningkatkan pembinaan guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam perancangan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran terutama dalam pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa.
 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengupayakan agar Buku Guru dan Buku Siswa kelas XII sudah berada di sekolah sebelum memasuki tahun ketiga implementasi Kurikulum 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- (2006). *Pelaksanaan Peraturan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006*. Jakarta: Permendiknas No. 24 Tahun 2006.
- (2010). *Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas Balitbang Puskur.
- Bogdan, R.C., Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Budimansyah, M. (2002). *Model Pembelajaran Berbasis Portofolio*. Bandung: PT Ganesindo.
- Depdiknas. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan.
- Lickona, Thomas. (2012). (diterjemahkan Saut Pasaribu). *Pendidikan Karakter*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Miles, M.S., & Huberman, A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of mew*

- methode*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1988). *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Poerwadaminta. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Samani, Muchlas. dan Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Slamet P.H. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah* (makalah tidak diterbitkan)
- Sulistyowati, Endah. (2012). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: PT. Citra Aji Prama.
- Udin S.Winataputra, dkk. (2005). *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Undang- undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MODEL PENGUATAN KARAKTER MELALUI PERKULIAHAN KEPRAMUKAAN PADA MAHASISWA PPKN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU LULUSAN

Sri Arfiah, Bambang Sumardjoko dan Agus Prasetyo
Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Alamat e-mail: bsmardjoko@yahoo.co.id

ABSTRACT. *The research aims to: (1) identify implementation lectures on Prodi PPKn (Civic Education Dept) Scouting FKIP UMS inside and outside the classroom; (2) the responses of students during the lecture Scouting; (3) the response of alumni and stakeholders on the subjects given Scouting; and (4) produce a draft model of strengthening character through scouting lecture to students PPKn an effort to improve the quality of graduates. Results of the study year I explains that: (1) the implementation of Scouting in Prodi PPKn lectures FKIP UMS implemented in the first half, II and IV; (2) The students felt that the course Scouting is very useful, particularly in forming character as teacher candidates PPKn; (3) alumni and stakeholders perceive the subjects Scouting strongly supports Prodi PPKn quality graduates, in particular respond to the challenges Curriculum 2013; and (4) strengthening the character of the students are expected to be optimized, with the development of Scouting in Prodi Internship models PPKn FKIP UMS.*

Keywords: *models, characters, scouting*

PENDAHULUAN

Persoalan pendidikan yang harus diperhatikan adalah proses dilakukannya pembelajaran. Pelaksanaan pendidikan Indonesia, dirasa kurang pada aspek pengembangan pribadi dan karakter peserta didik. Banyak sorotan dan permasalahan nasional yang berkaitan dengan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Menurut informasi dari situs berita Antara (3 Juni 2014), Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jember Jawa Timur telah menangkap seorang mahasiswa yang diduga

kuat sebagai pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang. Berita di atas sebagai salah satu realitas permasalahan yang terjadi berkaitan dengan lemahnya karakter pada mahasiswa di perguruan tinggi.

Pengembangan karakter salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan Kepramukaan. Kepramukaan menjadi salah satu unggulan di Program Studi (Prodi) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Perlu diketahui bahwa banyak muatan materi dalam

Kepramukaan yang penting bagi perkembangan mahasiswa. Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari Tri Satya, Dasa Dharma, kecakapan dan keterampilan yang dikuasai anggota pramuka. Tri Satya merupakan kode janji yang menunjukkan sikap nasionalisme dan sosialisme dari anggota pramuka. Dasa Dharma merupakan kode moral yang wajib dihafal dan diamalkan oleh anggota pramuka agar anggota pramuka memiliki karakter baik.

Istilah Pramuka memiliki makna yang dalam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 pasal 1, "Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan *Satya* Pramuka dan *Dharma* Pramuka". Seorang yang ingin bergelut dalam gerakan pramuka, harus lebih dahulu dilantik dengan mengucapkan *satya* (janji) pramuka. Menurut Mertoprawiro (1992:18), menyatakan bahwa:

"Pramuka merupakan rangkaian dari tiga kata yaitu Pra yang merupakan singkatan dari Praja yang berarti rakyat atau warga negara, Mu singkatan dari Muda, yang berarti rakyat/dewasa dan Ka, yang merupakan singkatan dari Karana yang artinya perbuatan, penghasilan, pertunjukan, aksi, tindakan, upacara, perusahaan, alat, pengertian, badan, pesawat".

Kepramukaan merupakan segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka. Gunawan (2012:265), menjelaskan bahwa kepramukaan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah atau keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, terarah, teratur, dan praktis yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, serta budi pekerti luhur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 pasal 1, Pendidikan Kepramukaan adalah "proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan serta pengalaman nilai-nilai Kepramukaan".

Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana merupakan satu-satunya organisasi berbadan hukum yang memiliki hak untuk menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 pasal 1, "Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan". Gerakan Pramuka berpusat di ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan kepanduan nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan Pramuka.
- b. Pengembangan Pramuka.
- c. Pengabdian masyarakat dan orang tua.
- d. Permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, prinsip dasar kepramukaan yang tercantum dalam bab IV pasal 11 sebagai berikut:

- 1) Prinsip dasar Kepramukaan adalah:
 - a) Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya.
 - c) Peduli terhadap diri pribadinya.
 - d) Taat kepada kode kehormatan pramuka.
- 2) Prinsip dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:
 - a) Norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka.

- b) Landasan kode etik anggota Gerakan Pramuka.
- c) Landasan sistem nilai Gerakan Pramuka.
- d) Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka.
- e) Landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka bab IV pasal 12, mengenai metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

- 1) Pengalaman kode kehormatan Pramuka.
- 2) Belajar sambil melakukan.
- 3) Sistem berkelompok.
- 4) Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
- 5) Kegiatan di alam terbuka.
- 6) Sistem tanda kecakapan.
- 7) Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri.
- 8) Kiasan dasar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, terdapat penjelasan mengenai kode kehormatan dan darma pramuka sebagai berikut:

- 1) Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri

serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.

2) Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.

3) Kode kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi:

"demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka"

4) Darma pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi:

- a) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
- c) Patriot yang sopan dan ksatria.
- d) Patuh dan suka bermusyawarah.
- e) Relia menolong dan tabah.
- f) Rajin, terampil, dan gembira.
- g) Hemat, cermat, dan bersahaja.
- h) Disiplin, berani, dan setia.
- i) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- j) Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Seorang yang bergelut dalam kegiatan pramuka akan memiliki berbagai keterampilan. Widodo (2007, 114-176), menyatakan bahwa seorang pramuka memiliki keterampilan sebagai berikut:

- a. Kompas adalah suatu alat yang dilengkapi dengan jarum bermagnet yang dapat menunjukkan arah utara dan selatan magnetis bumi.
- b. Sketsa panorama. Sketsa panorama biasanya dilampirkan dalam pembuatan laporan perjalanan bersama dengan peta pita.
- c. Peta pita adalah gambaran keadaan daerah/wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita.
- d. Peta lapangan adalah gambaran atau situasi dari suatu daerah atau lokasi tertentu yang dibuat dalam ukuran kecil menggunakan skala tertentu.
- e. Peta topografi adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan reliefnya yang diproyeksikan pada sebuah bidang datar dengan perbandingan tertentu.
- f. Tali temali. Tali temali dapat diaplikasikan sebagai tandu, gapura tenda, alas tidur, jembatan penyebrangan darurat, menara pandang dan isyarat.

- g. Morse adalah suatu isyarat dalam bentuk kode-kode gabungan titik dan strip yang mewakili semua huruf, angka, tanda baca, yang diciptakan pada tahun 1837 oleh Samuel Vince Morce.
- h. Semaphore. Alat yang digunakan untuk isyarat ialah dua buah bendera yang ukuran masing-masing 45 cm persegi.
- i. Baris berbaris. Kegiatan ini tergolong latihan gerak dasar yang dapat menumbuhkan makna disiplin, persatuan dan rasa keindahan.
- j. Pencegahan Pertolongan Pertama Kecelakaan adalah memberi bantuan sementara pada korban kecelakaan sebelum mendapatkan pemeriksaan intensif dari dokter ahli, biasa disebut P3K.
- k. Perkemahan adalah aktivitas yang menyenangkan bagi setiap insan yang hobi berkemah di alam bebas dengan tujuan pendidikan.

Kegiatan kepramukaan mengandung berbagai macam karakter positif di dalamnya. Menurut Patimah (2011:10) secara umum nilai-nilai karakter yang tercantum dalam pembinaan kegiatan pramuka adalah percaya diri, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, pemberani,

bekerja keras, tekun, ulet/gigih, disiplin, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, pengabdian, tertib, konstruktif. Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari Tri Satya, Dasa Dharma, kecakapan dan keterampilan yang dikuasai anggota pramuka. Nilai-nilai kepramukaan yang tersirat itu adalah untuk membentuk karakter bagi anggotanya.

Menurut Hidayatullah (2010:14), karakter adalah "kualitas atau kekuatan mental, moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain". Menurut Samani dan Hariyanto (2011:43), karakter dapat diartikan sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang. Karakter juga terbentuk karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan serta yang membedakannya dengan orang lain, sehingga terwujud dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Macam-macam karakter menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana dikutip oleh Syarif (2012:xi-xiii), yaitu:

- a. Religius, yaitu sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut dan hidup rukun antar sesama pemeluk agama lain.

- b. Jujur, yaitu perilaku didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya.
- c. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat orang lain yang berbeda dengan diri sendiri.
- d. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada peraturan.
- e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh.
- f. Kreatif, yaitu berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara baru.
- g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
- h. Demokratis, yaitu cara berfikir, bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban diri serta orang lain.
- i. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam serta meluas dari suatu ilmu.
- j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri serta kelompok.
- k. Cinta tanah air, yaitu cara berfikir, bersikap dan perbuatan yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta bangsa.
- l. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat serta menghormati keberhasilan orang lain.
- m. Bersahabat atau Komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.
- n. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain senang serta aman atas kehadirannya.
- o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi diri.
- p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar.
- q. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan untuk selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- r. Tanggung jawab, yaitu sikap dan tindakan dalam melakukan

sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penilaian karakter dalam diri seseorang berpengaruh pada moral setiap individu, terutama disaat bekerja sama. Setiap kehidupan moral yang dijalani mempunyai tipe-tipe variasi komponen kerja sama yang kompleks. Menurut Sudrajat (2010), komponen karakter yang terkait dengan moral antara lain:

- a. *Moral knowing*. Dimensi-dimensi yang termasuk dalam *moral knowing* yang akan mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*).
- b. *Moral feeling*. *Moral feeling* merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (*conscience*), percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*humility*).

- c. *Moral action*. *Moral action* merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (*act morally*) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*).

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk. Menurut Samani dan Hariyanto (2011:45-46) pendidikan karakter juga bertujuan memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, sehingga menjadi individu berperilaku sebagai insan kamil. Menurut Kesuma, dkk (2011:9) tujuan pendidikan karakter sebagai berikut:

- 1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.

- 2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
- 3) Membangun koreksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama-sama.

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan (2011), tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah "Terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi".

Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi. Kewajiban perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3) PP No. 19 tahun 2005 yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders, dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- c. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 96 ayat (7) PP No. 17 tahun 2010 yang mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain

yang diberi kewenangan oleh Menteri.

Gerakan Pramuka dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu lulusan. Mata Kuliah Kepramukaan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan mutu lulusan, khususnya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pertanyaannya: (1) bagaimanakah pelaksanaan perkuliahan Kepramukaan pada Prodi PPKn FKIP UMS di dalam dan di luar kelas?; (2) bagaimanakah tanggapan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan Kepramukaan?; (3) bagaimanakah tanggapan alumni dan *stakeholder* mengenai adanya mata kuliah Kepramukaan?; dan (4) bagaimanakah draft model penguatan karakter melalui perkuliahan kepramukaan pada mahasiswa PPKn sebagai upaya peningkatan mutu lulusan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *research and development* (R&D) yang dilakukan secara bertahap dalam waktu dua tahun. Tahap pertama dilakukan pada tahun ke-1 (2014) dan tahap kedua dilakukan pada tahun ke-2 (2015). Penelitian tahap

pertama merupakan landasan bagi pengembangan tahap selanjutnya (kedua). Rangkaian metode selama dua tahun ini merupakan satu kesatuan integral dalam memecahkan masalah pokok yang diteliti. Subjek mencakup semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah dosen pengampu mata kuliah Kepramukaan, Dosen Prodi PPKn, alumni, dan mahasiswa yang menempuh mata kuliah Kepramukaan serta *stakeholder*. Objek penelitian ini adalah model penguatan karakter melalui perkuliahan Kepramukaan pada mahasiswa PPKn sebagai upaya peningkatan mutu lulusan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama seperti hasil dari wawancara atau pengisian kuesioner dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan pihak tertentu seperti tabel atau diagram. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi lapangan, kajian pustaka dan pencatatan arsip. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

atau keaslian suatu instrumen. Kegiatan penyelidikan kebenaran suatu informasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan kegiatan triangulasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkuliahan Kepramukaan pada Prodi PPKn FKIP UMS di Dalam dan di Luar Kelas

Pelaksanaan perkuliahan Kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS terbagi dalam tiga semester (I, II, dan IV). Di semester satu mahasiswa akan menempuh Mata Kuliah Kepramukaan-1, di semester dua mahasiswa menempuh Mata Kuliah Kepramukaan-2, sedangkan di semester IV mahasiswa akan mengikuti kemah Kepramukaan di lokasi yang telah ditentukan. Mata kuliah Kepramukaan di semester I dan II yang harus ditempuh mahasiswa, perlu diambil dalam Kartu Rencana Studi (KRS). Sementara untuk kemah Kepramukaan di semester IV meski tidak tercantum dalam KRS, namun mahasiswa harus tetap mengikuti kegiatan tersebut sebagai salah satu syarat wisuda.

Mata kuliah Kepramukaan-1 memberikan dasar wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan

esensi, eksistensi dan urgensi kepramukaan. Mata kuliah ini memberikan wawasan pengetahuan awal bagi mahasiswa dalam upaya membangun karakter anak bangsa melalui kepramukaan. Materi-materi yang disusun bertujuan sebagai penguatan nilai-nilai karakter yang ada dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan komitmen nasional bagi bangsa Indonesia. Substansi materi di mata kuliah Kepramukaan-1 sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon guru PPKn, yang kelak juga memiliki bekal menjadi Pembina pramuka sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.

Proses pembelajaran mata kuliah Kepramukaan-1 menggunakan berbagai metode seperti ceramah bervariasi, permainan, demonstrasi, bermain peran, dramatisasi, simulasi dan aktualisasi, curah gagasan, penugasan, diskusi dan presentasi dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu pendekatan *saintific* dengan dipadukan strategi pembelajaran *exploring, project, discovery* dan *problem solving*. Untuk mewujudkan tujuan mata kuliah Kepramukaan-1 secara optimal, maka setting perkuliahan diatur sebagai berikut:

Tabel 1. Setting Perkuliahan Kepramukaan-1

No	Bentuk	Jumlah Pertemuan	Tempat Perkuliahan
1	Teori	12	R.C.23
2	Praktek	4	Lapangan Kampus 2
	Jumlah	16	

Sumber: Silabus Mata Kuliah Kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS

Materi yang diberikan pada kuliah Kepramukaan-1 meliputi: a) Kepramukaan sebagai eskul wajib di Sekolah; b) UU nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; c) AD-ART Gerakan Pramuka; d) Konsep Dasar Gerakan Pramuka, Pramuka dan Kepramukaan; e) Pendidikan Karakter melalui Gerakan Pramuka; f) Struktur Organisasi dan Lambang Gerakan Pramuka; g) Kurikulum dan Sisdiklat dalam Gerakan Pramuka; h) Karakteristik Pramuka Siaga Penggalang, penegak, dan pandega serta Cara membinanya; i) Kurikulum Pramuka siaga pramuka penggalang, pramuka penegak dan pramuka pandega; j) Pakaian Seragam tanda Tanda Pengenal Pramuka Siaga, Penggalang, penegak, dan pandega; k) Organisasi Gugus Depan, Organisasi Perindukan Siaga – Penggalang, penegak, dan pandega serta Administrasi Perindukan Siaga Penggalang, penegak, dan pandega; l) Praktek Musyawarah Dewan Penggalang; m) Praktek Musyawarah Dewan Ambalan; n) Penghayatan Kepenggalangan dan

Kepegakan; dan o) Permainan sebagai alat pendidikan.

Matakuliah Kepramukaan-2 yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Kepramukaan-1, memberikan bekal keterampilan calon pembina pramuka di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Setting perkuliahan Kepramukaan-2 di atur 80% praktek di lapangan, sedangkan 20% penghayatan. Mahasiswa diberdayakan untuk banyak melakukan praktek melalui teman sebaya dalam setiap kali mengikuti perkuliahan, sehingga posisi dosen hanya sebagai fasilitator. Mata kuliah Kepramukaan-2 juga menjadi salah satu sarana dalam membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kualitas yang baik sebagai calon guru PPKn.

Materi yang diberikan pada kuliah Kepramukaan-2 meliputi: a) Penghayatan Perindukan Siaga (Karakteristik dan Cara Membinanya) dan Praktek membuat Administrasi Perindukan Siaga; b) Kurikulum Pramuka Siaga dan Cara Mengujinya (SKU, SKK dan SPG) dan Praktek membuat Program

Kerja Latihan; c) Praktek Berbagai Upacara Dalam Perindukan Siaga; d) Praktek PBB dan Formasi Barisan Dan Keterampilan Kepramukaan Siaga; e) Penghayatan Pasukan Penggalang (Karakteristik dan Cara Membinanya) Dan Praktek membuat Administrasi Penggalang; f) Kurikulum Pramuka Penggalang dan Cara Mengujinya (SKU, SKK dan SPG) dan Praktek Membuat Program Jerja latihan; g) Praktek PBB Isyarat dan PBB Tongkat; h) Praktek Berbagai Upacara Dalam Pasukan Penggalang; i) Praktek Keterampilan Kepramukaan Penggalang; j) Penghayatan Ambalan Penegak (Karakteristik dan Cara Membinanya) dan Praktek membuat Administrasi Ambalan Penegak; k) Kurikulum Pramuka Penegak dan Cara Mengujinya (SKU, SKK dan SPG) dan Praktek membuat program kerja ambalan penegak; l) Praktek Berbagai Upacara Dalam Ambalan Penegak; m) Praktek Keterampilan Kepramukaan Penegak; n) Praktek Membina teman sebaya (Peer Teaching); dan o) Praktek Membina teman sebaya.

Mahasiswa di semester IV akan melaksanakan kegiatan kemah Kepramukaan. Kegiatan kemah ini dilakukan di lokasi alam terbuka, yakni Skipan Kalisoro Tawangmangu. Mahasiswa dalam kegiatan ini akan mempraktikkan ilmu yang telah didapat dalam

kuliah Kepramukaan-1 dan 2. Kegiatan ini juga melibatkan beberapa instruktur dari Kwarda atau pun Kwarnas. Dilibatkannya instruktur dari Kwarnas dan Kwarda bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman dan ilmu baru yang selama ini tidak didapat di kampus. Kegiatan yang dilakukan dalam kemah Kepramukaan antara lain: a) Simulasi pesta siaga; b) Simulasi pesta penggalang; c) Cara membina pramuka penegak dan penggalang; d) Cara menyelesaikan SKU, SKK penegak dan penggalang; e) Cara melatih pramuka penegak dan penggalang; f) Membuat kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan; dan g) Membuat permainan bagi penegak maupun penggalang.

Bagi mahasiswa prodi PPKn yang telah lulus mata kuliah kepramukaan I & II serta mengikuti pelatihan kepramukaan di Kalisoro Tawangmangu, akan mendapatkan sertifikat. Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti rangkaian kegiatan mata kuliah Kepramukaan di prodi PPKn dapat dilihat dari indikator di bawah ini, meliputi:

- a. Sikap mental bagi penegak dan penggalang.
- b. Keterampilan menyelesaikan SKU penegak & penggalang.
- c. Keterampilan membimbing SKK penegak & penggalang.

- d. Mampu menciptakan permainan yang menarik dan menyenangkan.
- e. Proses pembinaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- f. Ada berita acara pembinaan dan pelantikan.

Tanggapan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan Kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS

Mahasiswa Prodi PPKn FKIP UMS harus menempuh mata kuliah kepramukaan-1 dan 2 yang berada di semester I dan II, serta kemah Kepramukaan. Beragam komentar diungkapkan oleh mahasiswa yang telah menempuh atau yang sedang menempuh mata kuliah kepramukaan I dan II. Menurut keterangan dari TF (wawancara tanggal 25 Agustus 2015) yang merupakan salah satu mahasiswa PPKn FKIP UMS, mengikuti kuliah kepramukaan memiliki banyak manfaat. Diantaranya bisa membentuk karakter positif dalam diri. Menurut ATW (wawancara tanggal 25 Agustus 2015) mengikuti mata kuliah kepramukaan sangat bermanfaat, khususnya bagi calon guru PPKn.

ATW yang saat ini duduk di semester 7, telah melakukan kegiatan PPL di salah satu sekolah wilayah Kabupaten Boyolali. Mahasiswa PPL yang memiliki

background PPKn, rupanya tidak hanya diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran PPKn/PKn. Mahasiswa PPL dari Prodi PPKn juga diberi tugas tambahan untuk membantu kegiatan kepramukaan.

Beruntung mendapatkan materi kepramukaan-1 dan 2, karena di sekolah PPL mahasiswa dari PPKn juga diberi tugas tambahan menjadi pembina pramuka. Ketika kuliah diberi latihan nyanyi pramuka, tali temali, baris-berbaris, bendera semaphore, dan membuat tenda. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membina pramuka di sekolah PPL.

Berdasarkan keterangan dari TF dan ATW sedikit banyak mendapat gambaran bahwa mata kuliah Kepramukaan yang terdapat di Prodi PPKn FKIP UMS sangatlah bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam pembentukan karakter. Secara umum nilai-nilai yang tercantum dalam kegiatan pramuka adalah percaya diri, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, pemberani, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, disiplin, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, pengabdian, tertib, konstruktif. Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari Tri Satya, Dasa Dharma, kecakapan dan keterampilan yang dikuasai anggota pramuka. Nilai-nilai

kepramukaan yang tersirat itu adalah untuk membentuk karakter bagi mahasiswa.

Tanggapan alumni dan stakeholder mengenai adanya mata kuliah Kepramukaan yang diberikan untuk mahasiswa Prodi PPKn FKIP UMS

Alumni Prodi PPKn FKIP UMS juga dimintai tanggapannya terkait realitas munculnya mata kuliah kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS. Beragam komentar diungkapkan oleh alumni yang telah menempuh mata kuliah kepramukaan-1, 2 atau pun kemah Kepramukaan. Menurut keterangan dari AA yang merupakan angkatan tahun 2007, pengalamannya selama mendapatkan materi kepramukaan sangat bermanfaat bagi aktivitasnya sebagai guru saat ini.

AA merupakan salah satu guru SD Negeri di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2014, AA mengungkapkan jika kepramukaan menjadi salah satu kompetensi tambahan sebagai seorang guru. Terlebih dalam kurikulum 2013, kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Menurut AA nilai-nilai karakter yang termuat dalam kegiatan pramuka sangat bermanfaat bagi peserta didik. Siswa dilatih untuk disiplin,

kerja keras, cinta tanah air, percaya diri, bahkan religius.

Stakeholder juga berpendapat bahwa kegiatan kepramukaan memiliki manfaat dalam menumbuhkan karakter. Realitas adanya mata kuliah kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS, membuat alumni memiliki karakter yang berbeda dengan lulusan lain. Alumni lulusan Prodi PPKn selain memiliki kemampuan menjadi guru bidang studi PPKn/ PKn, juga memiliki keahlian lain sebagai pembina Pramuka di sekolah. Dengan memanfaatkan posisi sebagai guru bidang studi PPKn dan pembina pramuka, maka tujuan untuk membentuk karakter peserta didik akan semakin optimal.

Draft model penguatan karakter melalui perkuliahan kepramukaan pada mahasiswa PPKn sebagai upaya peningkatan mutu lulusan

Pelaksanaan perkuliahan Kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS terbagi dalam tiga semester (I, II, dan IV). Di semester satu mahasiswa akan menempuh Mata Kuliah Kepramukaan-1, di semester dua mahasiswa menempuh Mata Kuliah Kepramukaan-2, sedangkan di semester IV mahasiswa akan mengikuti kemah Kepramukaan di lokasi yang telah ditentukan. Mata kuliah Kepramukaan di semester I

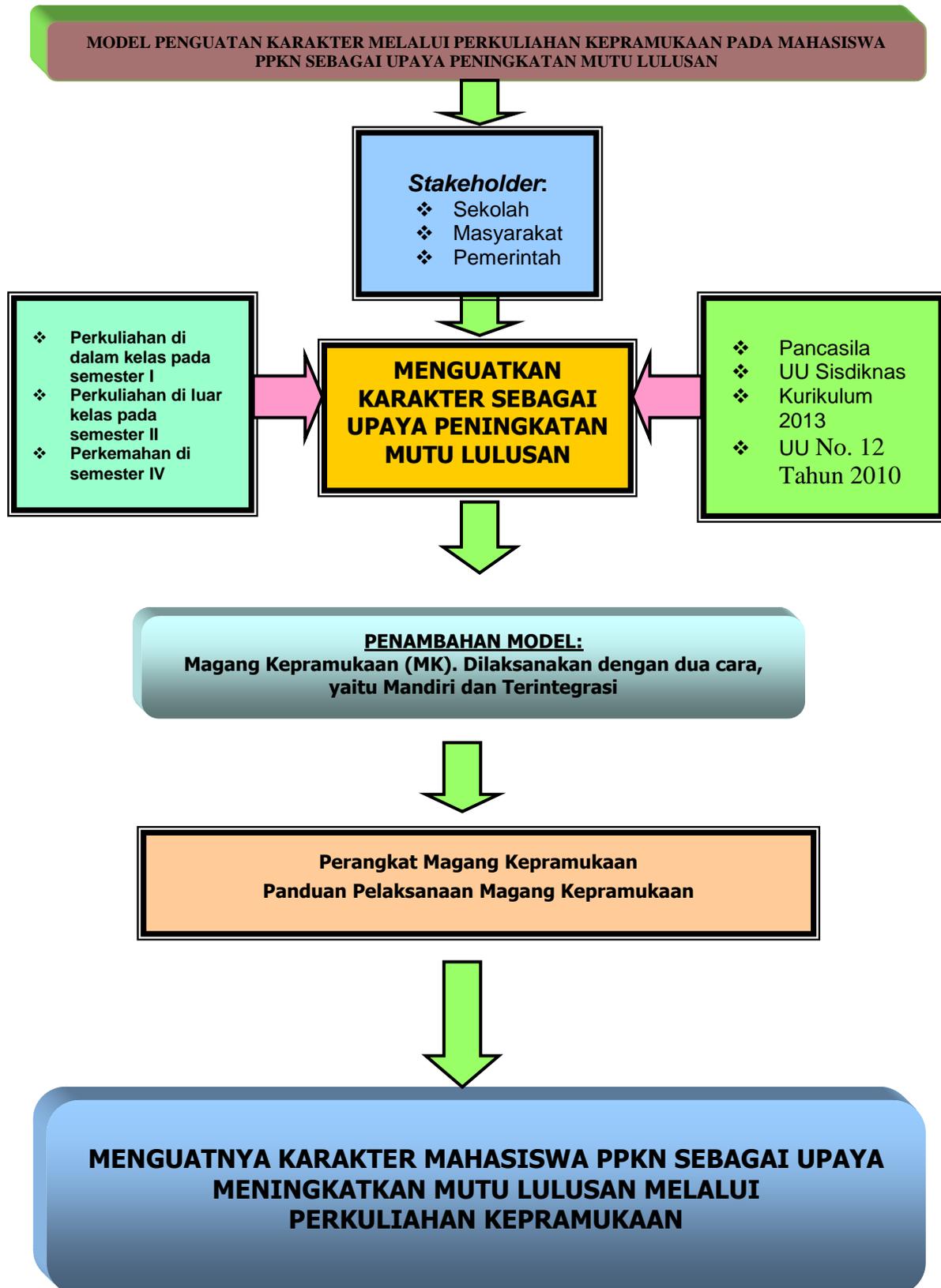
dan II yang harus ditempuh mahasiswa, perlu diambil dalam Kartu Rencana Studi (KRS). Sementara untuk kemah Kepramukaan di semester IV meski tidak tercantum dalam KRS, namun wajib sebagai salah satu syarat wisuda.

Prodi PPKn berusaha untuk terus berupaya meningkatkan mutu lulusan agar memiliki karakter yang kuat sebagai guru PPKn. Pengembangan model perkuliahan juga dilakukan dalam mewujudkan alumni yang berkarakter, salah satunya melalui perkuliahan Kepramukaan. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan tim peneliti, perlu dilakukan penambahan sebuah model yang dinamakan Magang Kepramukaan bagi mahasiswa.

Magang Kepramukaan atau yang disingkat MK, merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dengan dua cara. *Pertama* Magang

Kepramukaan dilakukan dengan mandiri, yang bisa dilaksanakan pada semester V atau VI. Magang Kepramukaan mandiri dilakukan secara mandiri, artinya Pimpinan Program Studi memerintahkan mahasiswa untuk terjun sebagai pengajar pramuka di sekolah. Segala administratif dan perangkat pelatihan yang dibutuhkan, dipersiapkan secara mandiri oleh Prodi dan mahasiswa. *Kedua* Magang Kepramukaan dilakukan secara terintegrasi, yang dilakukan pada semester VII. Magang Kepramukaan terintegrasi dilakukan saat mahasiswa melakukan kegiatan PPL di sekolah. Dengan pengembangan model Magang Kepramukaan, diharapkan dapat menguatkan karakter mahasiswa sehingga meningkatkan kualitas lulusan Prodi PPKn FKIP UMS.

Gambar 1. Pengembangan Model



SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan perkuliahan Kepramukaan di Prodi PPKn FKIP UMS terbagi dalam tiga semester (I, II, dan IV). Di semester satu mahasiswa akan menempuh Mata Kuliah Kepramukaan-1, di semester dua mahasiswa menempuh Mata Kuliah Kepramukaan-2, sedangkan di semester IV mahasiswa akan mengikuti kemah Kepramukaan. Mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah kepramukaan sangatlah bermanfaat, terutama dalam pembentukan karakter. Secara umum nilai-nilai yang tercantum dalam kegiatan pramuka adalah percaya diri, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, pemberani, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, disiplin, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, pengabdian, tertib, konstruktif. Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari Tri Satya, Dasa Dharma, kecakapan dan keterampilan yang dikuasai anggota pramuka.

Alumni dan *stakeholder* menanggapi positif dengan adanya mata kuliah Kepramukaan. Realitas adanya mata kuliah kepramukaan, membuat alumni memiliki karakter yang berbeda dengan lulusan lain. Alumni lulusan Prodi PPKn selain memiliki kemampuan menjadi guru

bidang studi PPKn/ PKn, juga memiliki keahlian lain sebagai pembina Pramuka di sekolah. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan tim peneliti, perlu dilakukan penambahan sebuah model yang dinamakan Magang Kepramukaan bagi mahasiswa Prodi PPKn FKIP UMS. Dengan pengembangan model Magang Kepramukaan, diharapkan dapat menguatkan karakter mahasiswa sehingga meningkatkan kualitas lulusan Prodi PPKn FKIP UMS.

Saran yang dapat diberikan dari hasil pengumpulan data, antara lain diharapkan Pimpinan Program Studi PPKn UMS lebih berupaya untuk mendukung segala aktivitas kepramukaan terutama di luar kelas. Hal tersebut diantara dengan memberikan dana tambahan terkait pembelian alat-alat atau media yang dibutuhkan. Dosen pengampu mata kuliah kepramukaan terus melakukan inovasi dalam memberikan materi perkuliahan. Inovasi dilakukan agar kuliah kepramukaan bisa lebih menarik minat dan motivasi mahasiswa. Mahasiswa harus lebih aktif dalam mengikuti kuliah kepramukaan. Mahasiswa harus menyadari bahwa kepramukaan menjadi salah satu kompetensi tambahan sebagai guru PPKn. Alumni dan *stakeholder* agar

menjalin kerjasama dengan Prodi PPKn FKIP UMS dalam menciptakan kegiatan kepramukaan guna membentuk karakter peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. 2011. *Garis Besar Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*
- Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter Implementasi dan Konsep*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Model Penilaian kompetensi peserta didik sekolah menengah pertama*. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 198 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka.
- Kesuma dkk, Dharma. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. 2011. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maksudin. 2013. *Pendidikan Karakter Non-Dikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mertoprawiro, Soedarsono. 1992. *Pembinaan Gerakan Pramuka dalam Membangun Watak dan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remadja Rosdakarya.
- Patimah. 2011. *Pendidikan Karakter Melalui Program Ekstrakurikuler*. Diakses http://skp.unair.ac.id/repository/Guru_Indonesia/PENDIDIKANKARAKTER_PATIMAH_16759.pdf.html
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2011. *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Ulil Amri. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
- Widodo, Agus. 2007. *Ramuan Lengkap Bagi Penggalang, Pramuka Penegak dan Pembina Pramuka*. Yogyakarta: Kwartir Daerah XII DIY

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *QUANTUM TEACHING* TIPE
BELAJAR KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN HASIL PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS I SDN KRATON 3
KABUPATEN BANGKALAN**

Susanti

SDN Kraton 3 Bangkalan, Madura

Alamat E-mail: prayitno.suramadu3gmail.com

Abstract. *Indicator that can be used as a measure of success of a learning process are: 1) the existence of active student participation in the learning process, 2) the achievement of students learning competencies that have been determined Mulyasa (2005: 121) that the learning success is the success of students in the form of competence and goals, as well as the success of teachers in guiding students in learning. Teachers should be able to create a variety of learning process that allows students to feel happy and feel inclined to engage actively. Application of quantum learning model Teaching types of learning groups in order to determine the increase in student learning outcomes Civics Elementary School first grade Kraton 3 Bangkalan. Data analysis method used in this research is the analysis of statistical data. (Sutrisno Hadi, 1975: 272). Statistic formula used is the formula t-test. Application of Quantum learning models of teaching this type of study groups have different learning outcomes when compared with the conventional learning techniques, the improvement of learning outcomes Civics. Quantum Teaching learning model types study group proved to have better results when compared to other conventional learning.*

Key words: *quantum of teaching, learning groups, learning outcomes*

PENDAHULUAN

Ada dua indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dua indikator tersebut adalah: 1) Adanya partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 2) Pencapaian siswa terhadap kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. Sebagaimana diungkapkan Mulyasa (2005:121) bahwa keberhasilan pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik dalam membentuk kompetensi dan mencapai tujuan,

serta keberhasilan guru dalam membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Guru memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, tugas guru bukan lagi sebagai pentransfer materi pembelajaran, guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Saat ini guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang bertugas memberikan kemudahan belajar

bagi peserta didik. Guru harus dapat menciptakan proses pembelajaran yang bervariasi yang memungkinkan siswa merasa senang dan merasa tertarik untuk terlibat secara aktif.

Keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan merupakan modal dasar bagi siswa agar dapat mencapai kompetensi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan ini, bukan hal yang mudah bagi guru untuk mewujudkannya. Banyak di antara para guru mengalami kesulitan dan mengalami berbagai kendala, sebagaimana yang juga dialami oleh penulis ketika melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas.

Selama ini peneliti menggunakan metode konvensional atau metode lama misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Dengan adanya banyak model pembelajaran yang muncul dan adanya kegiatan KKG yang cukup eksis sehingga mendorong penulis untuk melaksanakan model pembelajaran-model pembelajaran yang baru ini. Seperti kita ketahui, di dalam dua tiga dasa warsa terakhir ini perkembangan teknologi itu berjalan dengan amat cepat. Teknologi yang di hari kemarin masih dianggap modern (*sunrise technology*) bukan tak mungkin

hari ini sudah mulai basi (*sunset technology*).

Teknologi baru terutama multimedia mempunyai peranan semakin penting dalam pembelajaran. Banyak orang percaya bahwa multimedia akan dapat membawa kita kepada situasi belajar dimana *learning with effort* akan dapat digantikan dengan *learning with fun*. Apalagi dalam pembelajaran orang dewasa, *learning with effort* menjadi hal yang cukup menyulitkan untuk dilaksanakan karena berbagai faktor pembatas, seperti kemauan berusaha, mudah bosan dan lain-lain. Jadi proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan menjadi pilihan para guru/*fasilitator*. Jika situasi belajar seperti ini tidak tercipta, paling tidak multimedia dapat membuat belajar lebih efektif menurut pendapat beberapa pengajar. Pada saat ini kita semua memahami bahwa proses belajar dipandang sebagai proses yang aktif dan partisipatif, konstruktif, kumulatif, dan berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) maupun Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) untuk mencapai kompetensi tertentu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah

penelitian sebagai berikut : "Adakah peningkatan hasil belajar melalui penerapan model pembelajaran *quantum teaching* tipe belajar kelompok mata pelajaran belajar PKn siswa kelas I SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan?"

Quantum Teaching Menurut Bobby De Porter yaitu: "*Quantum Teaching* adalah konsep yang menguraikan cara-cara baru dalam memudahkan proses belajar mengajar, lewat pemaduan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah, apapun mata pelajaran yang diajarkan." *Quantum Teaching* menjadikan segala sesuatu berarti dalam proses belajar mengajar, setiap kata, pikiran, tindakan asosiasi dan sampai sejauhmana mengubah lingkungan, presentasi dan rancangan pengajaran. Sebagaimana ungkapan di atas, Colin Rose juga berpendapat bahwa *Quantum Teaching* adalah panduan praktis dalam mengajar yang berusaha mengakomodir setiap bakat siswa atau dapat menjangkau setiap siswa. Metode ini sarat dengan penemuan-penemuan terkini yang menimbulkan antusiasme siswa. *Quantum Teaching* menjadikan ruang-ruang kelas ibarat sebuah konser musik yang memadukan berbagai instrumen sehingga tercipta komposisi yang menggerakkan dari keberagaman

tersebut. Sebagai guru yang akan mempengaruhi kehidupan murid, anda seolah-olah memimpin konser saat berada di ruang kelas.

Metode kuantum diperkenalkan oleh wanita berkebangsaan Amerika "Bobbi DePorter". DePorter mendedikasikan *Quantum Teaching* untuk para guru agar dapat merancang sistem pengajaran yang menggairahkan, sehingga dapat mencetak siswa-siswa yang tidak hanya memiliki ketrampilan akademis saja tetapi juga memiliki ketrampilan hidup (*life skill*). *Quantum Teaching* adalah orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi siswa sendiri dan bagi orang lain (DePorter, 2007 : 5).

Adapun asas *Quantum Teaching* adalah *bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka*. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya memasuki dunia murid sebagai langkah pertama. Memasuki terlebih dahulu dunia mereka berarti akan memberi izin untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan perjalanan mereka menuju

kesadaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dengan mengaitkan apa yang diajarkan oleh guru dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan yang didapatkan dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi atau akademis mereka. Setelah kaitan itu terbentuk, dengan mudah dunia siswa dibawa ke dunia guru atau pengajar. Guru akan memberikan pemahaman tentang isi dunia itu.

Tujuan *Quantum Teaching* adalah untuk meraih ilmu pengetahuan yang luas dengan berdasarkan prinsip belajar yang menyenangkan dan menggairahkan. Terdapat perbedaan antara tujuan dan prioritas. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin diraih. Sedangkan prioritas merupakan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam mencapai tujuan. Menciptakan suasana yang dinamis dalam belajar, dengan memadukan berbagai unsur-unsurnya serta melakukan penggabungan, merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai ilmu pengetahuan yang luas sebagai tujuan.

Prinsip *Quantum Teaching* antar lain: 1) Segalanya berbicara; 2) Segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh, dari kertas yang dibagikan hingga rancangan pelajaran, semuanya mengirim pesan tentang belajar; 3) Segalanya bertujuan. Semua

yang terjadi dalam penggabungan kita, mempunyai tujuan. Oleh karena itu, Kathy Wagone membuat istilah yang memotivasi: "tetapkanlah sasaran tersebut agar bisa berprestasi setiap harinya"; 4) Pengalaman Sebelum Pemberian Nama. Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks, yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses yang paling baik terjadi ketika siswa telah mendapatkan informasi sebelum memperoleh kesimpulan dari apa yang mereka pelajari; 5) Akui Setiap Usaha. Belajar mengandung resiko. Belajar berarti keluar dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah ini, mereka patut mendapat pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Seperti kata Noelle c. Nelson bahwa pujian atau penghargaan kepada seseorang atas karyanya memunculkan suatu energi yang membangkitkan emosi positif; dan 6) Jika Layak Dipelajari, Layak Pula Dirayakan. Perayaan adalah sarapan para pelajar juara. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan minat dalam belajar. Sehubungan dengan itu, Dryden berpesan bahwa ingatlah selalu untuk merayakan setiap keberhasilan.

Menerapkan *Quantum Teaching* dalam proses pembelajaran

menggunakan kerangka pembelajaran yang dikenal dengan TANDUR yang merupakan akronim dari kata Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, Rayakan. DePorter (2007: 89-93) menjelaskan masing-masing akronim dan strategi pembelajaran TANDUR sebagai berikut :

1. Tumbuhkan; Tahap awal dalam pembelajaran kuantum adalah "tumbuhkan" dalam artian guru harus dapat menyertakan dan memikat siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Tahap ini akan menciptakan jalinan dan kepemilikan bersama atau kemampuan saling memahami. Penyertaan akan memanfaatkan pengalaman mereka, mencari tanggapan "Yes!" dan mendapatkan komitmen untuk menjelajah pembelajaran. Untuk menciptakan tahap ini dapat disertakan pertanyaan, pantomim, lakon pendek dan lucu, drama, video dan cerita. Amin Mustofa, dalam artikelnya (Jawa Pos, 20 Februari 2008) menyampaikan maksud dari tumbuhkan adalah guru harus menumbuhkan minat dan membangkitkan motivasi para siswa untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menyadarkan para siswa bahwa

materi yang akan dipelajari merupakan materi yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan mereka dan mengarahkan siswa untuk mengenal tokoh-tokoh sukses yang banyak dikenal orang.

2. Alami; Unsur ini memberi pengalaman kepada siswa dan memanfaatkan hasrat alami otak untuk menjelajah . Dengan memberikan pengalaman, guru dapat dengan mudah memanfaatkan pengetahuan dan keingintahuan mereka. Tahap ini menuntut guru untuk dapat menemukan cara yang terbaik agar siswa memahami informasi, menemukan kegiatan yang memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dan menemukan kegiatan yang memfasilitasi kebutuhan siswa untuk mengetahui. Strategi yang dapat digunakan pada tahap ini antara lain menggunakan jembatan keledai, permainan dan simulasi. Guru dapat memberikan unsur-unsur pelajaran baru dalam kelompok sandiwara. Guru dapat memberikan tugas kelompok dan kegiatan yang mengaktifkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Saat siswa mempelajari sesuatu dalam kehidupan nyata, siswa sudah memiliki kemampuan awal, suatu kaitan dengan konsepnya. Kemudian pada saat

pengalaman terbentang, siswa akan mengumpulkan informasi yang membantu mereka memaknai pengalaman tersebut. Informasi ini membuat yang abstrak menjadi konkret.

3. Namai; Penamaan memuaskan hasrat alami otak untuk memberikan identitas, mengurutkan, dan mendefinisikan. Penamaan dibangun di atas pengetahuan dan keingintahuan siswa saat itu. Penamaan adalah saatnya mengajarkan konsep, ketrampilan berpikir, dan strategi belajar. Strategi yang dapat digunakan pada tahap ini antara lain adalah menggunakan susunan gambar, warna, alat bantu, kertas tulis, dan poster di dinding. Pada tahap ini guru bisa memuaskan otak siswa, membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai pengalaman mereka. Penamaan merupakan informasi, fakta, rumus, pemikiran, tempat dan sebagainya.
4. Demonstrasikan; Tahap ini memberikan peluang siswa untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran yang lain, dan ke dalam kehidupan mereka. Siswa membutuhkan kesempatan untuk membuat kaitan, berlatih dan menunjukkan apa yang siswa ketahui. Tahap demonstrasikan

ini menuntut guru untuk menemukan cara agar siswa dapat memperagakan tingkat kecakapan mereka dengan pengetahuan yang baru diperoleh dan membuat kriteria yang dapat dikembangkan bersama untuk menuntun kualitas peragaan siswa. Strategi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tahap ini antara lain dengan sandiwara, video, permainan, rap, lagu, penjabaran dalam grafik, dan lain-lain.

5. Ulangi; Pengulangan memperkuat koneksi syaraf dan menumbuhkan rasa "Aku tahu bahwa aku tahu ini!". Pengulangan harus dilakukan secara multi modalitas (visual, auditorial, kinestetik). Pelaksanaan tahap ulangi menuntut guru untuk menemukan cara yang terbaik bagi siswa untuk mengulang pelajaran dan cara yang terbaik agar setiap siswa mendapat kesempatan untuk mengulang. Strategi yang dapat dipakai untuk melaksanakan tahap ini antara lain dengan cara: a) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengajarkan pengetahuan barunya kepada orang lain (kelas lain atau kelompok umur yang berbeda); b) Menggemakan (guru menyebutkan sesuatu dan siswa mengulang secara

- serentak); c) Pengulangan trio (dalam kelompok terdiri dari tiga orang, mereka berjalan mengelilingi ruangan sambil mengulang apa yang telah mereka pelajari bersama); dan d) Tepuk Yess! (ulurkan satu tangan, letakkan pelajaran pada tangan tersebut, lalu tepuk sambil berkata, Yess!" dengan keras).
6. Rayakan; Perayaan memberi rasa selesai dengan menghormati usaha, ketekunan dan kesuksesan (jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan). Guru harus dapat menemukan cara yang paling sesuai untuk merayakan dan cara mengakui setiap orang atas prestasinya. Strategi yang dapat digunakan pada tahap ini adalah dengan pujian, bernyanyi bersama, pameran pada pengunjung dan pesta kelas.

Belajar kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar-mengajar dimana siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. Sebagai metode mengajar, belajar kelompok dapat dipakai untuk mencapai bermacam macam tujuan pengajaran. Pelaksanaannya tergantung pada beberapa faktor

misalnya tujuan khusus yang akan dicapai, umur, kemampuan siswa, serta fasilitas pengajaran di dalam kelas. Dalam cara belajar ini terjadi interaksi antar anggota kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Semua anggota harus turut terlibat karena keberhasilan kelompok ditunjang oleh aktivitas anggotanya, sehingga anggota kelompok saling membantu. Model belajar kelompok/kooperatif yang sering diperbincangkan yaitu belajar kooperatif model jigsaw yakni tiap anggota kelompok mempelajari materi yang berbeda untuk disampaikan atau diajarkan pada teman sekelompoknya.

Metode belajar kelompok atau bebelajar dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan(kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (subsub kelompok). Kelompok bisa dibuat berdasarkan: a) Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu sifatnya heterogin dalam belajar; b) Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang punya minat yang sama; c) Pengelompokan berdasarkan jenis pebelajaran yang akan kita berikan; d) Pengelompokan atas dasar wilayah tempat tinggal siswa yang tinggal dalam satu wilayah yang

dikelompokkan dalam satu kelompok sehingga memudahkan koordinasi belajar; e) Pengelompokan secara random atau dilotre, tidak melihat faktor-faktor lain; dan f) Pengelompokan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan kelompok wanita. Sebaiknya kelompok menggambarkan yang heterogin, baik dari segi kemampuan belajar maupun jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan agar kelompok-kelompok tersebut tidak berat sebelah (ada kelompok yang baik dan ada kelompok yang kurang baik).

Jika dilihat dari segi proses belajarnya maka belajar kelompok ada dua macam, yaitu kelompok jangka pendek dan kelompok jangka panjang: a) Kelompok jangka pendek, artinya jangka waktu untuk belajarnya dalam kelompok tersebut hanya pada saat itu saja, jadi sifatnya insidental; b) Kelompok jangka panjang, artinya proses belajar dalam kelompok itu bukan hanya pada saat itu saja, mungkin berlaku untuk satu periode tertentu sesuai dengan tugas/masalah yang akan dipecahkan.

Untuk mencapai hasil yang baik, maka faktor yang harus diperhatikan dalam belajar kelompok adalah: a) Perlu adanya motif (dorongan) yang kuat untuk belajarnya pada setiap anggota; b)

Pemecahan masalah dapat dipandang sebagai satu unit dipecahkan bersama, atau masalah dibagi-bagi untuk dibelajarkan masing-masing secara individual. Hal ini bergantung kepada kompleks tidaknya masalah yang akan dipecahkan; c) Persaingan yang sehat antarkelompok biasanya mendorong untuk belajar; d) Situasi yang menyenangkan antar anggota banyak menentukan berhasil tidaknya belajar kelompok. Penggunaan metode belajar kelompok : a) Pengelompokan untuk mengatasi kekurangan alat-alat pelajaran; b) Pengelompokan atas dasar perbedaan kemampuan belajar : Di suatu kelas, guru dihadapkan pada persoalan bagaimana melaksanakan tugas sebaik-baiknya terhadap kelas yang sifatnya heterogen, yakni berbeda-beda dalam kemampuan belajar. Pada waktu pelajaran matematika, Ia menemukan bahwa ada lima orang siswa tidak sanggup memecahkan soal seperti teman-teman lainnya. Guru menyadari bahwa ia tidak mungkin mengajar kelas dengan menyamaratakan seluruh siswa, karena ada perbedaan dalam kesanggupan belajar. Maka ia membagi para siswa dalam beberapa kelompok dengan anggota yang mempunyai kemampuan setaraf kemudian diberi tugas sesuai dengan kemampuan

mereka. Sekali-kali ia meninjau secara bergilir untuk melihat kelompok mana yang membutuhkan pertolongan atau perhatian sepenuhnya; c) Pengelompokan atas dasar perbedaan minat belajar, Pada suatu saat para siswa perlu mendapat kesempatan untuk memilih suatu pokok bahasan yang sesuai dengan minatnya. Untuk keperluan ini guru memberikan suatu pokok bahasan yang terdiri dari beberapa sub-pokok bahasan. Siswa yang berminat sama dapat berkumpul pada suatu kelompok untuk mempelajari sub-pokok bahasan yang dimaksud; d) Pengelompokan untuk memperbesar partisipasi tiap siswa.

Untuk setiap masalah diperlukan pendapat atau diskusi. Maka dipecahkan kesatuan kelas itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan tugas membahas permasalahan tersebut dalam waktu yang sangat terbatas. Selesai pembahasan kelompok, setiap kelompok rnengemukakan pendapat yang dianggap pendapat kelompok tersebut. Cara mengajar ini dimaksudkan untuk merangsang tiap siswa agar ikut serta dalam setiap masalah secara intensif. Tak ada seorangpun diantara mereka yang merasa mendapat tugas lebih berat dari pada yang lain. Pengelompokkan sementara dan pendek semacam ini disebut juga

rapat kilat; e) Pengelompokan untuk pembagian pembelajaran : Pengelompokkan ini didasarkan pada luasnya masalah, serta membutuhkan waktu untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat menunjang pemecahan persoalan. Untuk keperluan ini pokok persoalan harus diuraikan dahulu menjadi beberapa aspek yang akan dibagikan kepada tiap kelompok (tiap kelompok menyelesaikan satu aspek persoalan). Siswa harus mengumpulkan data, baik dari lingkungan sekitar maupun melalui bahan kepustakaan. Oleh karena itu proyek ini tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat seperti halnya rapat kilat, melainkan kemungkinan membutuhkan waktu beberapa minggu. Jadi pengelompokkan disini bertujuan membagi pebelajaran yang mempunyai cakupan agak luas. Belajar kelonipok ini membutuhkan waktu yang panjang; dan f) Pengelompokan untuk belajar bebelajar sama secara efisien menuju ke suatu tujuan. Langkah pertama adalah menjelaskan tujuan dari tugas yang harus dibelajarkan siswa, kemudian membagi siswa menurut jenis dan sifat tugas, mengawasi jalannya belajar kelompok, dan menyimpulkan kemajuan kelompok. Di sini jelas walaupun siswa bebelajar dalam

kelompok masing-masing dan melaksanakan bagiannya sendiri-sendiri, namun mereka harus memusatkan perhatian pada tujuan yang akan dicapai, dan menjaga agar jangan sampai keluar dan persoalan pokok. Lain halnya dengan pengelompokan untuk pembagian pembelajaran seperti tersebut di atas, tugas kelompok di sini tidak perlu diselesaikan dalam jangka waktu panjang, guru dapat memilih persoalan yang dapat didiskusikan di kelas.

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar adalah pemahaman dan pengalaman serta penerapan konsep, nilai, moral, norma Pancasila dan hak dan kewajiban warganegara untuk kepentingan kehidupan sehari-hari dan dasar pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di kelas I siswa dapat melakukan berbagai hal yang dituntut oleh keputusan nilai moral umum dan baku serta namun mengemukakan perilaku keteladan yang lebih baik di wilayah kecamatan

Tujuan dari penelitian menggambarkan peningkatan hasil belajar PKN pada siswa kelas I SDN Kraton 3 Bangkalan melalui penerapan model pembelajaran *quantum teaching* tipe belajar kelompok. Penelitian ini bermanfaat: **a)** Bagi Siswa: Dapat

meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran PPKn mengingat materinya yang banyak dan luas; b) Bagi Guru (Peneliti): Dapat menambah wawasan tentang strategi pembelajaran.; c) Sekolah: Dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; dan d) Bagi Pengembangan Kurikulum: Merupakan upaya penyempurnaan Kurikulum.

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian

Variabel dapat dibedakan menjadi dua yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: a) Variabel bebas (*independent variable*) dari penelitian ini adalah penerapan teknik pembelajaran *Quantum teaching* yang mempengaruhi peningkatan belajar siswa; b) Variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa dengan belajar yang dipengaruhi oleh *Quantum teaching*.

Belajar kelompok dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar-mengajar dimana siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu. Sebagai metode mengajar, belajar kelompok dapat dipakai untuk mencapai bermacam macam

tujuan pengajaran. Pelaksanaannya tergantung pada beberapa faktor misalnya tujuan khusus yang akan dicapai, umur, kemampuan siswa, serta fasilitas pengajaran di dalam kelas. Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah hasil belajar siswa kelas I, dari nilai dalam penerapan model pembelajaran *Quantum teaching* teknik belajar kelompok yang peneliti amati secara langsung dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas I SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan.

Variabel operasional adalah variabel di dalam judul skripsi. Variabel dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: a) Variabel bebas : penggunaan teknik pembelajaran *Quantum Teaching* dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas I SDN Kraton 3 Bangkalan. Dengan indikator nilai tes yang dilaksanakan setiap akhir pembelajaran sebanyak tiga kali, lalu hasilnya diambil rata-ratanya; dan b) Variabel terikat : Hasil belajar siswa dengan belajar kelompok pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas I SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan. Dengan indikator nilai tes yang dilaksanakan setiap akhir pembelajaran sebanyak tiga kali, lalu hasilnya diambil rata-ratanya.

Deskripsi Populasi (Lokasi Penelitian)

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi atau sering juga disebut *universe* adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir (*estimated*). Ciri-ciri populasi disebut parameter. Oleh karena itu, populasi juga sering diartikan sebagai kumpulan objek penelitian dari mana data akan dijaring atau dikumpulkan.

Menurut Sutrisno Hadi populasi adalah "seluruh penduduk yang dimaksud untuk di selidiki disebut populasi atau universum populasi terbatas oleh sebagian jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan study populasi karena yang dijadikan subyek penelitian adalah siswa kelas I SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan dan tanpa mengambil sampel.

Metode/Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara.** Wawancara merupakan cara observasi yang langsung. Bila peneliti ingin mengetahui sesuatu dari seseorang maka peneliti harus bertanya secara langsung padanya. Wawancara dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keeksukaan siswa, tanggapan siswa dengan menggunakan metode bermain peran, bila dibandingkan dengan metode pemberian tugas dan hal-hal lain yang bersifat insidental. Menurut Esterberg (2002: 37) : Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
- b. Observasi.** Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang kemudian disebut jenis observasi, yaitu: **1)** Observasi terbuka yaitu apabila sang pengamat atau observer melakukan pengamatannya dengan mengambil kertas, pencil, kemudian mencatat segala sesuatu yang terjadi di kelas; **b)** Observasi terfokus yaitu apabila peneliti ingin memfokuskan permasalahan kepada upaya-

upaya guru dalam membangkitkan semangat belajar siswa dengan memberikan respon kepada pertanyaan sang guru; **c)** Observasi terstruktur yaitu apabila para mitra peneliti sudah menyetujui kriteria yang diamati, maka selanjutnya peneliti tinggal menghitung (*mentally*) saja berapa kali jawaban, tindakan, atau sikap siswa yang sedang diteliti itu ditampilkan; dan **d)** Observasi sistematis yaitu apabila peneliti merancang bentuk pengamatan beserta kualifikasinya dengan kreatif, membentuk berbagai macam skala yang dapat dimanfaatkan dalam situasi-situasi tertentu, dan dilengkapi dengan ilustrasi detail dalam skala interaksi. Dalam penggunaan metode observasi ini peneliti bertindak sebagai pengamat penyerta atau (*participant observer*) di mana pengamat atau *observer* mempunyai hubungan yang akrab dengan pihak yang diamati. Peneliti sebagai pengamat penyerta atau *participant observer* ikut serta dalam berbagai kegiatan pihak yang diamati, dan segera mencatat apa yang terjadi dalam catatan lapangannya. Dalam catatan ini termasuk juga komentar-komentar yang menafsirkan apa

yang terjadi berdasarkan persepsi peneliti.(Goetz dan LeCompte, 1984:63).

- c. Test.** Tes dimaksudkan untuk mengetahui perubahan tingkah laku dan hasil belajar siswa setelah belajar secara kelompok. Kemudian hasil dibandingkan dengan pada saat sebelum belajar secara kelompok atau data primer.

Metode Analisa Data

Data adalah informasi tentang sesuatu. Data yang dikumpulkan berapapun banyaknya, bukanlah merupakan tujuan dari penelitian. Akan tetapi data dapat merupakan sarana untuk memudahkan penafsiran dan memahami maknanya. Jadi pengambilan (pengumpulan) data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Agar memudahkan untuk penafsiran, data yang sudah terkumpul harus ditabulasikan. Cara-cara tabulasi data dapat dipelajari saat kita mempelajari Statistik. Data yang sudah ditabulasi, jika diperhatikan dengan cermat dan sungguh-sungguh menimbulkan sejumlah pertanyaan, atau dapat mengungkapkan hal-hal tertentu. Kemungkinan akan terlihat sejumlah keganjilan atau penyimpangan sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa bisa terjadi demikian. Meskipun

tanpa atau belum menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, hanya menggunakan pikiran, imajinasi dan kecermatan pengamatan dapat mendekati makna data yang dihadapi. Dengan selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan peneliti mencoba berusaha memperoleh jawaban dari data itu.

Dengan menggunakan statistik, data dapat diolah dengan lebih eksak. Dengan statistik mungkin pula dapat mengungkapkan aspek-aspek baru, sehingga dapat memancing pemahaman baru yang dapat membantu peneliti dalam menelaah data yang peneliti hadapi. Secara umum statistik dapat membantu kita dalam : **1)** Menghitung nilai tengah data. Dengan menghitung nilai tengah data (mean, median, modus) kita bisa mengetahui kecenderungan dari data tersebut. Hasil dari nilai statistik ini sering terlihat aneh jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam dunia nyata; **2)** Mengetahui sebaran atau distribusi data. Distribusi data umumnya mengikuti distribusi normal yang berbentuk lonceng. Kebanyakan data berkelompok di bagian tengah, dan berangsur-angsur berkurang ke bagian tepinya. Makin jauh dari titik tengah berarti makin besar deviasi atau penyimpangannya. Dari sini dapat

dihitung penyimpangan rata-rata atau penyimpangan bakunya; 3) Mengetahui hubungan antara suatu data dengan data lain. Seperti di ketahui banyak fakta menunjukkan saling berhubungannya antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Bahkan dalam dunia nyata hubungan antar variabel tersebut sedemikian kompleksnya. Untuk menganalisis hubungan yang sangat kompleks sangatlah tidak mungkin. Untuk itu peneliti harus menyederhanakan hubungan tersebut dengan membuat model-model hubungan dengan sejumlah asumsi-asumsi. Dalam mengetahui hubungan-hubungan ini statistik sangat membantu untuk menghitung besar dan sifat dari hubungan itu; dan 4) Mengetahui sejauh mana data sesuai atau menyimpang dengan standar.

Kesesuaian antara macan data dengan metode analisis statistiknya didasarkan pada skala pengukuran datanya. Berdasarkan skala pengukurannya, analisis statistik yang dapat digunakan harus disesuaikan. Data yang menggunakan skala pengukuran Nominal dan atau ordinal, analisis statistik yang digunakan digolongkan dalam analisis statistik nonparametrik. Ketepatan hasil pengujian dalam penelitian sangat tergantung dari instrumen penelitiannya, sedangkan analisis

statistika yang digunakan tergantung dari skala pengukuran data yang digunakan. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data statistik. (Sutrisno Hadi,1975: 272)

Rumus Ststistik yang digunakan adalah rumus t-tes.

t=

$$\frac{M_A - M_B}{\sqrt{\left(\frac{X^2 a + X^2 b}{na + nb - 2}\right)\left(\frac{1}{na} + \frac{1}{nb}\right)}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan subyek penelitian adalah siswa kelas I SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan dengan jumlah siswa 42 orang. Lokasinya berada pada Jaraknya 1. 500 m dari pusat pemerintahn Kabupaten Bangkalan. Sasaran, Sasaran dari penelitian ini adalah siswa kelas I. Hal ini karena peneliti adalah guru kelas I pada SDN Kraton 3 ini dan sekaligus sebagai ajang dalam berbagai aktifitas, kreatifitas, improvisasi tehnik pembelajaran. Untuk itu maka peneliti mengadakan pengamatan, wawancara, dan penilaian yang dilaksanakan selama

pembelajaran dan tes dilaksanakan setelah selesai proses pembelajaran. Wawancara selain untuk mengadakan penilaian dimaksudkan juga untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu penilaian lebih menekankan proses pembelajaran dari pada hasil pembelajaran. Dengan asumsi bahwa dengan proses belajar yang baik akan dihasilkan hasil belajar yang baik pula. Artinya hasil belajar merupakan dampak dari proses pembelajaran atau latihan.

Seting, Siswa kelas I ini berasal dari keluarga yang amat heterogen. Dalam artian ada yang berasal dari golongan menengah dalam kesadaran tentang pendidikan (PNS), golongan buruh kasar dan buruh tani, petani serta golongan pesantren (penghuni pondok). Karena latar belakang yang berbeda tersebut tentu saja juga berbeda dasar pemikirannya serta daya pikirnya. Namun tentu sama tujuan. Maka dari itu perlu seni tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada mereka.

Karakteristik siswa juga berbeda. Dari hasil pengamatan penulis sebagai guru kelas di kelas I ini mengamati sebagian besar dari siswa yang berasal dari buruh kasar berperilaku agak kasar pula dan mudah tersinggung, namun dalam pelajaran cukup bagus. Sebagian

besar dari siswa pondok cenderung kalem dan sopan serta hormat, namun kurang baik dalam penguasaan materi ajar. Sebagian kecil dari keluarga PNS cukup bagus baik dalam perilaku dan penguasaan materi ajar. Secara rata-rata siswa cukup menyukai terhadap pelajaran. Dan sebagian besar siswa suka pada mata pelajaran pada guru yang difavoritkan. Perlu diketahui bahwa karena guru di sekolah ini cukup dan cenderung lebih, karena tiga lokalnya dalam taraf perbaikan maka diterapkan guru fak longgar. Artinya sebagian guru yang dianggap berkompeten pada mata pelajaran tertentu diberi tugas sesuai dengan kompetensinya.

Deskripsi hasil penelitian

Sebelum hasil penelitian, penulis paparkan uraian proses atau langkah-langkah dalam kegiatan penelitian ini: 1) Tahap persiapan, a) Penyusunan proposal penelitian, b) Penyusunan instrumen penelitian, c) Mengadakan diskusi dengan teman sejawat dalam sekolah; 2) Tahap Pelaksanaan, a) Mengajukan ijin kepada kepala sekolah untuk mengadakan penelitian di sekolah ini, yakni SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan, c) Mengadakan observasi umum ke kelas dan lingkungan sekolah sebagai obyek penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti sekaligus

mengambil data-data yang bersifat umum disekolah itu antara lain: keadaan murid, keadaan kepala sekolah dan guru, dokumen nilai raport dan ulangan harian, serta memberikan soal tes sebagai alat tes bagi siswa yang menjadi sampel penelitian, d) Mengolah dan menyiapkan penyajian data dalam penulisan penelitian ini.

Data Prestasi belajar pada mata pelajaran PPKn

Data tentang prestasi belajar dalam mata pelajaran PPKn ini diperoleh dari tiga kali tes, lalu diambil rata-ratanya. Prestasi yang diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *Quantum teaching* teknik belajar kelompok. Hal ini dimaksudkan agar nilai prestasi belajar siswa yang diperoleh benar-benar valid dan reliabel. Dari jumlah sampel yang diteliti pada saat menggunakan model belajar kelompok sebagai kontrol. Dari jumlah yang sama dan obyek yang sama pula setelah menggunakan model pembelajaran *Quantum teaching* teknik belajar kelompok sebagai eksperimen. Untuk menentukan eksperimen maupun kontrol menggunakan statistik. Data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data prestasi belajar PPKn siswa kelas I SDN Kraton 3 Bangkalan, dengan belajar kelompok sebagai kontrol jumlah nilai 267,5 dengan rerata 6,369. (Sumber: Dokumen nilai tes tahun pelajaran 2012/2013).
2. Data selanjutnya adalah dokumen yang diperoleh setelah menggunakan teknik *Quantum teaching* dari tiga kali ulangan dan diambil rata-ratanya sebagai berikut: Data Prestasi belajar PPKn siswa kelas I setelah menggunakan model pembelajaran *Quantum teaching* teknik belajar kelompok dengan jumlah 310,0 dengan rata-rata 7,38. (Sumber: Dokumen nilai tes tahun pelajaran 2013/2014)

Analisa Data

Setelah data disajikan dalam tabel-tabel sebagaimana di atas, selanjutnya dianalisa kemudian hasilnya digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Untuk menganalisa data tersebut diperlukan metode yang tepat. Metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode Statistik inferensial t-test. Untuk memudahkan analisa data diperlukan tabel kerja yang penulis sajikan sebagai berikut:

Tabel Kerja untuk rumus t mencari perbedaan penggunaan model pembelajaran Quantum teaching dengan menggunakan teknik belajar kelompok.

No.	Nama Siswa	Nilai		xa	xb	x ² a	x ² b
		a	B				
1	A	5,0	6,5	-0,5	-1,0	0,25	1,00
dst							
42	Z	6,5	8,0	1,0	0,5	1,00	0,25
	Jumlah	267,5	310,0	17,0	14,5	22,00	26,25

Sumber : Data peneliti

Langkah-langkah analisa data:

1. Tentukan Ma dengan cara $\frac{\sum a}{na} = \frac{310}{42} = 7,38095 = 7$

2. Tentukan Mb dengan cara $\frac{\sum b}{nb} = \frac{267,5}{42} = 6,36904 = 6$

$$t = \frac{Ma - Mb}{\sqrt{\left(\frac{\sum x^2 a + \sum x^2 b}{na + nb - 2}\right)\left(\frac{1}{na}\right) + \left(\frac{1}{nb}\right)}}$$

$$t = \frac{7 - 6}{\sqrt{\left(\frac{22 + 26,25}{42 + 42 - 2}\right)\left(\frac{1}{42}\right) + \left(\frac{1}{42}\right)}}$$

$$t = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{48,25}{82}\right)\left(\frac{2}{42}\right)}}$$

$$t = \frac{1}{\sqrt{\frac{96,5}{3444}}}$$

$$t = \frac{1}{\sqrt{0,0280}} = \frac{1}{0,167390} = 5,974072$$

3. Tentukan besarnya derajat kebebasan (db) dengan rumus $db = n - 2$
 $= 42 - 2 = 40$
4. Cocokkan dengan tabel signifikansi 1% atau 5% dengan $db = 40$
Tarf signifikansi 1% = 2,704 dan 5% = 2,021

Interpretasi

Dari analisa data di atas maka dapat disimpulkan bahwa "penggunaan model pembelajaran *quantum teaching* dengan teknik belajar kelompok terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas I SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan" meningkat. Artinya hipotesa tersebut terbukti keberhasilannya. Dengan hasil penelitian yang demikian baik ini maka lebih baik ada usaha dari guru-guru, bahkan guru-guru dimanapun mereka berada untuk menerapkan model-model pembelajaran yang baru dalam mengajar di depan kelas, agar anak-anak tidak jenuh dengan metode-metode yang cukup usang.

Usaha sekolah lebih baik mendukung dan memfasilitasi penerapan model-model pembelajaran yang baru ini. Demi peningkatan mutu pendidikan di seilah tersebut. Serta usaha yang dilakukan orang tua adalah mendukung dengan cara memberikan pengawasan terhadap cara belajar putra dan putrinya. Prospek kedepan model pembelajaran ini sangat baik. Apabila dikembangkan dengan sungguh-sungguh dan penuh

keyakinan, serta dukungan dari semua pihak, karena model pembelajaran ini mengikuti perkembangan dan paradigm kemajuan jaman. Guru sebaiknya tidak alergi terhadap perubahan cara mengajar. Dan lebih baik yakin bahwa perubahan itu penting.

Menurut Prof. Suyanto dari UGM bahwa guru adalah agen perubahan. Untuk itu sangatlah tepat apabila guru selalu menciptakan inovasi dalam pembelajaran. Sehingga guru-guru mempunyai daya jual yang tinggi. Bila perlu dengan perubahan ini guru Indonesia bisa *Go Public* ke dunia internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penggunaan model pembelajaran *Quantum teaching* ini mempunyai perbedaan hasil belajar yang banyak bila dibandingkan dengan teknik belajar secara kelompok. Dalam peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada SDN Kraton 3 Kabupaten Bangkalan. Model pembelajaran *Quantum Teaching* teknik belajar kelompok terbukti mempunyai hasil yang lebih

baik bila dibandingkan dengan cara belajar konvensional yang lain.

Saran

Berdasar kesimpulan dari penelitian di atas penulis dapat memberikan saran, antara lain: a) Bagi guru, Demi peningkatan mutu pelajaran pada pelajaran apa saja khususnya PKn sebaiknya digunakan teknik pembelajaran yang baru, menarik sederhana, lebih dekat dengan kegemaran siswa dan bervariasi, sehingga tercipta inovasi pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM); b) Bagi sekolah, Khususnya seluruh komponen SD Negeri Kraton 3 Bangkalan, penggunaan teknik pembelajaran lebih baik selalu ditekankan kepada para guru dan calon guru pada sekolah ini maupun sekolah lain yang ingin mengadopsi hasil penelitian ini, sehingga akan muncul ide-ide baru dan tidak terpaku metode ceramah seperti paradigma lama, yang masih melekat pada kaum guru, sehingga pembelajaran menjadi semakin bermakna.

Daftar Pustaka

Afifudin, 1986 *Psikologi Anak Usia Sekolah Dasar*, Solo, Harapan masa.

Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Bobbi De Porter. Marj Reardon, Sarah Singer-Nourie, 2003, *Quantum Teaching Mempraktekkan Quantum Learning di Ruang-ruang kelas*, Bandung, Kaifa.

Gordon danvos Dryden, Jeanette, 2000, *Revolusi Cara Belajar*, Bandung, Kaifa.

Hamalik, 1993, *Metode Belajar dan Kesulitan Belajar*, Bandung

Sutrisno Hadi, 1986, *Statistik Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta

Anita Lie, 2005, *Cooperative Learning Mempraktekkan Cooperatif Learning di Ruang Kelas*, Jakarta, Grasindo.

Masrial, 1993, *Teras Kuliah Belajar Mengajar Aktif*, Padang, Angkasa Raya.

Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Gerrad Senduk, 2005, *Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Dalam KBK*, Malang, UM

Ngalim Purwanto, 1995, *Tes Hasil Belajar*, Semarang,

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP KEBERADAAN DAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SALAH SATU KELOMPOK MARGINAL

Hassan Suryono, Rima Vien Permata Hartanto
Prodi PPKn, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail : hassansuryono@yahoo.com

ABSTRACT. *Pancasila possess firm bond with the norm of constitution, democracy and the existence of Constitutional Court. Ideally, the purpose of the Constitutional Court establishment in Indonesia is to strengthen the protection of the constitutional democracy. In relation with Constitutional Court, the philosophic idea of Pancasila can become some sort of constitutional meaning reflector. In the context of constitution calibration as one of the Constitutional Court authority, Pancasila must be sought within its embodiment for the sake of substantial justice fulfillment, that is by translating it in the Constitutional Court verdicts. The Indonesian Government has guaranteed the fulfillment of the constitutional rights of its citizens especially the marginal. The Constitutional Court verdicts are truly a real product of the Pancasila's value manifestation as the form of alignment in providing the alternatives for the marginal.*

Keywords: *Pancasila, Constitutional Court decision, Marginal Communities, Indigenous People*

PENDAHULUAN

“Membaca Pancasila” di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengandaikan pemahaman tentang adanya hubungan di antara Pancasila dan keberadaan MK. Pancasila memiliki kaitan yang erat dengan norma konstitusi, demokrasi dan keberadaan MK. Dalam kaitannya dengan keberadaan MK, ide filosofis Pancasila dapat menjadi semacam reflektor pemaknaan konstitusi. Pemaparan tentang hal tersebut

dapat dirujuk misalnya dari poin-poin pendapat Arief Sidharta yang bisa dirunut ke dalam beberapa proposisi tentang konstitusi yang berbasis Pancasila. *Pertama*, adanya pembatasan kekuasaan atau kewenangan pemerintah. *Kedua*, perlindungan hak asasi manusia. *Ketiga*, dasar yuridis bagi penyelenggaraan demokrasi (Sidharta, 2012). Ketiga proposisi tersebut dalam negara yang demokratis secara normatif masih mengacu ke proposisi tentang pelegitimasi kekuasaan pada

konsensus rakyat, tentang pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan tentang penegasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban, pengawasan, serta kontrol kekuasaan publik tersebut. Kesemuanya ini dapat dibayangkan sebagai jaringan ide filosofis Pancasila di mana makna konstitusi bernaung padanya.

Reformasi nasional bergerak agar demokrasi tidak sebatas penampilan sistem dan struktur. Seperti yang akan dibahas berikutnya, MK hadir dalam situasi di mana sistem demokrasi yang berkembang sangat bersifat formal dan prosedural belaka. Agenda reformasi yang turut membangun sistem perwakilan rakyat yang lebih mantap demi partisipasi dan kesetaraan antar rakyat sepertinya belumlah cukup. Kesulitan seperti ini makin tergugah dengan adanya tendensi dominasi mayoritas yang diadopsi demokrasi prosedural. Mayoritarianisme yang berpegang pada paham utilitarian sangat membahayakan hak minoritas (Rajan, 2002 : 49).

Dengan ancaman risiko dari sistem dan struktur demokrasi perwakilan terhadap hak-hak marginal ini, maka agenda reformasi nasional pun menyertakan MK sebagai sarana untuk menjaga supaya nilai-nilai Pancasila tidak diperas habis menjadi mekanisme prosedural yang utilitarianistik. Masyarakat marginal di Indonesia yang paling rentan terkena imbas mayoritarianisme ini misalnya seperti masyarakat adat, kelompok umat beragama tertentu, kaum buruh,

kaum miskin, perempuan dan anak serta masyarakat-masyarakat yang memiliki akses kehidupan terbatas karena tinggal di pelosok daerah. Kelompok-kelompok ini dalam situasi riil politik harus berhadapan dengan struktur masyarakat yang diskriminatif akan akses-akses keadilan. Tinjauan Rajan dari pengalaman masyarakat India layak diperhitungkan dalam rangka menangani kesukaran masyarakat marginal ini. Rajan beranggapan bahwa ada tegangan intrinsik antara demokrasi dan konstitusionalisme. Yang pertama lebih mengutamakan pilihan bebas warga negara yang justru cocok dengan sistem mayoritarian. Sedangkan yang terakhir memiliki pandangan bahwa pilihan seperti itu dapat diwujudkan (Rajan, 2002 : 74). Apabila tegangan ini kita kembalikan ke jaringan ide di atas, tampak jelas bahwa demokrasi dan konstitusionalisme perlu saling menanggapi. Signifikansi kaitan tersebut berporos pada makna konstitusi menurut ide filosofis Pancasila, sehingga menjadikan konstitusi itu berpihak dan melindungi hak-hak masyarakat marginal.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cabang kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945. Terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan yang dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter the constitution*), pelindung hak asasi

manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen constitutional right*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (Safa'at, 2010:10). Dari kelima kewenangan tersebut, perlindungan nilai-nilai Pancasila terutama hak-hak masyarakat marginal yang acapkali terabaikan harus menjadi prioritas MK melalui putusannya.

Tulisan ini mencoba mendalami bagaimana kewenangan MK memaknai, melindungi dan menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak-hak masyarakat marginal, khususnya untuk isu Masyarakat Hukum Adat (MHA), dengan fokus tiga isu konstitusional, yaitu : (a) persoalan pengakuan bersyarat atas keberadaan masyarakat hukum adat; (b) hak masyarakat hukum adat atas tanah dan hutan; (c) hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam politik dengan menggunakan tradisi demokrasi yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber utama yang akan ditelaah dan buku-buku yang menjadi landasan berpikir terkait. Dari sisi pendekatan penelitian, penelitian yang menjadikan putusan pengadilan sebagai pokok kajian disebut pula dengan pendekatan kasus (*case study*).

Penelitian ini menjadikan 4 (empat) putusan Mahkamah

Konstitusi sebagai pokok pembahasan untuk melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi memaknai nilai-nilai Pancasila di dalam putusan-putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan sebagai kasus yang diteliti yaitu menyangkut isu pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat.

Beberapa putusan MK yang dianalisis untuk membahas isu konstitusional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat antara lain :

1. Putusan Perkara No. 31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
2. Putusan Perkara No. 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai sengketa hasil pemilihan anggota DPD RI yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T
3. Putusan Perkara No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
4. Putusan Perkara No. 35/PPU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siapa Masyarakat Hukum Adat

Konsep dasar tentang Masyarakat Hukum Adat yang paling klasik dapat dirujuk pada apa yang dikemukakan oleh Ter Haar (1979:27) dengan konsepnya yang disebut sebagai *adatrechtsgemeenschap*, yakni

masyarakat hukum dari golongan masyarakat Indonesia asli yang terikat dalam satu kesatuan secara lahir dan batin yang bertindak sebagai satu kesatuan organisasi menurut tingkah laku tertentu, dimana segala sesuatu dalam kesatuan masyarakat tersebut terjadi dan berlangsung akibat adanya aturan tertentu (yang tiada lain adalah aturan adat).

Sementara itu Hazairin mengungkapkan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti *desa* di Jawa, *marga* di Sumatra Selatan, *nagari* di Minangkabau, *kuria* di Tapanuli, *wanua* di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Sehingga, dari uraian mengenai konsep masyarakat hukum adat di atas bisa dikatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat hukum sebagai suatu institusi politik yang mandiri (mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada institusi sosial yang lebih besar) beserta segala macam perangkat kelembangaan yang ada yang pembentukan dan kehidupan di dalamnya didasarkan pada aturan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Bertolak dari uraian di atas, jelas kiranya bahwa kehidupan

masyarakat hukum adat pada dasarnya tidak bertumpu pada keberadaan negara beserta kelengkapan hukum negaranya, melainkan bertumpu pada aturan hukum adat mereka. Sehingga, setiap hak yang lahir dan eksis, baik itu hak kolektif maupun hak perseorangan, dalam suatu komunitas masyarakat hukum adat disebabkan karena adanya aturan hukum adat dalam komunitas masyarakat tersebut.

Konsep Pengakuan Terbatas/Bersyarat terhadap Eksistensi Masyarakat Adat dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

UUD 1945 mengatur beberapa jaminan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Setidaknya ada dua ketentuan kunci ketika membicarakan mengenai masyarakat hukum adat di dalam UUD 1945, antara lain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 :

"negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Pasal 28I ayat (3)UUD 1945

"identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.”

Dua dasar konstitusional itu menjadi rujukan bagi pengembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, jelas terlihat adanya bentuk pengaturan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional diakui hanya jika memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Adanya konsep pengakuan terbatas ini lebih terlihat lagi pada pengaturan dalam tingkat legislasi (undang-undang), misalnya UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) sebagai undang-undang yang secara tegas tidak hanya mengatur eksistensi masyarakat adat tetapi juga hukum adat.

Pengaturan UUPA mengenai masyarakat hukum adat dapat ditemui dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3, sedangkan pengaturan tentang hukum adat dapat ditemui pada Pasal 5 ayat (4) UUPA menyebutkan bahwa :

“hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 3 UUPA menyebutkan :

“dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Sedangkan Pasal 5 UUPA menyebutkan :

“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UUPA di atas, jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat hukum adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan

nasional, di mana mengenai perihal kepentingan nasional ini harus dirujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 UUPA, yakni kepentingan penguasaan negara dalam level yang tertinggi atas bumi, air, ruang angkasa beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya di bawah konsep pengakuan terbatas sebagaimana linier dengan UUPA juga dapat ditemui pada UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999). Beberapa pasal yang mengatur tentang eksistensi masyarakat hukum adat dalam UU Kehutanan ini antara lain Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 67.

Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyebutkan :

"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."

Sedangkan Pasal 67 UU ini menyebutkan :

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum

adat yang berlaku "dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan dan hapusnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Lebih jauh lagi, penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan menyebutkan :

"Ayat (1) : Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Adanya wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan;
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari."

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut UU Kehutanan, eksistensi masyarakat adat diakui keberadaannya hanya jika keberadaannya tersebut ditetapkan dengan Perda yang mendasarkan diri pada kriteria sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) di atas, dan hal yang paling fundamental di atas itu semua adalah bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3).

Sementara itu UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 mengatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) kesatuan masyarakat hukum adat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara"

Dimasukkannya masyarakat adat sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang merupakan suatu penerimaan negara bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak-hak konstitusional yang dapat saja terlanggar dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang. Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang dipakai memiliki *legal standing* untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Kesatuan masyarakat hukum adat dibedakan dengan subyek hukum, sehingga kesatuan masyarakat hukum adat bukanlah perorangan warga negara Indonesia, bukan pula badan hukum publik yang contohnya seperti desa, kecamatan, kelurahan, bukan pula badan hukum privat seperti perusahaan maupun koperasi, dan tentu juga bukan lembaga negara. Karena disebut tersendiri, maka sebenarnya masyarakat adat merupakan subyek hukum yang unik. Keunikan tersebutlah yang kemudian, agaknya yang mendorong para pembentuk hukum untuk memberikan sejumlah persyaratan tentang keberadaannya.

Perkara No. 31/PUU-V/2007 merupakan Pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, Mahkamah Konstitusi menafsirkan maksud dari tiga syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat di

dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Konstitusi.
dan pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah

Tabel 1.
Penjelasan Syarat-Syarat Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat

Syarat pengakuan	Penjelasan
Sepanjang masih hidup	Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara <i>de facto</i> masih ada dan/atau hidup (<i>avtual existence</i>), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (<i>in-group feeling</i>); b) Ada pranata pemerintahan adat; c) Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) Ada perangkat norma hukum adat; dan e) Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;
Sesuai dengan perkembangan masyarakat	Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dimaksud sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain, maupun dalam peraturan daerah; b) Substansi hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;
Sesuai dengan prinsip NKRI	Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak mengganggu eksistensi NKRI sebagai satu kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: (i) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI; dan (ii) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Namun hal yang berbeda dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Perkebunan. UU Perkebunan sendiri mengatur syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat yang berbeda dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan disebutkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat memiliki lima syarat yaitu: (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rectsgemeinshaft*), (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, (c) ada wilayah hukum adat yang jelas, (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan, (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Hutan

Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan hutan terlihat dalam putusan perkara No. 55/PUU-VIII/2010 dan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012. Permohonan pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dalam perkara No. 55/PUU-VIII/2010 diajukan oleh empat orang petani dan masyarakat hukum adat, yaitu Jamin, Vitalis Andi, Sakri dan Ngatimin Alias Keling. Pokok permohonan dalam perkara ini adalah menguji konstitusionalitas Pasal 21, penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa "yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan

tanpa izin adalah tindakan okupasi tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 47 ayat (1) serta ayat (2) UU Perkebunan yang menjadikan ketentuan pidana untuk menegakkan Pasal 21 tersebut. Perkara yang dimaksud adalah ketentuan yang selama ini digunakan oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan. Perkara ini tidak diuji terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun demikian, perkara ini sangat cocok dibahas salah satu narasi tentang bagaimana warga negara menjadikan jalur konstitusional untuk melindungi haknya dan menghadapi konflik di bidang perkebunan. Perkara ini diuji terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon yang putusannya dibacakan pada hari Senin, 19 September 2011.

Putusan dalam perkara ini juga memberikan dasar-dasar bagi perlindungan masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sudah sewajarnya hak masyarakat hukum adat atas tanah dilindungi sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut bahkan Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa perlindungan

masyarakat hukum adat dalam bentuk undang-undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi mengaitkan rumusan tentang masyarakat hukum adat di dalam UU Perkebunan dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (disingkat Permenag 5/1999). Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menjelaskan eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi 5 syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rectsgemeinschaft*), (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, (c) ada wilayah hukum adat yang jelas, (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan, (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Syarat itu berbeda dengan Pasal 5 ayat (1) Permenag 5/1999 yang menyatakan bahwa: "Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah

bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam". Kemudian Pasal 5 ayat (2) Permenag 5/1999 itu menyatakan, "Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah". Sementara Pasal 6 menyatakan, "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan". Bahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan melindungi kesatuan-keatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang.

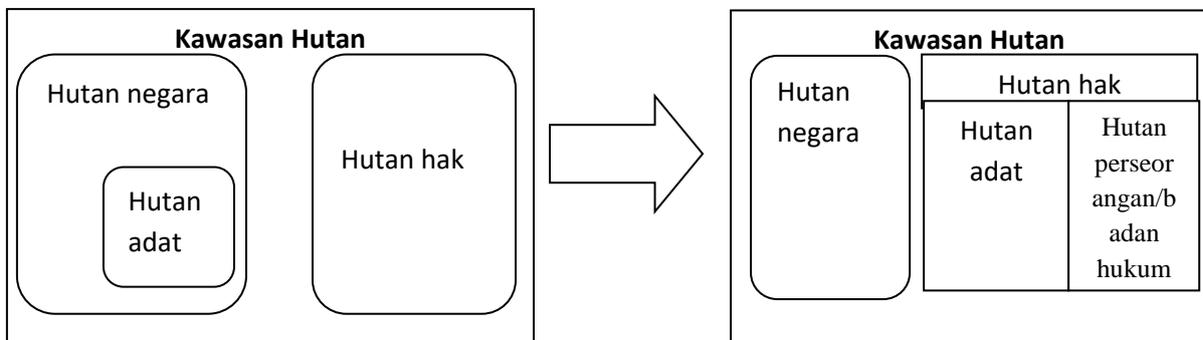
Mahkamah Konstitusi kemudian menyimpulkan bahwa sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan. Dengan kata lain, sebenarnya pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu dilakukan sebelum secara serampangan menerapkan ketentuan kriminalisasi dalam penanganan konflik perkebunan.

Salah satu pokok permohonan dalam Perkaratan No. 35/PUU-X/2012 adalah mengenai konstitusionalitas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa: "*hutan adat adalah hutan **negara** yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan bahwa: "*hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat*". Berlakunya ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara itu telah menimbulkan pengingkaran terhadap keberadaan hutan adat. Ditambah lagi dengan ketidakseriusan dari pemerintah untuk melahirkan kebijakan operasional yang dapat membuat masyarakat hukum adat dapat menikmati hak-hak mereka atas hutan adat (Arizona et al, 2013)

Atas dasar ketentuan yang menyatakan bahwa hutan adat

merupakan hutan negara itulah, para pemohon dalam perkara ini mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mendalilkan bahwa seharusnya keberadaan hutan adat dijadikan kategori khusus yang berbeda dengan hutan negara dan hutan hak. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain yang berbeda dari kontruksi UU Kehutanan dan juga dengan yang dimohonkan oleh Pemohon. Pada intinya Mahkamah Konstitusi melalui putusan itu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan hak, melainkan memasukkan keberadaan hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga hutan hak selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah perseorangan/ badan hukum, juga merupakan hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

Bagan 1. Perubahan Status Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012



Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa di dalam UU Kehutanan terdapat tiga subjek

hukum yang memiliki hubungan hukum dengan hutan, yaitu negara, masyarakat hukum adat dan

pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Hubungan hukum atas hutan melekat pula di dalamnya hubungan hukum atas, sehingga tidak dapat dipisahkan antara hak atas tanah dengan hak atas hutan. Di atas tanah negara terdapat hutan negara, di atas tanah hak terdapat hutan hak, dan di atas tanah ulayat terdapat hutan adat.

Pemegang Hak Atas Hutan Adalah Pemegang Hak Atas Tanah

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Sehingga bisa diartikan bahwa masyarakat hukum adat selain memegang hak atas tanah ulayat sekaligus memegang hak atas tanah hutan adat. Perseorangan/badan hukum pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas tanah hutan hak. Dengan demikian, keberadaan hutan adat harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, karena hutan adat berada di atas tanah ulayat (Arizona, dkk, 2013).

Implikasi masyarakat hukum adat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat dan hutan adat yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, kewenangan Kementerian Kehutanan untuk mengatur, menentukan fungsi dan mengawasi peredaran hasil hutan dari hutan adat baru dapat dilaksanakan bila ada penetapan hutan adat. Namun terhadap hutan

adat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, seperti Keputusan Bupati Merangin 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk, telah dapat diterima keberadaanya sebagai hutan adat.

Pengakuan Mekanisme Partisipasi Politik Masyarakat Hukum Sistem Pemilihan Umum Nasional

Satu lagi pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah pengakuan terhadap model pemilihan pemimpin yang diterapkan oleh masyarakat Yahukimo, yang dalam tulisan ini disebut sebagai "model pemilihan *noken*". Model *noken* dipertegas peranan adat dalam membangun demokrasi. Pemilihan model *noken* dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kepala-kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan partai apa dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil mereka di parlemen. Setelah dilakukan musyawarah, kepala suku ditugaskan untuk mewakili pemilih melakukan penyontrengan. Kertas yang sudah dicontreng tersebut dimasukkan ke dalam tas khas Papua yang disebut *noken* berdasarkan pilihan yang sudah disepakati.

Sementara itu, masyarakat menyiapkan lubang yang cukup besar yang diisi dengan batu dan ditaruh babi serta umbi-umbian dan

kayu bakar. Setelah babi dan umbi-umbian masak, maka mulailah rakyat berpesta ria. Bagi masyarakat Yahukimo, pemilu itu identik dengan pesta gembira. Alasannya, menurut kepala suku, pemilu tidak boleh meninggalkan permusuhan diantara mereka masyarakat Yahukimo tidak mau terpecah-pecah karena berbedanya pilihan (Sodiki, 2009). Oleh sebab itu, mereka bermusyawarah terlebih dahulu mengenai siapa atau partai mana yang akan dipilih.

Pemilihan model *noken* ini terungkap dalam sidang perkara Nomor 47-81PHPU.A/VII/2009 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh dua pemohon ini adalah tentang perselisihan hasil pemilu untuk anggota DPD, jadi bukan konstitusionalitas *noken* sebagai model pemilihan. Namun, mau tidak mau, pemilihan model *noken* ini terkait langsung dengan sahnya pemilihan dan jumlah suara yang diperselisihkan. Jadi ketika suara yang didapat dari pemilihan model *noken* diakui sebagai salah satu tata cara pemilihan yang konstitusional.

Beberapa kalangan mempersoalkan pemilihan model *noken* ini karena model ini tidak lazim dan bertentangan dengan tata cara pemilu yang diatur oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu). Hasbi Suaib mempersoalkan model *noken* ini karena kemudian membuat dia tidak mendapatkan suara pada satu wilayah yang disana ada banyak pendukungnya.

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dan mengaitkan pemilihan model *noken* dengan sistem pemilu di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, yaitu: (1) terkait dengan asas pemilu yang dilakukan dengan efektif dan efisien secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan (2) dengan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pemungutan suara didalam UU Pemilu (Arizona, 2010). Dua hal tersebut perlu dicermati sebab dalam pemilihan model *noken*, individu warga negara tidak melakukan penyontrengan langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu seperti kotak suara diganti dengan *noken* sebagai tempat mengumpulkan suara itu jumlahnya tergantung kepada beberapa calon yang mendapat dari satu tempat pemungutan suara.

Diakui secara implisit pemilihan model *noken* ini menjadi tata cara yang sah dalam penyelenggaraan pemilu oleh Mahkamah Konstitusi membuat kita berfikir ulang tentang struktur sosial di dalam masyarakat yang harus direspons oleh setiap perubahan hukum. Hal ini merupakan objek kajian yang sering ditelaah dengan optik sosiologi hukum dan antropologi hukum. Dengan pendekatan ini, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan kontekstualisasi pada lapangan sosial yang beragam. Selain melihatnya sebagai pengakuan, putusan demikian juga

mencerminkan komitmen dalam membangun demokrasi di negara yang pluralistik seperti Indonesia. Demokrasi selalu menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Asshidiqie, 2005).

Bila karakter putusan MK dapat dibedakan secara diametral antara putusan yang konservatif di satu sudut dan putusan yang progresif pada sudut yang lain, maka Putusan MK Nomor perkara 47-81/PHPU.A/VII/2009 yang mengakui mekanisme pemilihan model *noken* di Yahukimo dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif. Dikatakan progresif karena melalui putusan ini MK mengembangkan suatu instrumen pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Putusan MK ini punya arti penting bagi pengakuan terhadap masyarakat adat. Dalam hal ini dilakukan secara implisit lewat kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Dalam analisisnya putusan MK yang mengakui model pemilihan oleh masyarakat adat di Yahukimo ini, Ahmad Sodiqi salah seorang hakim konstitusi mengembangkannya lebih luas dengan gagasan konstitusi pluralis. Menurutnya, karakter konstitusi Indonesia adalah konstitusi pluralis yang seharusnya bisa dikembangkan lebih jauh untuk mengakui keberagaman yang ada di republik. Dengan pengakuan atau "*rule of recognition*", konstitusi Indonesia dapat menjadi konstitusi yang hidup

dan responsif terhadap keberagaman (*responsive constitution*). Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshidiqie bahwa konstitusi memiliki akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (*the living constitution*) (Asshidiqie, 2008).

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas, terlihat adanya arah berpikir dalam upaya membaca Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk isu pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam persoalan konstitusionalitas yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, Mahkamah Konstitusi menghasilkan kemajuan-kemajuan penting. Melalui Putusan Perkara No. 31/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menjabarkan mengenai pengaturan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sehingga bisa menjadi rujukan awal dalam mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat. Kemudian melalui Putusan Perkara No. 47-81/PHPU.A/VII/2009, dengan menggunakan penafsiran sosiologis, MK menjadikan fakta lapangan yaitu praktik pengambilan keputusan secara aklamasi pada masyarakat di Yahukimo, atau yang disebut dengan pemilihan model *noken*, sebagai mekanisme yang sah dalam pemilihan umum. Putusan ini keluar

dari langgam proseduralisme pemilu yang memiliki asas langsung, umum, dan rahasia.

Selain di lapangan politik, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi seperti dalam pengujian UU Perkebunan dan UU Kehutanan. Dalam pengujian Perkara No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa pendekatan pidana bukan merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan konflik di bidang perkebunan yang melibatkan masyarakat hukum adat karena sering kali akar dari konflik itu adalah persoalan keperdataan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui jalur perdata harus diutamakan sebelum melakukan pendekatan pidana yang selama ini sering kali dipakai untuk mengkriminalisasi masyarakat adat.

Dalam persoalan kehutanan, melalui Putusan Perkara No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012 menegaskan pentingnya keberadaan dan hak masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat merupakan bentuk pemenuhan janji konstitusional segenap bangsa Indonesia.

Namun sekalipun ada kemajuan dalam persoalan konstitusional berkaitan dengan masyarakat hukum adat, persoalan

masih terletak pada sejumlah persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat untuk diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, seperti "sepanjang masih ada", "sesuai dengan perkembangan masyarakat", dan "sesuai dengan prinsip NKRI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 harus dipertahankan. Padahal dalam kenyatannya, pengakuan-pengakuan bersyarat itu yang membuat masyarakat hukum adat sulit untuk diakui keberadaan dan hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam karena mereka harus dihadapkan dahulu dengan mekanisme administratif pengakuan yang tidak mudah mereka akses.

Dengan demikian dari berbagai persoalan konstitusional yang diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi yang mengandung muatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mulai menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam putusannya, namun peranan Mahkamah Konstitusi belum begitu maksimal untuk melindungi kelompok minoritas dan marginal khususnya perlindungan hak masyarakat adat sekalipun sudah mulai menampilkan titik-titik kemajuan penting bagi peningkatan pemenuhan hak masyarakat adat.

Dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan konstitusional masyarakat hukum

adat, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menggunakan Pancasila secara eksplisit sebagai "batu uji" dalam pengujian undang-undang.

Belum dijadikannya Pancasila sebagai alat uji yang tegas dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belum maksimal untuk tampil secara simbolik dan secara substansial sebagai "Penjaga Nilai-nilai Pancasila" (*the guardian of Pancasila's value*) selain juga sebagai pelindung hak-hak warga negara (*the protector of citizens rights*).

Saran

1. Perlunya kesadaran yang terus menerus dalam tubuh Mahkamah Konstitusi bahwa lembaga ini dibentuk untuk memperkokoh perlindungan demokrasi konstitusional sehingga Mahkamah Konstitusi harus terus berupaya menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya kelompok marginal.
2. Perlunya menjadikan Pancasila sebagai alat uji yang tegas dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga secara maksimal Mahkamah Konstitusi tampil secara simbolik dan secara substansial sebagai "Penjaga Nilai-nilai Pancasila" (*the guardian of Pancasila's value*) selain juga sebagai pelindung hak-hak warga

negara (*the protector of citizens rights*).

3. Perlunya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mendalami nilai-nilai Pancasila secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sodiki. 2009. *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta : Mahkamah Konstitusi.
- B. Arief Sidharta. 2012. *Filsafat Hukum dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila*, Makalah disampaikan pada Konferensi ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Semarang, 16-17 Juli 2012.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Materi disampaikan dalam Stadium General pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat*, Makalah disampaikan sebagai bahan Keynote Speech pada Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten. UIN Gunung Djati, Bandung, 5 April 2008.
- M. Nurkhoiron. 2007. "Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia : Sebuah Catatan Awal", dalam : Mashudi

- Noorsalim, M. Nurkhoiron dan Ridwan Al-Makassary (ed), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta : The Interseksi Foundation.
- Mahfud MD. 2012. *Menguatkan Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara*, Majalah Konstitusi Edisi No. 52.
- Muchamad Ali Safa'at. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Mahkamah Kostitusi.
- Nalini Rajan. 2002. *Democracy and the Limits of Minority Rights*, New Delhi, Thousand Oaks, London : Sage Publicaations.
- Putusan Perkara No. 31/PUU-V/2007 mengenai pengujian UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
- Putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Putusan Perkara No. 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai sengketa hasil pemilihan anggota DPD RI yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S. T
- Putusan Perkara No. 55/PUU-VII/2010 mengenai pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Ter Haar, 1979, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- UU No. 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yance Arizona, Siti Rakhma Mary dan Erasmus Cahyadi. 2013. *Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU Kehutanan*. Makalah disampaikan dalam Konsolidasi CSO Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hutan Adat, Jakarta, 29 Mei 2013.
- Yance Arizona. 2010. *Konstitusionalitas Noken : Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010. Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

AKTUALISASI NILAI – NILAI KARAKTER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBBASIS KKNi UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DOSEN DAN LULUSAN PROGRAM STUDI PPKn

Anita Trisiana

Program Studi PPKn FKIP Unisri Surakarta

Alamat E-mail : anita_trisiana@gmail.com

ABSTRACT. *Efforts to refine and improve the quality of education in universities continues and is expected to realize an increase in the quality and relevance of education to be done thoroughly covers the development of Indonesia fully human dimension, namely the aspects - the moral aspect, morals, manners, knowledge, skills, health, art and culture. Development aspects - aspects that lead to the improvement and development of life skills that are realized through the achievement of the competence of lecturers. The quality of development is inseparable from the policy of the Indonesian National Qualifications Framework (KKNi), which can pair with education and work experience in accordance with the competencies defined by each - each program of study. Thus the development of the policy implementation, still carry the actualization of value - the value of the characters in improving the competence of lecturers who will indirectly improve the quality and relevance of education.*

Keyword: *Character Values, Policy, KKNi, Competencies*

PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Hal ini sesuai

dengan kebijakan yang sudah dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 5 yaitu: Pendidikan Tinggi bertujuan:

(1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya

untuk kepentingan bangsa;(2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai antisipasi terhadap permasalahan tersebut, maka secara menyeluruh perlu kiranya dibangun jalinan kerjasama yang lebih kokoh dan lebih teratur antara pejabat pemerintah di bidang pendidikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar usaha mencari jalan keluar berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan

secara bersama – sama. Sejalan dengan prinsip tersebut , maka perlu tercipta suatu mekanisme yang harmonis di antara para “ *stakeholders* ” pendidikan. Pada tingkat pusat hubungan tersebut diperlukan antara Departemen dan kantor menteri Negara yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu dalam menetapkan berbagai kebijakan yang menjadi kewenangan masing – masing ditingkat pusat , sedangkan ditingkat provinsi dan kabupaten / kota diperlukan pula jalinan kerjasama antara pihak eksekutif , legislatif , dan wakil dari masyarakat sebagai pelaksana berbagai kebijakan dari pemerintah.

Untuk menilai Kinerja Dosen, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Sertifikasi Dosen, yang bertujuan:

1. Menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas
2. Melindungi profesi dosen sebagai agen

- pembelajaran di perguruan tinggi
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
 4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
 5. Meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiasi.

Selanjutnya Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan terus profesionalismenya, dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perguruan tinggi wajib memberikan akses kepada dosen terhadap sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, agar dosen dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan profesionalismenya.

Rasional peningkatan kelembagaan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012

juga didasarkan **pada acuan pencapaian 8 standar**, yaitu: standar isi,, standar proses (pembelajaran), standar proses (penilaian), standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Semuanya bermuara pada tujuan akhir yaitu mencapai lulusan yang kompeten.

Tantangan pengembangan Pengelolaan Perguruan Tinggi berkaitan erat dengan **pendidikan karakter** yang menjadi alternatif mengembangkan kompetensi masa depan sebagai bagian dari peningkatan mutu kelembagaan. **Karakter akan jadi bagian dalam pencapaian kompetensi dosen** yang mampu memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga Negara dan tanggungjawab terhadap lingkungan, memiliki kecerdasan sesuai dengan pekertinya, dan terlebih lagi yang amat sangat penting adalah

harus bermuatan pada pembentukan dan penguatan karakter mahasiswa sebagai bagian dari pengembangan kompetensi inti yang meliputi menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, percaya diri, cinta tanah air, mandiri, kerjasama, demokratis, dan kreatif dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat lingkungan sekitar.

Dalam UU RI No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pada Pasal 1 ayat (1), dikemukakan pula bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dengan harapan perubahan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik, dan sekaligus sebagai bagian dari penguatan pendampingan dan pemantauan harmonisasi kebijakan oleh pusat dan daerah dalam pemetaan, pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan Perguruan Tinggi.

BAGAIMANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN?

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart (Budi Winarno , 2002 : 101) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian yang luas , yang merupakan alat administrasi hukum

dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, sedangkan implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 : 102) membatasi Implementasi kebijakan “ sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok – kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya ”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber – sumber yang di dalamnya

termasuk manusia, dana, dan kemampuan, organisasioanal, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini kita bahas berbagai Model Proses Implementasi Kebijakan, antara lain:

1). Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002 : 111) menawarkan suatu model proses Implementasi Kebijakan yang mempunyai enam Variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel – variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a). Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor – faktor yang

menentukan pencapaian kebijakan. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan – tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b). Sumber – sumber kebijakan

Sumber – sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan . Sumber – sumber yang dimaksud mencakup

dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c). Komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan .

Komunikasi di dalam dan antara organisasi – organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan – pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkan

- a baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d). Karakteristik badan – badan pelaksana
- Karakteristik badan – badan administratif berkaitan dengan struktur birokrasi yakni karakteristik – karakteristik, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
- e). Kondisi – kondisi ekonomi , sosial dan politik
- Kondisi – kondisi ekonomi , sosial dan politik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel – variabel lingkungan dari hasil – hasil kebijakan.
- f). Kecenderungan pelaksana (*implementers*)
- Berkaitan dengan kemampuan dan keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan itu sendiri, seperti; kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan , macam tanggapan (penerimaan, netralitas,

penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

2). Sedangkan menurut Edwards (Budi Winarno, 2002 : 114) studi implementasi kebijakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

a. Komunikasi

Secara umum proses komunikasi kebijakan terdiri dari:

1). Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan , maka ia harus menyadari bahwa keputusan dan perintah untuk

pelaksanaanya telah dibuat dan dikeluarkan, sehingga hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan perintah dapat ditekan sekecil mungkin. Hambatan – hambatan tersebut antara lain:

(a) Pertentangan

pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan .

(b) Informasi

melewati belapis – lapis hierarki birokrasi.

(c) Pada akhirnya

penangkapan komunikasi dihambat oleh persepsi yang

selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan – persyaratan suatu kebijakan .

2). Kejelasan

Jika kebijakan – kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan , maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga harus dikomunikasikan secara jelas.

3). Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berjalan secara efektif , maka pemerintah – pemerintah

pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

b. Sumber – sumber

Sumber – sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan , yang meliputi: Staf yang memadai serta keahlian – keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka , wewenang dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul – usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan – pelayanan publik.

c. Kecenderungan – kecenderungan

Jika pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu maka proses

pelaksanaan kebijakan
menjadi semakin
mudah.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan
salah satu badan yang
paling sering bahkan
secara keseluruhan
merupakan pelaksana
kebijakan .

AKTUALISASI NILAI - NILAI

KARAKTER

Istilah karakter dan
kepribadian atau watak sering
digunakan secara bertukar-tukar ,
tetapi Alport menunjukkan kata
watak berarti normatif, serta
mengatakan bahwa watak adalah
pengertian etis dan menyatakan
bahwa *character is personality
evaluated and personality is
character devaluated* (watak
adalah kepribadian dinilai, dan
kepribadian adalah watak yang
tak dinilai). Karakter adalah
watak, sifat, atau hal-hal yang

memang sangat abstrak yang ada
pada diri seseorang.

Dinamika pemahaman
pendidikan karakter berproses
melalui tiga momen: momen
historis, momen reflektif, dan
momen praktis. Momen historis,
yaitu usaha merefleksikan
pengalaman umat manusia yang
bergulat dalam menghidupi
konsep dan praksis pendidikan
khususnya dalam jatuh bangun
mengembangkan pendidikan
karakter bagi anak didik sesuai
dengan konteks zamannya.
Momen reflektif, sebuah momen
yang melalui pemahaman
intelektualnya manusia mencoba
melihat persoalan metodologis,
filosofis, dan prinsipil yang
berlaku bagi pendidikan karakter.
Momen praktis, yaitu dengan
bekal pemahaman teroretis
konseptual itu, manusia mencoba
menemukan secara efektif agar
proyek pendidikan karakter dapat
efektif terlaksana di lapangan
(Masnur Muslich, 2011).

Penjelasan mengenai komponen definisi karakter diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Relatif stabil; suatu kondisi yang apabila telah terbentuk akan tidak mudah diubah. Landasan; Kekuatan yang pengarnya sangat besar/ dominan dan menyeluruh terhadap hal – hal yang terkait langsung dengan kekuatan yang dimaksud. Penampilan perilaku; aktivitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (setting) dan bidang kehidupan sebagaimana tersebut diatas. Standar nilai/ norma: kondisi yang mengacu kepada kaidah kaidah agama, ilmu, teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari – hari seperti: keimanan, dan ketaqwaan, pengendalian diri, disiplin, kerja keras, dan ulet, bertanggungjawab, jujur, membela kebenaran,kepatutan, kesopanan, dan kesantunan, ketaatan pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan,

musyawarah, dan gotong royong, toleran, tertib, damai, dan anti kekerasan, hemat, konsisten.

Pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa mendesak untuk diterapkan. Pendidikan karakter menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global.

KKNI DAN KOMPETENSI DOSEN, LULUSAN PROGRAM STUDI PPKN

Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.

- b. setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi.
- c. setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka secara eksplisit program studi memiliki kewajiban merumuskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam kurikulum,

melaksanakan kurikulum, dan secara berkesinambungan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai dengan jenjang program studi.

Kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur (Hall dan Jones dalam Mukminan, 2003 :2). Orang yang memiliki kompetensi berarti memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi dosen sebagaimana diatur oleh Undang-undang adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi

Pedagogik

Kompetensi Pedagogik adalah salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai dosen. Kompetensi Pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, bahwa kompetensi pedagogik adalah

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi

Kepribadian

Pribadi dosen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian sangat dibutuhkan peserta didik untuk membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu dosen dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian

yang memadai. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi tauladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang dosen untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya (bermasyarakat) itu diwujudkan oleh dosen dalam bentuk tindakan nyata di masyarakat baik saat ia sedang bertugas maupun saat sedang tidak bertugas.

d. Kompetensi Profesional

Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang dosen adalah kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas dosen sebagai pembimbing, pendidik, dan pengajar. Kemampuan profesional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Menurut Sapriya (2013,) Dalam merumuskan kurikulum, program studi perlu membentuk Tim Pengembang Kurikulum tingkat prodi yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Program Studi berbasis KKNI.

Hasil yang diharapkan dari Tim kerja ini adalah terbentuknya dokumen kurikulum program studi. Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2013), antara lain, merumuskan sistematika kurikulum program studi yang mencakup: (1) Visi dan misi Prodi; (2) Profil dan kompetensi lulusan; (3) Pokok-pokok kajian substansi materi perkuliahan; (4) Pengalaman belajar mahasiswa (proses pembelajaran); (5) Lingkup kajian materi dan bobot sks masing-masing mata kuliah; (6) Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; dan (7) Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah.

Dalam mengembangkan kurikulum, Tim Pengembang perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dapat dikembangkan dari landasan filosofis, teoritis, sosiologis, pedagogis, yuridis, ekologis, dan demokratis. Berikut

ini adalah contoh beberapa prinsip pengembangan kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2013): (1) Keutuhan Pendidikan Profesional Guru; (2) Keterkaitan Belajar dan Mengajar; (3) Koherensi antar Konten Kurikulum; (4) Multikulturalisme dan Kearifan Lokal; (5) Pembaharuan dan Kestinambungan; (6) Fleksibilitas; (7) Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender; (8) Pendidikan Inklusi; (9) Kesadaran Lingkungan (*Green Living*); dan (10) Demokrasi. Prinsip pengembangan kurikulum sangat penting dimiliki oleh universitas karena akan menjadi pedoman bagi Tim Pengembang kurikulum serta menjadi arah untuk mencapai visi dan misi.

Penutup

Upaya penyempurnaan dan peningkatan mutu kelembagaan harus terus dilakukan dan diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan

secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek – aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya. Pengembangan aspek – aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi dosen. Hal penting yang perlu ditindaklanjuti dalam implementasi kebijakan berbasis KKNI adalah kesiapan keseluruhan komponen civitas akademika, dalam hal ini dosen untuk meningkatkan kompetensinya, dan tentunya akan meningkatkan kompetensi lulusan program studi.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi, 1991. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta

Amin Ibrahim, 2004. Pokok – pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP), Bandung : Mandar Maju

Anonim, 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa

Borg, Walter R dan Gall, Meredith D. 1983. Educational Research: An Introduction. New York: Longman.

Budimansyah, D. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press.

Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo

Burhan Ashsofa, 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta

Donie Koesuma, 2007. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik di Zaman Global. Grasindo: Jakarta

Edy Suandi & Sobirin Malian, et al, 2004. Memperkokoh

- Otonomi Daerah (Kebijakan Evaluasi dan Sasaran. Yogyakarta : UII Perss
- Esmi Warassih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama
- Hariwung AJ, 1990. Supervisi Pendidikan. Jakarta : DIKTI
- H.A.R Tilaar, 2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta
- Hesel Nogi S Tangkilan, 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi dan Kasus). Yogyakarta : Lukman Offset
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
- Sapriya, 2013. Revitalisasi Kurikulum Program Studi PKn Berbasis KKNI, makalah seminar nasional AP3KNI Jateng
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas, Ditjen Dikdasmen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta:Depdiknas, Ditjen Dikdasmen

Undang-Undang Republik
Indonesia No. 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan

Tinggi. Jakarta: Depdiknas,
Ditjen Dikdasmen

PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Siti Supeni, Fitri

Prodi PPKn FKIP UNISRI Surakarta

Alamat email : peni.unisri@yahoo.com

ABSTRACT. *Research objectives are: (1) To determine the positive effect between the professionalism of teachers to the character of learners (2) To know the positive influence between the school environment to the character of learners (3) To know the positive influence between the school environment and the professionalism of teachers together to the character formation of students in junior high Kemusu NI academic year 2013/2014. In this study population was all class VII SMP I Kemusu Academic Year 2013/2014, which totaled 141 students consisting of 5 classes. Data collection techniques used questionnaires and documentation. Based on the results of the data analysis, the results of the analysis of the data obtained are as follows: 1) The school environment influence on character formation of students, which gained t value $(2.609) > t$ table (2.042) , or the value of significance $(0.015 > 0.005)$ so that H_0 rejected H_a accepted which means there is the influence of the school environment on character formation of students of class VII SMP Negeri 1 Kemusu academic year 2013/2014; 2) The professionalism of teachers affect the character formation of the students, acquired $(2,462) >$ value table $(2,042)$ or the significance value $(0.021) > (0.005)$ so that H_0 refused and H_a accepted which means there is the influence of teacher professionalism towards character formation of students of class VII SMP Negeri 1 Kemusu Th Lesson 2013/2014.*

Kata kunci: *school environment, teacher professionalism, character.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, peran guru dan lingkungan sekolah merupakan faktor yang mendukung dalam proses pendidikan dan keberhasilan tercapainya tujuan dari pendidikan. Seperti tercantum

Dalam UU Guru dan Dosen, UU no 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa "Guru di identifikasikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah".Peningkatan mutu sekolah di dukung dan tergantung dengan keberadaan guru yang profesional dengan melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Guru dikatakan profesional apabila guru mempunyai kemampuan mengajar dengan cara yang baik, serta memiliki pegangan yang di akui seperti ijazah atau gelar kependidikan, perencanaan pembelajaran dalam hal ini adalah RPP dan pelatihan-pelatihan. Profesional guru berpengaruh terhadap pembentukan karakter karena guru berperan penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter, berbudaya dan bermoral.

M Ani Hasan (2003:35) mengemukakan guru yang professional harus memenuhi kriteria, antara lain : (1) Mempunyai komitmen terhadap siswa dan proses pembelajarannya, (2) Menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang di ajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa, (3) Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) Mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dalam belajar dan lingkungan profesinnya. Untuk

memenuhi sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting.Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Membentuk kepribadian manusia seutuhnya diperlukan melalui proses pendidikan dan budaya untuk meningkatkan harkat serta martabat manusia, karena melalui usaha pendidikan ini diharapkan dapat mengarahkan petkembangan anak didalam pembentukan suatu pribadi yang mandiri secara susila. Faktor lain yang mempunyai hubungan dalam pembentukan karakter peserta didik yaitu lingkungan. Pertama kali karakter di bentuk di lingkungan keluarga, kemudian berlanjut di lingkungan sekolah dan masyarakat.Ini semua yang

merupakan lingkungan pendidikan yang berpengaruh besar dalam pendidikan anak. Karena proses pendidikan selalu berlangsung dalam lingkungan tertentu yang berhubungan ruang dan waktu. Setiap peserta didik memiliki karakter sendiri-sendiri. Dan di sinilah tugas guru yang profesional. Yang harus dapat mengenali satu persatu karakter peserta didiknya dengan baik.

Lingkungan sekolah berperan penting dalam proses belajar dengan sarana dan prasarana sangat diperlukan guna untuk memperlancar proses belajar peserta didik serta kemudahan para pendidik dalam memberikan materi. Selain itu lingkungan yang pengaruhnya paling tinggi adalah bermacam-macamnya karakteristik dari semua warga sekolah. Dari beragam Karakter yang muncul sering kali membuat perubahan pola berfikir peserta didik, sehingga menimbulkan pertanyaan dari dalam diri mereka. Karena peserta didik di Sekolah Menengah Pertama berada di usia yang masih labil yang rentan terhadap pengaruh budaya baru yang kemudian akan menjadi kebiasaan. Sehingga pembentukan karakter paserta didik sejak dini sangat di utamakan untuk mencegah perilaku menyimpang sebab perjalanan masih panjang dalam

proses pencarian jati diri untuk bekal masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, sebagai pendidik yang profesional jelas tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, tapi juga sebagai cermin dimana subyek didik dapat berkaca. Apapun yang peserta didik lihat itu besar kemungkinan akan ditiru peserta didik. Hakikat guru pendidik itu adalah bahwa ia harus dapat digugu dan ditiru. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai dan memahami kode etik serta kompetensi-kompetensi yang memang dikuasai oleh guru.

SMP Negeri 1 Kemusu, merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang ada di kecamatan Kemusu beralamatkan di Jl. Raya Klewor-Kemusu-Boyolali kode pos 57383 Jawa Tengah-Indonesia. Peneliti melihat berdasarkan kenyataan yang ada bahwa di dalam lingkungan sekolah tersebut terdapat kondisi yang tidak pas dengan yang diharapkan dalam pendidikan. Masih rendahnya kesadaran tentang norma-norma yang dimiliki oleh peserta didik dalam berinteraksi dengan guru. Kondisi karakter tiap peserta didik berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh banyak hal antara lain adalah faktor diri sendiri, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Dalam mencapai sasaran tersebut diatas peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah sangat penting dalam membentuk karakter siswa, diimplementasikan dalam setiap pokok bahasan materi terdapat nilai-nilai yang mengajarkan manusia dituntut memiliki karakter yang baik sebagai generasi penerus bangsa. Sesuatu yang tidak mudah mengubah dan membentuk karakter peserta didik untuk itu, tidak hanya guru Pendidik Kewarganegaraan saja yang mempunyai peran, melainkan semua guru pendidik yang ada di lingkungan sekolah mempunyai tanggung jawab dalam membantu memperbaiki dan perkembangan karakter peserta didik. Berdasar latar belakang di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara profesionalisme guru dengan karakter siswa dan kondisi interaksi antara guru dengan peserta didiknya yaitu, lingkungan sekolah yang erat kaitanya dengan pembentukan karakter peserta didik, pengaruh positif - negatif datang dari berbagai karakter yang dibawa dari luar sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif akan berpengaruh

terhadap karakter peserta didik?,

- b. Bagaimanakah profesionalisme guru akan berpengaruh terhadap karakter peserta didik?
- c. Bagaimanakah menciptakan lingkungan sekolah dan profesionalisme guru berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik ?

KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Tentang Pembentukan Karakter Peserta Didik.

- a. Karakter

Menurut kamus bahasa Indonesia Purwadarminto, karakter di artikan sebuah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budu pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Karakter merupakan sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Menurut Mochtar Buchori (2007:12), "pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata". Permasalahan pendidikan karakter yang selama ini ada di SMP perlu segera dikaji, dan dicari alternatif-alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan di

sekolah. Sedangkan Doni Kusuma (2007:80) "istilah karakter dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Proses peniruan tersebut berlangsung secara terus-menerus mulai dari anak-anak, dewasa dan sampai tua". Prayitno (2009:32), "menyatakan kehidupan manusia tidak akan berkembang tanpa adanya peniruan karena peniruan merupakan dasar kehidupan bersama yang membuat kehidupan menjadi manusiawi".

b. Pembentukan Karakter

Membentuk karakter tidak bisa dilakukan dalam sekejap dengan memberika nasihat, perintah, atau instruksi, namun lebih dari hal tersebut. Pembentukan karakter memerlukan teladan/*role model*, kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan. Dengan demikian proses pembentukan karakter merupakan proses pendidikan yang dialami oleh peserta didik sebagai bentuk pengalaman pembentukan kepribadian melalui mengalami sendiri nilai-nilai kehidupan, agama, dan moral.

Menurut Ratna Megawangi, pendiri Indonesia Heritage Foundation, ada tiga tahap pembentukan karakter, yakni: (1) *Moral Knowing*, memahami dengan baik pada anak tentang arti

kebaikan. Mengapa harus berperilaku baik. Untuk apa berperilaku baik. Dan apa manfaat berperilaku baik, (2) *Moral Feeling*, membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadi sumber energy anak untuk berperilaku baik. Membentuk karakter adalah dengan cara menumbuhkannya, (3) *Moral Action*, bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan nyata. *Moral action* ini merupakan *outcomedari* dua tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang menjadi *moral behavior*. Dengan melalui tiga tahap tersebut, proses pembentukan karakter akan menjadi lebih mengena dan peserta didik akan berbuat baik karena dorongan interaksi dari dalam dirinya sendiri.

c. Nilai-nilai Pembentuk Karakter

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang untuk saat ini diperkuat dengan 18 nilai hasil kajian empiric pusat kurikulum. "Nilai prakondisi (*the exiting values*) yang dimaksud antara lain takwa, bersih, rapi, nyaman, dan santun" (Pedoman

Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Puskurbuk, 2011:2).

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu : (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli social, (18) Tanggung jawab. (*pusat kurikulum. Pengembangan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa: pedoman sekolah. 2009:9-10*).

d. Sifat-sifat karakter, yaitu :

Kebiasaan: reaksi yang kompleks dan tetap dalam tingkah laku manusia timbul karena adanya latihan, meniru dan pengulangan, (2) Kecenderungan untuk berbuat, (3) Organisasi perasaan, emosi dan sentiment, (4) Minat atau interest: kecenderungan terhadap sesuatu secara intensif terhadap satu tujuan atau obyek yang dianggap penting, (5) Kemauan organisator dari pada karakter. (<http://anggerose.wordpress>.

com/2012/05/08/karakteristik-peserta-didik/)

Penulis berpendapat bahwa pembentukan karakter peserta didik tidak begitu saja muncul, terbentuk secara sendirinya dengan di dominasi oleh lingkungan yang di tempati. Dapat ditunjukkan melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai sesuai norma-norma yang berlaku. Karakter yang diperlihatkan melalui perkataan, perbuatan dan tingkah laku bisa baik dan bisa tidak baik berdasarkan penilaian lingkungannya.

2. Tinjauan Tentang Lingkungan Sekolah

a. Lingkungan

Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materilnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan dengan lingkungan social manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. (Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, 2007: 234). Secara psikologis, lingkungan mencakup segala stimulus yang di terima oleh

individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran, sampai matinya. Stimulasi itu misalnya, berupa sifat genus, interaksi genus, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas intelektual. Secara sosio cultural, lingkungan mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Penulis dapat menyimpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan kedua sesudah keluarga. Tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, baik status sosial maupun agamanya. Disekolah inilah anak akan terwarnai oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan, yang dibawa masing-masing anak dari lingkungan dankondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Begitu juga para pengajar berasal dari berbagai latar belakang pemikiran dan budaya serta kepribadian. Seorang pengajar merupakan *figure* dan tokoh yang menjadi panutan anak-anak dalam mengambil semua nilai dan pemikiran

tanpa memilah antara yang baik dengan yang buruk. Karena anak-anak memandang, guru adalah sosok yang disanjung, didengar dan ditiru. Sehingga pengaruh guru sangat besar terhadap kepribadian dan pemikiran anak. Seorang guru/pengajar harus membekali diri dengan ilmu din (agama) yang shahih sesuai dengan pemahaman salafush-shalih dan akhlak yang mulia, serta rasa sayang kepada anak didik. Dan tidak kalah penting, dalam membentuk kepribadian anak di sekolah adalah kurikulum pendidikan. Lingkungan sekolah pun besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan dan perkembangan pribadi peserta didik. Menurut Al-Ghazali (2007:12) "bukan saja orang tidak punya cacat budi pekertinya yang bisa dibentuk dan dikembangkan, anak yang berakhlak buruk pun bias diubah melalui pendidikan".

Penulis berpendapat bahwa cara memperbaiki perilaku anak yang buruk melalui pendidikan: anak-anak yang disiasikan pada awal pertumbuhannya, akhlaknya buruk, pendusta, pendengki, pencuri, peminta-minta, suka barkata yang sia-sia, suka tertawa tidak pada tempatnya, penipu dan banyak senda gurau, di sekolah akan mempelajari akhlak dan budi pekerti yang baik yang mengandung cerita-cerita dan

riwayat tentang seorang yang baik-baik, agar tertanam dalam pikirannya kecintaan kepada orang-orang yang shaleh.

3. Tinjauan Tentang Profesionalisme Guru

a. Profesionalisme Guru

Profesionalisme berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, profesionalisme itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Profesionalisme guru berarti dapat berarti guru yang professional.

Salah satu ciri dari sebuah profesi adalah adanya kode etik yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku bagi para penyandang profesi yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, secara tegas dinyatakan bahwa guru adalah tenaga professional yang berkewajiban untuk senantiasa menjunjung tinggi kode Etik Guru, agar kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya dapat terpelihara. Kode Etik guru berisi seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan professional guru, sesuai dengan nilai-nilai

agama, pendidikan social etika dn kemanusiaan.

Guru yang bersikap baik dan professional sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan suasana lingkungan sekolah. Sikap baik guru berpengaruh pada jalannya proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang baik berpengaruh pada perbuatan dan tingkah laku warga sekolah khususnya peserta didik. Tingkah laku peserta didik dilingkungan sekolah terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan berpengaruh pada karakter siswa tersebut. Ketauladanan guru yang baik membentuk karakter peserta didik yang baik. Karakter baik tersebut ditunjukkan dalam perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku yang baik tersebut akan menarik simpati orang lain terhadap dirinya.

Profesionalisme guru digambarkan dengan guru yang memiliki rasa dedikasi, loyalitas, dan kesungguhan dalam keberhasilan pekerjaannya. Pendidik yang profesionali dalam mendidik kecerdasan dan karakter peserta didik memiliki kualifikasi pendidik yang cerdas secara intelektual dan berkarakter. Kompetensi adalah kata yang tepat untuk mewakili dua hal tersebut. Saat ini guru yan berkompeten sangat dibutuhkan

tenaga dan dedikasinya. Seperti yang termuat dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10 yang menyatakan "kompetensi adalah seperangkat alat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalanya". Pengetahuan adalah salah satu kompetensi yang dimuat dalam pasal tersebut.

M. Furqon menjelaskan bahwa pendidikan berkarakter yakni pendidikan yang memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Nilai dan keyakinan itulah yang dibutuhkan guru dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai dan keyakinan guru dapat dijadikan contoh oleh peserta didik. Segala tingkah laku dan moralnya akan menjadi sorotan mereka. Peserta didik akan dengan mudahnya meniru apa yang mereka lihat dari guru mereka. Karakter peserta didik pun akan tumbuh sering dengan semakin seringnya mereka berinteraksi dengan guru.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjamin tercapainya suatu pendidikan, guru dituntut

memiliki kompetensi dasar seorang guru, salah satunya adalah kompetensi profesional. Dimana guru harus menguasai semua yang berkaitan dengan peserta didik, selain materi dibidangnya menguasai karakter tiap peserta didik juga wajib di kuasai. Guru diharuskan mempunyai kepribadian yang baik dan sikap-sikap yang berpedoman pada pancasila tentunya. Karena profesional saja belum cukup sehingga di perlukan kepribadian guru yang berarti faktor penting untuk melaksanakan tanggung jawabnya, selain itu juga kemampuan dalam mengembangkan dalam metode dan intensitas aktivitas interaktif guru dengan peserta didik. Hal tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan dan perbaikan karakter peserta didik serta menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.

b. Profesi Guru

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipergunakan sebagai perangkat dasar dan implementasi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Guru sebagai pendidik ataupun sebagai pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah. Tugas guru yang utama adalah memberikan pengetahuan,

sikap/nilai, dan keterampilan. Usman (1990:4) mengatakan bahwa guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.

c. Kompetensi Guru

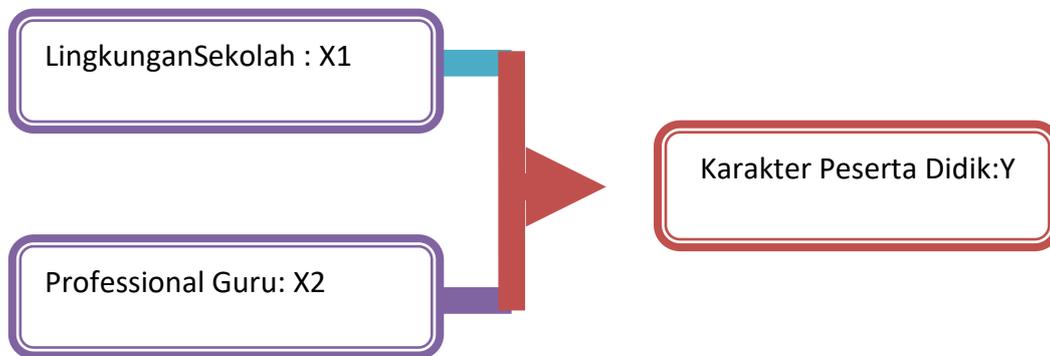
Kemampuan guru sering disebut dengan kompetensi, yaitu seperangkat kemampuan yang harus dikuasai guru dalam dalam proses belajar mengajar, Trimo (1999:31). Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi yang harus di miliki oleh seorang guru yaitu: (1) Kompetensi Pedagogik, pasal 28 ayat (3) kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (2) Kompetensi Personal atau Kepribadian, Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, (3) Kompetensi Professional, Pasal 28 ayat 3 butir c, dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan., (4) Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

1. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu bulan Juni sampai bulan juli 2014.

Populasi dan Sampel

1. Populasi
Menurut Sugiyono (2012 :119) Populasi adalah bukan sekedar jumlah yang ada

pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu, Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) yang dimaksud populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek dalam jumlah besar yang akan diselidiki dan dari banyak subyek itu diharapkan

diperoleh data yang diharapkan.

Adapun populasi yang diteliti adalah siswa kelas VII SMP N I Kemusu yang berjumlah 141 peserta didik yang terdiri dari 5 kelas.

2. Sampel

Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili), sugiyono (2012 :120).

Sampel yang di ambil dalam suatu penelitian harus mencerminkan gambaran populasi, untuk mendapatkan suatu sampel yang representative adalah sampel yang mampu mewakili populasi agar dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi. Berdasarkan

pendapat di atas dapat diketahui bahwa tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai berapa persen sampel yang harus di ambil dari populasinnya, tetapi jika menginginkan taraf representative yang tinggi maka sampelnya yang di ambil harus besar.

3. Sampling

Yang dimaksud dengan sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Teknik mengambil sampel ada dua macam yaitu teknik random sampling dan teknik non random sampling. Dalam penelitian ini digunakan teknik *random sampling*, dengan cara acak yang di ambil dari nomer absen genap sejumlah 20 peserta didik untuk try out dan ganjil sejumlah 30 untuk penelitian.

Variabel Penelitian

“Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” Suharsimi Arikunto (2002:91)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan antara dua variabel yaitu

variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:93) " Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab yang sering diberi kode (X). Sedang variabel terikat adalah variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi atau variabel tergantung yang sering diberi kode (Y)". Dalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu:

1. Variabel bebasnya adalah
 - a. Lingkungan Sekolah (X_1)
 - b. Profesionalisme Guru (X_2)
2. Variabel terikat adalah Karakter Peserta Didik kelas VII SMP N I Kemusu (Y)

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket (Quisioner)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu

dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, sugiyono (2012 :193).

Bentuk angket secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket yang berstruktur adalah angket yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban, sehingga responden hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Bentuk jawaban angket berstruktur adalah tertutup, artinya pada setiap item sudah tersedia berbagai alternatif jawaban. Sedangkan angket tidak berstruktur adalah angket yang disusun sedemikian rupa sehingga responden bebas mengemukakan pendapatnya. Bentuk jawaban angket tak berstruktur adalah terbuka, artinya setiap item belum terperinci dengan jelas jawabannya. Kondisi ini memungkinkan jawaban responden sangat beranekaragam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti tertulis yang memberi

keterangan tentang kenyataan atau peristiwa social, Ariyono Suyono, 2008:298) "Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang sudah ditentukan." Suharsimi Arikunto (2002 : 206)

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada di SMP N I Kemusu sebagai lokasi dan obyek penelitian.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data Sekolah dan nama peserta didik kelas VII SMP N I Kemusu serta foto rekaman proses tindakan penelitian.

a. Hasil uji Reliabelitas

Uji reliabelitas menggunakan program SPSS dan dari hasil uji reliabelitas lingkungan sekolah diperoleh nilai Cronbach Alpha 0,977 >0,06 dan nilai Cronbach Alpha variabel profesionalisme guru adalah 0,977 > 0,06 sehingga variabel lingkungan sekolah dan profesionalisme guru dinyatakan reliabel.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Hasil analisa ini digunakan untuk menguji hipotesa yang diajukan apakah diterima atau ditolak. Berhubung data yang berhasil dikumpulkan berupa angka-angka maka teknik pengolahan data menggunakan analisa statistik.

Kesimpulan

1. Uji F

Uji ini untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel independen yaitu lingkungan sekolah dan profesionalisme guru terhadap variabel dependen yaitu pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP Negeri I Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.

d. Menentukan level of significance (α) = 5%

Dengan derajat kebebasan (dk); k; (n-1-k)

F table = α ; k; (n-1-k) atau 0,05; k; (n-1-k)

e. Mencari F hitung

$$F_{hitung} = \frac{SSR / K}{SS Res / n - 1 - k}$$

Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2000:308)

Keterangan :
 SSR : *Sum of Square Regression*
 SSRes : Banyaknya Variabel bebas/independen
 n : Jumlah data

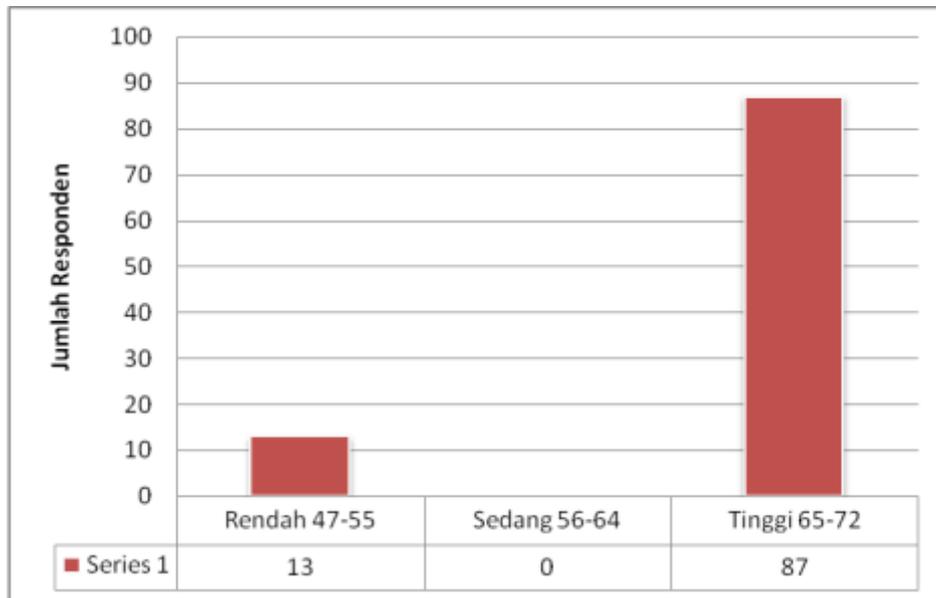
f. Kesimpulan
 Hasil perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} apakah hipotesis ditolak atau diterima.

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
 Lingkungan Sekolah

Dari hasil tersebut diketahui bahwa lingkungan sekolah berpengaruh sebanyak (13%), tidak ada responden yang berpengaruh sedang, dan responden yang berpengaruh sangat tinggi sebanyak 87%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN



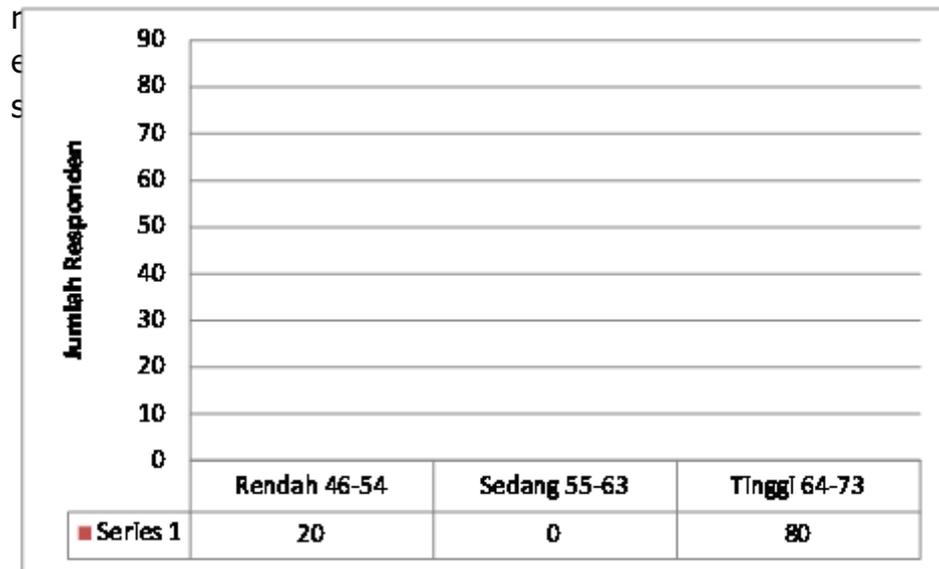
Gambar 2.
 Grafik Lingkungan Sekolah

1. Profesionalisme Guru

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai

profesionalisme guru maka digunakan tabel *range* (di mana nilai tertinggi – nilai terendah) kemudian dimasukan ke dalam distribusi frekuensi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa profesionalisme guru berpengaruh rendah sebanyak 6 orang (20%), tidak ada responden yang berpengaruh sedang, dan

ponden yang berpengaruh sangat tinggi sebanyak 24 orang (80%). Untuk lebih jelasnya dilihat pada grafik batang di bawah ini



Gambar 3.
Grafik Profesionalisme Guru

2. Pembentukan Karakter Peserta Didik

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pembentukan karakter peserta didik SMP N I

Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014 maka digunakan tabel range (dimana nilai tertinggi – nilai terendah) kemudian dimasukan ke dalam distribusi frekuensi

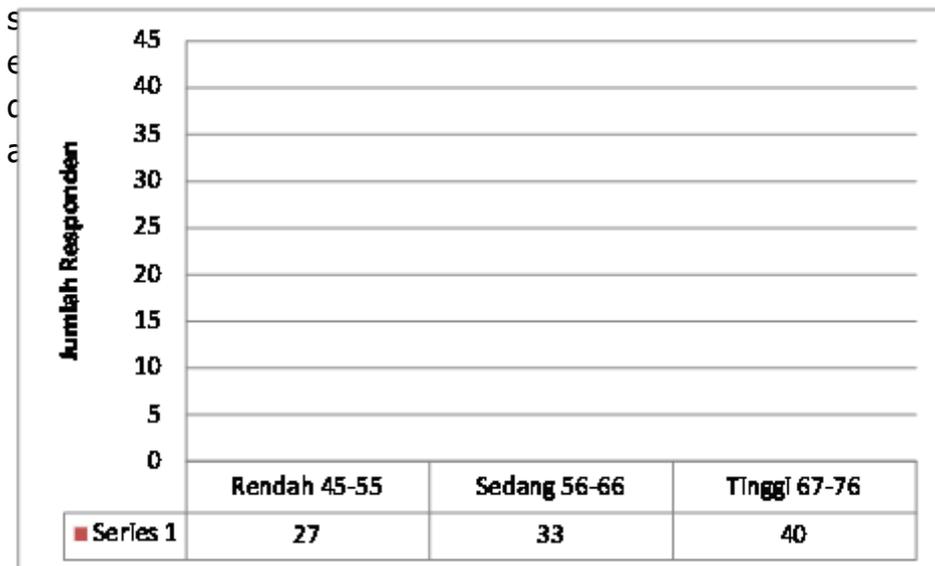
Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.
Pembentukan Karakter

Kelas	Lingkungan Sekolah	Jumlah Responden	Persentase (%)
45 – 55	Rendah	8	27
56 – 66	Sedang	10	33
67 – 76	Tinggi	12	40
Jumlah		30	100

Dari hasil tersebut diketahui bahwa pembentukan karakter peserta didik SMP N 1 Kemusu Tahun ajaran 2013/2014 berpengaruh rendah sebanyak 27%, responden yang berpengaruh

ng 33%, dan responden yang berpengaruh sangat tinggi sebanyak 12 orang (40%).



Untuk lebih jelasnya dilihat pada grafik batang di bawah ini

Gambar 4.

Grafik Pembentukan Karakter

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil persamaan regresi linier berganda :

$$Y = 2,917 + 0,487X_1 + 0,396X_2$$

Dari persamaan garis regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

$a = 2,917$ adalah konstanta yang artinya apabila lingkungan sekolah dan profesionalisme guru dianggap tetap, maka pembentukan karakter peserta didik adalah positif.

$b_1 = 0,487$ koefisien variabel lingkungan sekolah (X_1) bernilai positif, sehingga terdapat hubungan yang searah, yaitu apabila lingkungan sekolah mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik juga akan meningkatkan asumsi variabel profesionalisme guru dianggap tetap.

$b_2 = 0,396$ koefisien variabel profesionalisme guru (X_2), bernilai positif, sehingga terdapat hubungan yang searah, yaitu apabila profesionalisme guru

mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik juga akan meningkatkan asumsi variabel lingkungan sekolah dianggap tetap.

2. Uji t

a. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Hasil tampilan SPSS diperoleh nilai t hitung (2,609) > nilai t tabel (2,042) atau nilai signifikansi (0,015 > 0,005) sehingga H_0 ditolak H_a diterima yang berarti ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.

b. Pengaruh profesionalisme guru terhadap pembentukan karakter peserta didik.

Hasil tampilan SPSS diperoleh nilai t hitung (2,462) > nilai t tabel (2,042) atau nilai signifikansi (0,021 > 0,005) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh

profesionalisme guru yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP N 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.

3. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel lingkungan sekolah dan profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dari hasil analisis yang digunakan menunjukkan bahwa nilai F hitung ($13,003 > 3,32$) atau nilai signifikansi $0,000 > 0,005$ berarti bahwa variabel lingkungan sekolah dan profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Al-Ghazali (2007:12) bukan saja orang tidak punya cacat budi pekertinya yang bias dibentuk dan dikembangkan, anak yang berakhlak

buruk pun bisa diubah melalui pendidikan. Sehubungan dengan hal ini ia menunjukkan suatu cara memperbaiki perilaku anak yang buruk melalui pendidikan : "anak-anak yang disia-siakan pada awal pertumbuhannya, akhlaknya buruk, pendusta, pendengki, pencuri, peminta-minta, suka barkata yang sia-sia, suka tertawa tidak pada tempatnya, penipu dan banyak senda gurau. Sesungguhnya yang demikian itu dapat dijaga dengan pendidikan. Masukan ia kesekolah, disana ia akan mempelajari akhlak dan budi pekerti yang baik yang mengandung cerita-cerita dan riwayat tentang seorang yang baik-baik. Supaya tertanam dalam pikirannya kecintaan kepada orang-orang yang shaleh.

Narves (2006:134), peserta didik yang mendapatkan pendidikan berkarakter moral akan lebih (a). Mudah memahami situasi moral secara akurat dan menegakkan aturan atau nilai yang diinternalisasi, (b). Mempunyai alat atau metode untuk memecahkan masalah moral yang kompleks, (c). Tetap berfokus terhadap tugas-tugas akademis dan termotifasi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran, (d). Mampu memprioritaskan tujuan-tujuan etis untuk pengembangan diri dan pemberdayaan social. Oleh karena itu, Negara-negara maju turut

menekankan pendidikan berkarakter moral tersebut sebagai *soft-skill* yang mengikuti kompetensi pembelajaran. Dengan demikian, lulusan dunia pendidikan akan lebih siap berkompentensi dalam era global saat ini.

Hasil penelitian diketahui bahwa profesionalisme guru mempunyai pengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.

Profesionalisme guru digambarkan dengan guru yang memiliki rasa dedikasi, loyalitas, dan kesungguhan dalam keberhasilan pekerjaannya. Pendidik yang profesionalisme dalam mendidik kecerdasan dan karakter peserta didik memiliki kualifikasi pendidik yang cerdas secara intelektual dan berkarakter. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Baedhowi dalam www.infodiknas.com, guru perlu mengembangkan nilai-nilai karakter dalam dirinya dan memiliki peran penting dalam pembnetukan karakter peserta didik. Guru perlu memiliki karakter yang kuat dan positif untuk dapat membentuk peserta didik yang berkarakter. Mereka tidak hanya menjadi pendidik dan pengajar bagi peserta didik, namun mereka mampu menjadi teladan bagi peserta didik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Lingkungan sekolah berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik dimana diperoleh nilai t hitung (2,609) > nilai tabel (2,042) atau nilai signifikansi (0,015 > 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP N 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Profesionalisme guru berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik dimana nilai t hitung (2,462) > nilai t tabel (2,042) atau nilai signifikansi (0,021 > 0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh profesionalisme guru yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP N 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.
3. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung (13,003 > 3,32) atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05

berarti bahwa variabel lingkungan sekolah dan profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Kemusu Tahun Pelajaran 2013/2014.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Guru
Hendaknya guru menjadika bahan masukan guna meningkatkan keprofesionalisme guru dalam membentuk serta memahami karakter peserta didik di lingkungan sekolah dapat tercipta hubungan yang baik sesuai kode etik.
2. Bagi Peserta didik
Hendaknya selalu berperilaku baik yang mencerminkan nilai-nilai berkarakter

Daftar Pustaka

- Agustina, Ari Ginanjar. 2007. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*. Jakarta: Arga
- Al- Ghazali. 2007. *Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Perilaku Anak*. Jakarta: CV. Nurul Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta.
- Baedhowi dalam [www.infidiknas.com/tantangan pendidikan masa depan dan kiat menjadi guru professional](http://www.infidiknas.com/tantangan-pendidikan-masa-depan-dan-kiat-menjadi-guru-professional).
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung Widya aksara Press
- Budiyono. 2000. *Statistika Dasar untuk Penelitian*. Surakarta: UNS Press
- Doni Koesuma, 2007. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Di Zaman Global*. Grasindo : Jakarta
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/>
- <http://anggerose.wordpress.com/2012/05/08/karakteristik-peserta-didik/>
- Kartini Kartono. 2005. *Psikolog Anak (Psikolog Perkembangan)*, Bandung : Alumni.
- Kemendiknas. 2010. *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama* . Jakarta
- Megawangiatna.2008. Dalam <http://www.langitperempuan.com/2008/02/ratna-megawangi-pelopor-pendidikan-holistik-berbasis-karakter/>

- Nur uhbiyati dan abu ahmadi, 2007. *Sosiologi keluarga*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Puskurbuk Tahun 2011
- Purwodarmanto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Pusat Kurikulum. 2009, *Pengembangan Dan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*
- Salim, Elim. 1995. *Lingkungan Hidup dan Pembanguna*. Bandung:1995
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Sutomo. 1998. *Profesi Kependidikan*. Semarang : IKIP Press.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*
- Usman. 1990. *Pengantar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru*. Bandung: Angkasa
- Uttoro. 2007. *Tentang Lingkungan Sekolah*. Jakarta : Grasindo
- Uyoh Sadulloh. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wasty Sumanto. 2000. *Bunga Rampa Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wiji Suwarno. 2008. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta : Paramita
- Wirawan. 2002. *Profesi dan standar evaluasi*. Jakarta: Yayasan Bangsa Indonesia